

LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2025



DINAS PUPR PROVINSI NTT



pupr.nttprov.go.id



Dinas Pupr Prov. NTT



[pupr.ntt](https://www.facebook.com/pupr.ntt)



[pupr_ntt](https://www.tiktok.com/pupr_ntt)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Tahun Anggaran 2025. Selain itu, LPPD ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, serta pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang berlaku.

Sepanjang Tahun 2025, Dinas PUPR Provinsi NTT telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan penataan ruang. Pelaksanaan program tersebut diarahkan untuk meningkatkan konektivitas wilayah, ketahanan sumber daya air, kualitas infrastruktur permukiman, serta tertib tata ruang guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih terdapat berbagai tantangan dan keterbatasan, baik dari aspek teknis, pembiayaan, maupun kondisi geografis wilayah NTT yang cukup kompleks. Oleh karena itu, laporan ini juga memuat evaluasi kinerja, capaian indikator, serta upaya perbaikan berkelanjutan sebagai bahan refleksi dan perumusan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya.

Akhir kata, semoga Laporan LPPD Tahun 2025 ini dapat menjadi dokumen yang informatif, akuntabel, dan bermanfaat dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kupang, Januari 2026

Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT



H. Benyamin Nahak, MT

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19710428 199903 1 008

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum (*diisi oleh Biro Pem.....*)

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah (*diisi oleh Biro Pem.....*)

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (*diisi oleh Biro Pem.....*)

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro (diisi oleh Biro Pem.....)

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (ada pada lampiran)

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Catatan : Pada Lampiran 2.1.1

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-		Dinas PUPR
2		-		
3		-		

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja Tahun N	Sumber Data
1	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Informasi capaian akuntabilitas pemerintah Daerah antara lain :

2.3.1 Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Catatan : Pada Lembaran berikutnya:



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Benyamin Nahak, MT
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **E. Melkiades Laka Lena**
Jabatan : **Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, November 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

E. Melkiades Laka Lena

Ir. Benyamin Nahak, MT

PARAF HIERARKI	
Wakil Gubernur	
Plh. Sekretaris Daerah	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Penelaah Teknis Kebijakan	



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Benyamin Nahak, MT
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **E. Melkiades Laka Lena**
Jabatan : **Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, November 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

E. Melkiades Laka Lena

Ir. Benyamin Nahak, MT

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kebutuhan Air Irigasi Dan Meningkatkan Produksi Panen	1. Luas Areal Irigasi Fungsional	2000 Ha
2.	Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan	2. Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan	625.720 M3
3.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terhadap Air Minum Layak	3. Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/ Kota	100 %
4.	Meningkatnya kualitas Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	4. Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	86,86 %
5.	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	5. Cakupan Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	86,96 %
6.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	6. Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	18,18 %

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Target
1.	APBD		
a.	Belanja (Program)	Rp. 193.368.808.591,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 47.360.126.959,-	Realisasi minimal 90%
	2. Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 12.358.055.294,-	Realisasi minimal 85%
	3. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 909.033.500,-	Realisasi minimal 85%
	4. Penataan Bangunan Gedung	Rp. 407.103.000,-	Realisasi minimal 85%
	5. Penyelenggaraan Jalan	Rp. 121.833.876.445,-	Realisasi minimal 85 %
	6. Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 800.000.000,-	Realisasi minimal 85 %
	7. Pengembangan Perumahan	Rp. 1.252.873.420,-	Realisasi minimal 85 %
	8. Kawasan Permukiman	Rp. 305.000.000,-	Realisasi minimal 85 %
b.	9. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 2.857.363.368,-	Realisasi minimal 85 %
	10. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BLUD)	Rp. 3.019.706.433,-	Realisasi minimal 85 %
	11. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD)	Rp. 2.265.670.172,-	Realisasi minimal 85 %
	Pendapatan	Rp. 5.700.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan	Rp. 199.068.808.591,-	Realisasi minimal 90%

No	Uraian	Alokasi	Target
2.	APBN		
a.	Program Dekonsentrasi		
1.			
b.	Program Tugas Pembantuan		
1.	TP OP SDA	Rp. 21.338.819.000,-	Realisasi minimal 85%
2.	TP Bina Marga	Rp. 8.867.243.000,-	Realisasi minimal 85%
	Jumlah Tugas Pembantuan	Rp. 30.206.062.000,-	Realisasi minimal 85%

- C. Belanja Menggunakan Aplikasi E-Purchasing (e-catalog dan toko daring) minimal 50% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;
- D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2025;
- E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 22 Januari 2025, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2025;
- F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2025;
- G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);
- H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK;
- I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:
1. TL rekomendasi Tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
 2. TL rekomendasi dibawah Tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
- J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;

- K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar serta surat manual yang di-upload) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);
- N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Kupang, November 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Gubernur Nusa Tenggara Timur,

E. Melkiades Laka Lena

PARAF HIERARKI	
Wakil Gubernur	
Plh. Sekretaris Daerah	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Organisasi	

Ir. Benyamin Nahak, MT

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Penelaah Teknis Kebijakan	

2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULA INDIKATOR
			2024	2025	2025	2025	
1	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kebutuhan Air Irigasi Dan Meningkatkan Produksi Panen	1. Luas Areal Irigasi Fungsional	35.704,79 Ha	2000 Ha	56.95 Ha	35.761,74 Ha	<p>Σ Luas Areal Irigasi yang berfungsi dengan baik</p> <p>Realisasi pencapaian Sasaran : “Meningkatnya pelayanan terhadap kebutuhan air irigasi dan meningkatnya produksi panen” dengan ukuran indikator output adalah Luas Areal Irigasi Fungsional. Tahun 2024 Target Penanganan Luas Areal Irigasi Fungsional sebanyak 1000 Ha, dan Realisasi Penanganannya sebanyak 913,40 Ha pada 1 (satu) Daerah Irigasi (D.I.) di Kabupaten Ngada. Dengan demikian Capaian Luas Areal Irigasi Fungsional yang sudah mendapat penanganan sampai dengan Tahun 2024 adalah 35.704,79 Ha atau 59,18 % terhadap target Luas Kewenangan Provinsi 60.328 Ha atau 86,56 % terhadap target akhir capaian Renstra Tahun 2024 - 2026 adalah 41.246,21 Ha. Di Tahun 2025 Luas Areal Irigasi Fungsional target penanganan 2000 Ha dan</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULA INDIKATOR
				2025	2025	2025	
							<p>Realisasi Penanganannya luas 56,95 Ha, sehingga capaian Luas Areal Irigasi Fungsional yang sudah mendapat penangangan sampai dengan Tahun 2025 adalah 35.761,74 Ha atau 59,18 % terhadap target Luas Kewenangan Provinsi 60.328 Ha dan terhadap target akhir capaian Renstra Tahun 2024 - 2026 adalah 41.246,21 Ha atau 86,56 % .</p> <p>Capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja belum tercapai secara signifikan dibandingkan dengan target yang direncanakan.</p> <p>Rendahnya capaian kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan fisik irigasi, serta kondisi jaringan irigasi eksisting yang memerlukan penanganan teknis lebih kompleks dari perencanaan awal. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi cuaca, ketersediaan material, serta proses koordinasi lintas kewenangan turut mempengaruhi percepatan pencapaian target luas areal irigasi fungsional.</p> <p>Sebagai tindak lanjut, upaya perbaikan kinerja akan difokuskan pada penajaman perencanaan teknis, penguatan koordinasi lintas</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULA INDIKATOR
			2024	2025	2025	2025	
							sektor dan lintas kewenangan, serta penyesuaian target yang lebih realistis dengan mempertimbangkan kapasitas anggaran dan kondisi lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan luas areal irigasi fungsional secara bertahap dan berkelanjutan. <i>Formula Pengukuran indikator ini adalah Luas areal irigasi fungsional yang mendapat penanganan di Tahun n</i>
		2. Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan	10,614,020 M3	625.720 M3	76,608 M3	10,690,628 M3	<p>Σ Jumlah Volume air dari bangunan penyedia air baku yang dibangun</p> <p>Indikator Jumlah Ketersediaan Air Baku dalam Menunjang Ketahanan Pangan pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 625.720 m³.</p> <p>Data kondisi kinerja sesuai ukuran target kinerja RPD Tahun 2024 - 2026 terkait Jumlah ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan sesuai data kondisi baseline 2022 adalah 10.438.220 M3. Pada Tahun 2023 Jumlah ketersediaan Air Baku yang dapat</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULA INDIKATOR
			2024	2025	2025	2025	
							<p>menunjang ketahanan Pangan hanya dapat tercapai 175.800 M3 dan di Tahun 2024 hanya dapat mencapai 72.576 M3. Sehingga Jumlah ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan sampai dengan Tahun 2024 sudah mencapai 10.686.596 M3.</p> <p>Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 , target yang ditentukan sebanyak 625,720 M3 dan realisasi ketersediaan air baku yang berhasil disediakan sebesar 76.608 m³ , sehingga tingkat capaian kinerja mencapai sekitar 10.763. 204 M3 atau 12,25%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja belum mencapai target yang direncanakan. Meskipun demikian, realisasi ketersediaan air baku yang telah dicapai tetap memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kebutuhan air untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan, khususnya pada wilayah prioritas. Capaian ini menjadi dasar penting untuk penguatan perencanaan dan penajaman sasaran kegiatan penyediaan air baku pada periode berikutnya.</p> <p><i>Perhitungan Debit Sumur Bor :</i></p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULA INDIKATOR
			2024	2025	2025	2025	
							<p>➢ Asumsi Debit Sumur Bor = 4,2 m³ / jam</p> <p>➢ Total jam operasi per hari = 8 jam; Total Debit per hari = 8 jam x 4,2 m³ = 33,6 m³ / hari</p> <p>➢ Debit per bulan = 33,6 m³ x 30 hari = 1.008 m³ / bulan</p> <p>➢ Debit setahun dihitung maksimal pada bulan basah (musim hujan) yaitu 4 bulan = 4 x 1.008 m³ = 4.032 m³ / tahun</p> <p>Di Tahun 2025 terdapat penaganan pembangunan sumur bor sebanyak 14 Unit dengan sumber anggaran murni dan 5 Unit merupakan luncuran Tahun 2024 dan 3 Unit dengan sumber anggaran pada perubahan anggaran sehingga total target terbangun 22 Unit Sumur Bor atau 22 x 4.032 m³ = 88.704 M3. Akan tetapi terdapat 3 bangunan sumur bor tidak selesai dikerjakan dan sebagai paket luncuran tahun 2026, sehingga total keseluruhan bangunan air baku yang dapat mendukung ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan pada tahun 2025 adalah sebanyak 19 Unit Sumur Bor</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULA INDIKATOR
			2024	2025	2025	2025	
2	Meningkatnya Pemenuhan Dasar Kebutuhan Masyarakat Terhadap Air Minum Layak	3. Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/ Kota	61,88 %	100 %	73,90 %	73,90 %	<p>atau $19 \times 4.032 \text{ m}^3 = 76.608 \text{ M}^3$.</p> <p>Dengan demikian Capaian kinerja Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan sampai dengan Tahun 2025 adalah Data kondisi Tahun 2022 (10.428.220 M3) + Realisasi Tahun 2023 (175.800 M3) + Realisasi Tahun 2024 (72.576 M3) + Realisasi Tahun 2025 (76.608 M3) = 10.763.204 M3 atau 91,08%</p> <p>Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas PUPR Prov.NTT 100% terhadap target 11.817,260 M3 maka sudah mencapai 10.763.204 M3 atau 91,08%, terdapat selisih 8,92 % yang masih harus mendapatkan penanganannya untuk mencapai 100 % terhadap target akhir Renstra Tahun 2024 - 2026.</p> <p>Formula Pengukuran indikator ini adalah Jumlah Volume Air dari Bangunan Penyedia Air Baku yang di bangun.</p> $\frac{\sum \text{Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyediaan air - semua tingkat kab/kota}}{\sum \text{Demand kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah tingkat kab/kota}}$ <p>Cakupan Layanan Air Minum Lintas Wilayah Kab/Kota adalah penyediaan air bersih bagi</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULA INDIKATOR
			2024	2025	2025	2025	
							<p>masyarakat di beberapa wilayah lintas yang dilakukan oleh Suatu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Berdasarkan data kondisi RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 menyatakan bahwa angka capaian penanganan Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/Kota sebesar 100 %. Tahun 2024 ukuran output kinerja indikator Presentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota baru bisa memenuhi capaian 77,69 %.</p> <p>Pada tahun 2025 untuk mengukur indikator kinerja Capaian Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota dengan ukuran target 100 % dapat terwujud pelaksanaannya di Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota telah melaksanakan kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dalam Kota Kupang dan Kab. Kupang.</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULA INDIKATOR
				2025	2025	2025	
							<p>Kapasitas produksi terpasang adalah 150 liter/detik, sedangkan kapasitas produksi termamfaatkan saat ini adalah 75 liter/detik untuk kapasitas 1 mesin pompa yang berproduksi atau setara dengan ±7.500 sambungan rumah yang dapat di suplai kepada masyarakat atau pelanggan.</p> <p>Pada Tahun 2025 untuk mengukur waktu kerja UPTD SPAM yang dioeraskan selama 10 jam / Hari maka dari waktu kerja yang di operasikan seharusnya mampu melayani sebanyak 3.129 sambungan rumah akan tetapi realisasinya sebanyak 2.312 sambungan rumah. Sehingga capaian pada Tahun 2025 sebesar 73,90 % dari waktu kerja operasional pada Tahun 2025.</p> <p><i>Formula Pengukuran indikator ini adalah Jumlah KK yang terlayani air minum lintas Kab/Kota setiap tahun dibagi Target KK yang terlayani air minum lintas kab/ Kota setiap tahun X 100 %.</i></p>
3	Meningkatnya kualitas Jalan Kewenangan Provinsi	4. Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	67,99 %	86,86 %	1,49 %	69,48 %	<p><i>Tingkat kemantapan jalan = $\left(\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang total jalan}}\right) \times 100\%$</i></p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULA INDIKATOR
				2025	2025	2025	
							<p>Persentase Jalan Mantap adalah angka/ukuran yang menunjukkan perbandingan antara panjang jalan mantap provinsi dengan panjang jalan provinsi secara keseluruhan dalam satuan persen. Jalan mantap adalah jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Panjang jalan provinsi dengan kondisi mantap, yaitu gabungan antara panjang jalan provinsi dengan kondisi baik dan panjang jalan provinsi dengan kondisi sedang. Ukuran Indikator ini terlaksana dalam Program Penyelenggaraan Jalan dengan penanganan ruas jalan kewenangan provinsi adalah sbb:</p> <p>Kondisi mantap Jalan Provinsi sampai dengan Tahun 2024 adalah 1.827,07 KM atau telah mencapai 67,99 %. Untuk mendapat Data kondisi jalan mantap maka perlu dilakukan survey kondisi jalan di sepanjang ruas jalan kewenangan provinsi. Sehingga data kondisi jalan mantap dan intervensi yang di kerjakan sampai dengan tahun 2024 maka diperoleh data kondisi jalan mantap sepanjang 1.827,07 KM atau 67,99 %.</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULA INDIKATOR
				2025	2025	2025	
							<p>Untuk mengukur Indikator Persentase Kemantapan Jalan Provinsi di tahun 2025 ditetapkan target sebesar 86,86% atau 2.334,20 KM dan realisasinya sepanjang 46,92 KM yang terdiri dari jenis pekerjaan Rekonstruksi dan Rehabilitasi. Selain Rekonstruksi dan Rehabilitasi yang dilakukan ada juga penanganan dengan pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi baik jalan sepanjang 58,35 KM.</p> <p>Gambaran kondisi mantap jalan selain berdasarkan realisasi penanganan yang sudah dilakukan tetapi juga berdasarkan data riil kondisi jalan oleh karena setiap tahun dapat terjadi pengurangan kondisi (degradasi) akibat pemanfaatan jalan.</p> <p>Untuk mendukung capaian target tersebut maka Pemerintah sudah berupaya untuk melakukan penanganan terhadap ruas jalan yang masih belum mantap sepanjang 860,24 KM akan tetapi dengan ketersediaan anggaran pada Tahun 2025 maka melalui Program Penyelenggaraan Jalan hanya melakukan penanganan dengan dukungan anggaran Dana Rp. 96,5 M. Apabila</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULA INDIKATOR
				2025	2025	2025	
							<p>dibandingkan terhadap target panjang jalan yang belum Mantap sepanjang di Tahun 2024 adalah 860,24 KM setelah dilakukan penanganan sehingga kondisi tidak mantap mengalami penurunan menjadi sepanjang 822,46 KM atau 7,075 %. Dengan demikian kondisi jalan mantap sampai dengan Tahun 2025 adalah 69,48 % atau sepanjang 1.867,21 KM.</p> <p>Sebagai informasi untuk mendapat data kondisi jalan mantap telah dilakukan kegiatan survey kondisi jalan mantap yang mana untuk penetapan data kondisinya masih melakukan koordinasi penilaian pengukuran kondisi dengan Satker Balai Jalan Nasional Wilayah II Provinsi NTT, sehingga data yang di tampikan adalah data perhitungan sementara dengan mengukur capaian kondisi jalan mantap di tahun 2024 di tambah dengan penanganan yang dilakukan di Tahun 2025.</p> <p><i>Formula Pengukuran indikator ini adalah Jumlah Jalan Mantap yang dikerjakan setiap tahun (dibagi) Total Panjang jalan Provinsi yang harus dimantapkan di kali 100%.</i></p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULA INDIKATOR
			2024	2025	2025	2025	
4	Meningkatnya Tata Ruang Kualitas	5. Cakupan Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	100 %	86,96 %	15 %	60.87 %	$\frac{\text{Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR}}{\text{Jumlah Total Provinsi dan Kabupaten Kota}} \times 100\%$ <p>Menjawab Realisasi pencapaian Sasaran 6 : Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang, dengan Indikator Peningkatan Presentase Wilayah Provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki Perda RTRW/RUTR dan RDTR.</p> <p>Sampai dengan Tahun 2024 sudah terdapat sebanyak 9 Dokumen Perda antara lain 1 Dokumen Perda Provinsi , 8 Dokumen Perda Kab/Kota dan 14 Perda RTRW Kabupaten/Kota yang masih dalam proses revisi atau sudah mencapai 100%.</p> <p>Di tahun 2025 target yang di tentukan sebesar 86,96 % atau 20 dokumen Perda RTRW atau RDTR, untuk menjawab capaian indikator ini perlu di sampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota di provinsi NTT saat ini sebanyak 22 Perda; Sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULA INDIKATOR
			2024	2025	2025	2025	
							<p>Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota setiap lima tahun sekali. Hasil Peninjauan Kembali berupa rekomendasi melakukan Revisi Perda Sebagian atau Revisi dengan Pencabutan Perda sebelumnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> Saat ini semua Kabupaten/Kota di Provinsi NTT telah melakukan Proses Peninjauan Kembali Peraturan Daerah (Perda) RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota dan rekomendasinya adalah Revisi dengan Pencabutan Perda sebelumnya; Perda RTRW Provinsi telah di Perdakan dengan Nomor Perda NTT Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Taa Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043; Dari 22 Kabupaten/Kota yang melakukan Revisi Perda RTRW dan RTRW Kabupaten/Kota sejak tahun 2018 - 2023, sebanyak 13 Kabupaten telah sampai pada Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, sedangkan RDTR yang telah diPerdakan sebanyak 14 RDTR yang berada di 10 Kabupaten antara lain : Kab. Manggarai Barat, Nagekeo, Ende, Alor, Malaka, TTS, Kab. Kupang, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Sumba Timur. <p>Sampai dengan tahun 2025 sebanyak 14</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULA INDIKATOR
			2024	2025	2025	2025	
5	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	6. Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	4,55 %	18,18 %	50 %	60 %	<p><i>Jumlah permukiman yang telah memiliki PSU sesuai standar</i> \times 100% <i>Jumlah total permukiman dalam wilayah kewenangan provinsi</i></p> <p>Total keseluruhan Lingkungan yang didukung PSU sebanyak 22 Lokasi. Yang telah mendapat intervensi dan didukung dengan PSU sampai tahun 2022 sebanyak 1 Lingkungan/Lokasi. Berdasarkan ukuran kinerja selama kurang lebih 3 Tahun sejak Tahun 2024 - 2026 target intervensi penanganannya adalah 5 Lingkungan permukiman berdasarkan target RPD Tahun 2024-2026.</p> <p>Indikator Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada tahun 2025 ditetapkan dengan target akhir RPD sebesar 18,18% (1 lingkungan) terhadap kewenangan target 5 Lingkungan. Untuk memenuhi Kinerja indikator Presentase Lingkungan yang didukung Prasarana , Sarana dan Utilitas (PSU) telah dilakukan intervensi penanganan pada 2 lingkungan antara yaitu melalui kegiatan pendukung Pembangunan WC/Sanitasi di Desa Noen Bila Kab. TTS sebanyak 25 buah untuk di manfaatkan oleh 25 rumah tangga miskin dan Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang, dengan Realisasi 2 lingkungan atau 100 % terhadap intervensi untuk 5 Lingkungan. Angka ini mencerminkan fokus</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULA INDIKATOR
				2025	2025	2025	
							<p>pelaksanaan kegiatan pada lingkungan dengan tingkat kebutuhan dan urgensi tinggi, sehingga dukungan PSU yang diberikan tetap memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan dasar masyarakat. Pendekatan berbasis prioritas ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara lebih optimal dalam keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan.</p> <p>Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat memenuhi target secara penuh terhadap kewenangan di 22 Lingkungan/Lokasi dipengaruhi oleh dukungan alokasi anggaran dan luasnya sebaran lingkungan yang membutuhkan dukungan PSU, serta tantangan teknis pelaksanaan di lapangan. Namun demikian, langkah yang sudah dilakukan dalam pengendalian dan penyesuaian pelaksanaan telah dilakukan untuk memastikan kegiatan tetap berjalan sesuai ketentuan dan memberikan dampak yang terukur.</p> <p>Sebagai tindak lanjut, peningkatan kinerja pada periode berikutnya akan diarahkan pada penajaman perencanaan berbasis kebutuhan lingkungan, penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta peningkatan dukungan pendanaan dan sinergi lintas sektor. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan persentase lingkungan yang didukung PSU secara bertahap dan berkelanjutan.</p>

Dalam mengukur capaian kinerja sesuai Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2025 dapat kami sampaikan bahwa tidak semua indikator kinerja dapat terlaksana oleh karena minimnya ketersediaan anggaran sehingga harus mengalami 3 (tiga) kali penggeseran dan 1 (satu) kali perubahan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan lebih difokuskan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas pendukung pembangunan infrastruktur. Analisa capaian indikator kinerja dapat dijelaskan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun anggaran 2025.

2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun sebelumnya



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Benyamin Nahak, MT
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Andriko Noto Susanto**
Jabatan : **Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur**
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 01 November 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Andriko Noto Susanto

Ir. Benyamin Nahak, MT

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Analisis Monitoring, Pelaporan & Evaluasi	

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan	1. Jumlah ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan	10.613.220 m ³	125,720 m ³	Σ Jumlah Volume air dari bangunan penyedia air baku yang dibangun
2.	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur SDA dan Irigasi	2. Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku	25 %	20 %	Σ Jumlah Bangunan Penyedia Air Baku yang dipelihara ----- x 100 Σ Jumlah Total Bangunan Air Baku yang ditargetkan Pemeliharaannya
3.	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kebutuhan Air Irigasi Dan Meningkatnya Produksi Panen	3. Luas Areal Irigasi Fungsional	35,246,21 Ha	1,000 Ha	Σ Luas Areal Irigasi fungsional
		4. Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi	25 %	23.58 %	Σ Panjang Jaringan Irigasi yang dipelihara -----x 100 Σ Panjang jaringan target pemeliharaan
4.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terhadap Air Minum Layak	5. Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	Σ Jumlah KK yang terlayani air minum lintas Kab/ Kota setiap tahun ----- x 100 Σ Target KK yang terlayani air minum lintas kab/ Kota setiap tahun

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
5.	Meningkatnya kualitas Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	6. Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	73,25 %	86,86 %	$\frac{\Sigma \text{ Jumlah Jalan Mantap yang dikerjakan setiap tahun}}{\Sigma \text{ Total Panjang jalan Provinsi yang harus dimantapkan}} \times 100$
6.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Kontruksi	7. Ratio Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli	65,28 %	63,84 %	$\frac{\Sigma \text{ Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli}}{\Sigma \text{ Jumlah Kebutuhan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah Provinsi}} \times 100$
7.	Menurunnya Tingkat kekumuhan Kawasan Kewenangan Provinsi	8. Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	100 %	95 %	$\Sigma \text{ Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi}$ <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanitasi 2. Persampahan 3. Drainase 4. Jalan Lingkungan 5. Bangunan Gedung (Rumah Layak Huni) (Ada Penilaian Lagi Ad Bangunan Gedung) <p>Penangan kekumuhan harus di lakukan untuk smua indicator kekumuhan, namun pada tahun 2024 penangan Cuma 2 indikator yaitu penangan bagunana Gedung bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan memberikan bantuan material dan penaganan sanitasi layak, kepadatan bangunan tidak bisa di jalankan karena itu relokasi. Penanganan rumah dan sanitasi.</p> <p>Berdasarkan kewenagan Dinas PUPR prov menangani Kawasan kumuh dengan luasan 10- di bawah 15 ha.</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
					Untuk tahun 2024 kita menangani 1 lokasi di kabupaten sumba timur. Dari 7 indikator kekumuhan baru di tangani 2 indikator pada penanganan saat ini.
8.	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	9. Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	100 %	43,48 %	$\frac{\Sigma \text{ Jumlah Dokumen Revisi Perda RUTR wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota}}{\Sigma \text{ Target 23 Dokumen}} \times 100$

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Target
1.	APBD		
	a) Belanja (Program)	Rp. 184.280.898.624,-	Realisasi minimal 85%
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 34.436.221.922,-	Realisasi minimal 90%
	2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 24.013.778.212,-	Realisasi minimal 85%
	3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 1.984.943.688,-	Realisasi minimal 85%
	4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 489.881.500,-	Realisasi minimal 85%
	5. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 111.266.536.302,-	Realisasi minimal 85%
	1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 98.800.000,-	Realisasi minimal 85%
	2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 404.187.500,-	Realisasi minimal 85%
	3. Program Pengembangan Perumahan	Rp. 2.584.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	4. Program Kawasan Permukiman	Rp. 1.350.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 125.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 2.000.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 5.527.549.500,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp. 5.700.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	Rp. - 189.980.898.624,-	Realisasi minimal 90%-
2.	APBN		

a) Program Tugas Pembantuan	Rp.	Realisasi minimal 85%
1. Program Infrastruktur Konektivitas	Rp. 5.587.366.000,-	Realisasi minimal 85%
2. Program Ketahanan Sumber Daya Air	Rp. 22.158.693.000,-	Realisasi minimal 85%
Tugas Pembantuan	Rp. 27.746.059.000,-	Realisasi minimal 85%

- C.** Belanja menggunakan Aplikasi *E-Purchasing* (e-catalog dan toko daring) minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;
- D.** Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2024;
- E.** Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 26 Januari 2024, sedangkan LKPI, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2024;
- F.** Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2024;
- G.** Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);
- H.** Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK ;
- I.** Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:
3. TL rekomendasi Tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
 4. TL rekomendasi dibawah Tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%.
- J.** Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;
- K.** Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;
- L.** Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- M.** Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);
- N.** Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Kupang, 01 November 2024

Plt. Kepala Dinas PUPR
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,

Ir. Benyamin Nahak, MT

Andriko Noto Susanto

PARAF HIERARKI
Sekretaris Daerah
Plt. Asisten Administrasi Umum
Plt. Kepala Biro Organisasi

PARAF HIERARKI
Sekretaris
Analisis Monitoring, Pelaporan & Evaluasi

2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Kerangka Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan capaian kinerja. Adapun skala pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

Tabel
Pengukuran Skala Ordinal

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$85 \% \leq X$	Sangat Berhasil	Hijau Tua
2.	$70 \% \leq X < 85 \%$	Berhasil	Hijau Muda
3.	$55 \% \leq X < 70 \%$	Cukup Berhasil	Kuning Tua
4.	$X \leq 55 \%$	Belum Berhasil	Merah

2.3.4.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja pada dasarnya dapat digambarkan sebagai hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dapat dicapai oleh satu organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya yang antara lain dijabarkan dalam bentuk perjanjian kinerja organisasi.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap organisasi birokrasi atau perangkat daerah wajib untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan program / kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas. Sejalan dengan hal ini maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum ini disusun dan disajikan untuk memberikan gambaran ringkas tentang capaian Perjanjian Kinerja tahun 2025 sesuai program kegiatan yang

tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tahun Anggaran 2025. Sebagai instrumen verifikasi akan dilakukan analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja tahun 2025 sebagai pengukuran gambaran target kinerja dan realisasi kinerja berdasarkan Indikator Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas.

2.3.4.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Untuk mengukur capaian indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2025 masih mengikuti Target RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan penetapan target kinerja sesuai indikator kinerja dalam menjawab semua kebutuhan masyarakat bidang infrastruktur dan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas yang digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel
Sasaran Strategis dan Indikator Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	
				TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan	Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan	M3	625,720	76.608
2.	Meningkatnya pelayanan terhadap kebutuhan air irigasi dan meningkatkan produksi panen	Luas Areal Irigasi Fungsional	Ha	2000	56.95
3.	Meningkatnya Kualitas Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	Presentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	%	86,86	69.73

4.	Meningkatnya lingkungan yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana , Sarana dan Utilitas (PSU)	%	18,18 (1) Lokasi/Ling	100 (2) Lokasi/Ling
5.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum layak	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/ Kota	%	100	73,90
6,	Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang	Peningkatan Presentase wilayah provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	%	86,96	60,87

Selanjutnya akumulasi capaian indikator kinerja secara keseluruhan dapat dijelaskan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

2.3.4.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci

Secara umum untuk Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pembangunan infrastruktur telah menetapkan target kinerja penyelenggaraan Jangka Menengah yang sesuai indikator kinerja RPD Provinsi NTT dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam menjawab semua kebutuhan masyarakat bidang infrastruktur terhadap Indikator Kinerja Kunci yang digambarkan di tabel berikut :

Tabel
Indikator Capaian Kinerja Kunci Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	
				TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan	Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan	M3	625,720	76.608
2.	Meningkatnya pelayanan terhadap kebutuhan air irigasi dan meningkatkan produksi panen	Luas Areal Irigasi Fungsional	Ha	2000	56.95
3.	Meningkatnya Kualitas Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	Presentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	%	86,86	69.73
4.	Meningkatnya lingkungan yang di dukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana , Sarana dan Utilitas (PSU)	%	18,18 (1) Lokasi/Ling	100 (2) Lokasi/Ling
5.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum layak	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/ Kota	%	100	73,90
6.	Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang	Peningkatan Presentase wilayah provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	%	86,96	60,87

Selanjutnya akumulasi capaian indikator kinerja secara keseluruhan dapat dijelaskan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun anggaran 2025.

2.3.4.4 Analisa Capaian Indikator Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2025 , Rencana Startegis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dan Indikator Kinerja Kunci, setidaknya terdapat 6 sasaran strategis yang wujud pelaksanaannya dalam 6 indikator kinerja di Tahun 2025 yaitu :

SASARAN STRATEGIS 1

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja **“Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan”** yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut :

Tabel
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator	Satuan	Capaian s/d Tahun 2025	Tahun 2025			Target RENSTRA	Capaian s/d 2025 terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan	M3	10.686.596. M3	625.720 M3	76.608 M3 (12,25%)	10.763.204 M3 (91,08 %)	625.720 M3	10.763.204 M3 (11.817,260) 91,08 %

Realisasi pencapaian Sasaran 1 : “Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan” dengan ukuran indikator :

1) *Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan adalah sbb:*

Indikator **Jumlah Ketersediaan Air Baku dalam Menunjang Ketahanan Pangan** pada tahun 2025 ditetapkan dengan **target sebesar 625.720 m³**.

Data kondisi kinerja sesuai ukuran target kinerja RPD Tahun 2024 - 2026 terkait Jumlah ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan sesuai data kondisi baseline 2022 adalah 10.438.220 M3. Pada Tahun 2023 Jumlah ketersediaan Air Baku yang dapat menunjang ketahanan Pangan hanya dapat tercapai 175.800 M3 dan di Tahun 2024 hanya dapat mencapai 72.576 M3. Sehingga Jumlah ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan sampai dengan Tahun 2024 sudah mencapai *10.686.596 M3*.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, target yang ditentukan sebanyak 625,720 M3 dan realisasi ketersediaan air baku yang berhasil disediakan sebesar **76.608 m³**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai sekitar 10.763, 204 M3 atau **12,25%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja belum mencapai target yang direncanakan. Meskipun demikian, realisasi ketersediaan air baku yang telah dicapai tetap memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kebutuhan air untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan, khususnya pada wilayah prioritas. Capaian ini menjadi dasar penting untuk penguatan perencanaan dan penajaman sasaran kegiatan penyediaan air baku pada periode berikutnya.

Perhitungan Debit Sumur Bor :

- Asumsi Debit Sumur Bor = 4,2 m³ / jam
- Total jam operasi per hari = 8 jam; Total Debit per hari = 8 jam x 4,2 m³ = 33,6 m³ / hari
- Debit per bulan = 33,6 m³ x 30 hari = 1.008 m³ / bulan
- Debit setahun dihitung maksimal pada bulan basah (musim hujan) yaitu 4 bulan = 4 x 1.008 m³ = 4.032 m³ / tahun

Di Tahun 2025 terdapat penanganan pembangunan sumur bor sebanyak 14 Unit dengan sumber anggaran murni dan 5 Unit merupakan luncheon Tahun 2024 dan 3 Unit dengan sumber anggaran pada perubahan anggaran sehingga total target terbangun 22 Unit Sumur Bor atau 22 x 4.032 m³ = 88.704 M3. Akan tetapi terdapat 3 bangunan sumur bor tidak selesai dikerjakan dan sebagai paket luncheon tahun 2026, sehingga total keseluruhan bangunan air baku yang dapat mendukung ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan pada tahun 2025 adalah sebanyak 19 Unit Sumur Bor atau 19 x 4.032 m³ = 76.608 M3.

Dengan demikian Capaian kinerja Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan sampai dengan Tahun 2025 adalah Data kondisi Tahun 2022 (10.428.220 M3) + Realisasi

Tahun 2023 (175.800 M3) + Realisasi Tahun 2024 (72.576 M3) + Realisasi Tahun 2025 (76.608 M3) = 10.763.204 M3 atau 91,08%

Sehingga di akhir Renstra Dinas PUPR Prov.NTT perhitungan akhir Tahun 2026 sebesar 100% sebanyak 11.817,260 M3 maka sudah mencapai 91,08% (10.763.204 M3). Terdapat selisih 8,92 % yang masih harus mendapatkan penanganan untuk mencapai 100 %.

Formula Pengukuran indikator ini adalah Jumlah Volume Air dari Bangunan Penyedia Air Baku yang di bangun.

Kendala pencapaian realisasi adalah :

- Belum tercapainya target kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber air baku yang dapat dimanfaatkan secara optimal,
- kondisi hidrologis wilayah yang dipengaruhi oleh variabilitas curah hujan, serta kendala teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan optimalisasi infrastruktur penyediaan air baku.
- Selain itu, keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan juga berdampak pada belum optimalnya volume air baku yang dapat direalisasikan sesuai dengan rencana awal.

Sebagai solusi kondisi ini diharapkan :

- Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Air Yang Ada,
- Percepatan Penyelesaian Kegiatan Infrastruktur Air Baku,
- Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor, serta penyesuaian target yang lebih realistis berdasarkan kondisi eksisting dan daya dukung wilayah.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan capaian ketersediaan air baku secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka menunjang ketahanan pangan daerah.

Intervensi kegiatan untuk menjawab capaian indikator *Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan*, telah dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air, antara lain:

- 1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang (luncuran 2025)
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. TTU (luncuran 2025)
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi A di Kab. Alor (luncuran 2025)
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya (luncuran 2025)
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Barat (luncuran 2025)
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi A di Kab. Alor
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi B di Kab. Alor
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Kupang
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi A di Kab. Ende
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi B di Kab. Ende
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi A di Kab. Sumba Barat Daya
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi B di Kab. Sumba Barat Daya
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Flores Timur
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Malaka
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Belu
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Rote Ndao
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi B di Kab. Kupang
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Nagekeo (Luncuran 2026)
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur (Luncuran 2026)
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kota Kupang

(Luncuran 2026)

SASARAN STRATEGIS 2

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan terhadap Kebutuhan Air Irigasi dan Meningkatkan Produksi Panen , yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut :

Tabel
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator	Satuan	Capaian s/d Tahun 2024	Tahun 2025			Target RENSTRA	Capaian s/d 2025 terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Luas Areal Irigasi Fungsional	Ha	36.060,87 Ha 59,77 % Terhadap luas kewenangan provinsi 60.328 Ha	2.000 Ha	56,95 Ha (2,85 %)	36.117,82 Ha (59,87 %)	2.000 Ha	36.117,82 Ha (87,56 %) Terhadap 41.246,21 Ha

Realisasi pencapaian Sasaran 2 : “Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan” dengan ukuran indikator out put adalah Luas Areal Irigasi Fungsional.

Tahun 2024 Target Penanganan Luas Areal Irigasi Fungsional sebanyak 1000 Ha, dan Realisasi Penanganannya sebanyak 913,40 Ha pada 1 (satu) Daerah Irigasi (D.I.) di Kabupaten Ngada. Dengan demikian Capaian Luas Areal Irigasi Fungsional yang sudah mendapat penanganan sampai dengan Tahun 2024 adalah 36.060,87 Ha atau 59,77 % terhadap target Luas Kewenangan Provinsi 60.328 Ha atau 87, 43 % terhadap target akhir capaian Renstra Tahun 2024 – 2026 adalah 41.246,21 Ha.

Di Tahun 2025 Luas Areal Irigasi Fungsional target penanganan 2000 Ha dan Realisasi Penanganannya luas 56,95 Ha, sehingga capaian Luas Areal Irigasi Fungsional yang sudah

mendapat penanganan sampai dengan Tahun 2025 adalah 36.117,82 Ha atau 59,77 % terhadap target Luas Kewenangan Provinsi 60.328 Ha dan terhadap target akhir capaian Renstra Tahun 2024 - 2026 adalah 41.246,21 Ha atau 87, 43 % . Capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja belum tercapai secara signifikan dibandingkan dengan target yang direncanakan.

Rendahnya capaian kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan fisik irigasi, serta kondisi jaringan irigasi eksisting yang memerlukan penanganan teknis lebih kompleks dari perencanaan awal. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi cuaca, ketersediaan material, serta proses koordinasi lintas kewenangan turut mempengaruhi percepatan pencapaian target luas areal irigasi fungsional.

Sebagai tindak lanjut, upaya perbaikan kinerja akan difokuskan pada penajaman perencanaan teknis, penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas kewenangan, serta penyesuaian target yang lebih realistis dengan mempertimbangkan kapasitas anggaran dan kondisi lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan luas areal irigasi fungsional secara bertahap dan berkelanjutan.

Formula Pengukuran indikator ini adalah Luas areal irigasi fungsional yang mendapat penanganan di Tahun n

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- 1) Keterbatasan anggaran.
- 2) Kondisi jaringan irigasi eksisting yang memerlukan penanganan teknis lebih kompleks dari perencanaan awal
- 3) Faktor eksternal seperti kondisi cuaca, ketersediaan material, serta proses koordinasi lintas kewenangan turut mempengaruhi percepatan pencapaian target luas areal irigasi fungsional.
- 4) Adanya eksploitasi air untuk kebutuhan diluar lahan pertanian.
- 5) Minimnya Biaya Pemeliharaan Daerah Irigasi.

Solusi yang dilakukan :

- 1) Dukungan anggaran yang memadai baik dapat memberi dampak terhadap pemanfaatan Daerah Irigasi.
- 2) Pengawasan dalam Pengelolaan aliran air serta drainase yang efisien, sehingga tingkat kerusakan pada saluran irigasi dapat diminimalisir.

3) Perlu adanya penertiban dan pengawasan terhadap sistem-sistem irigasi sehingga dapat terpenuhi ketersediaan air dalam aliri lahan pertanian.

Intervensi kegiatan untuk menjawab capaian indikator Cakupan Luar Areal Fungsional telah dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air, antara lain:

1) Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya 1000 Ha – 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan :

- ✓ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luwurweton (1.000 Ha) di Kab. Ngada (Paket Luncuran DAU-SG TA 2024)

SASARAN STRATEGIS 3

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 3 : “Meningkatnya Kualitas Jalan Kewenangan Provinsi”, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut :

Tabel
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target RENSTRA	Capaian s/d 2025 terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	%	67,98 % 1.827,07 (terhadap 2.687,31 KM Jln. Prov)	86,86 % 2.334,20 KM	69,73 % 1.873,861 KM	69,73 % 1.873,861 KM	86,86 % 2.334,20 KM	80,28 % 1.873,89 KM (2.334,20) KM

Realisasi pencapaian Sasaran 3 : “Meningkatnya Kualitas Jalan Kewenangan Provinsi” dengan ukuran indikator *Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi* adalah sbb:

Persentase Jalan Mantap adalah angka/ukuran yang menunjukkan perbandingan antara panjang jalan mantap provinsi dengan panjang jalan provinsi secara keseluruhan dalam satuan

persen. Jalan mantap adalah jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Panjang jalan provinsi dengan kondisi mantap, yaitu gabungan antara panjang jalan provinsi dengan kondisi baik dan panjang jalan provinsi dengan kondisi sedang. Ukuran Indikator ini terlaksana dalam Program Penyelenggaraan Jalan dengan penanganan ruas jalan kewenangan provinsi adalah sbb:

Kondisi mantap Jalan Provinsi sampai dengan Tahun 2024 adalah 1.827,07 KM atau telah mencapai 67,98 %. Untuk mendapat Data kondisi jalan mantap maka perlu dilakukan survey kondisi jalan di sepanjang ruas jalan kewenangan provinsi. Sehingga data kondisi jalan mantap dan intervensi yang di kerjakan sampai dengan tahun 2024 maka diperoleh data kondisi jalan mantap sepanjang 1.827,07 KM atau 67,98 %.

Untuk mengukur Indikator Persentase Kemantapan Jalan Provinsi di tahun 2025 ditetapkan target sebesar 86,86% atau 2.334,20 KM dan realisasinya sepanjang 46,92 KM yang terdiri dari jenis pekerjaan Rekonstruksi dan Rehabilitasi. Selain Rekonstruksi dan Rehabilitasi yang dilakukan ada juga penanganan dengan pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi baik jalan sepanjang 58,35 KM.

Gambaran kondisi mantap jalan selain berdasarkan realisasi penanganan yang sudah dilakukan tetapi juga berdasarkan data riil kondisi jalan oleh karena setiap tahun dapat terjadi pengurangan kondisi (degradasi) akibat pemanfaatan jalan.

Untuk mendukung capaian target tersebut maka Pemerintah sudah berupaya untuk melakukan penanganan terhadap ruas jalan yang masih belum mantap sepanjang 860,24 KM akan tetapi dengan ketersediaan anggaran pada Tahun 2025 maka melalui Program Penyelenggaraan Jalan hanya melakukan penanganan dengan dukungan anggaran Dana Rp. 96,5 M. Apabila dibandingkan terhadap target panjang Jalan yang belum Mantap sepanjang di Tahun 2024 adalah 860,24 KM setelah dilakukan penanganan sehingga kondisi tidak mantap mengalami penurunan menjadi sepanjang 822,46 KM atau 7,075 %. Dengan demikian kondisi jalan mantap sampai dengan Tahun 2025 adalah 69,73 % atau sepanjang 1.873,861 KM.

Sebagai informasi untuk mendapat data kondisi jalan mantap telah dilakukan kegiatan survey kondisi jalan mantap yang mana untuk penetapan data kondisinya masih melakukan koordinasi penilaian pengukuran kondisi dengan Satker Balai Jalan Nasional Wilayah II Provinsi NTT, sehingga data yang di tampilkan adalah data perhitungan sementara dengan mengukur capaian kondisi jalan mantap di tahun 2024 di tambah dengan penanganan yang dilakukan di Tahun 2025.

Formula Pengukuran indikator ini adalah Jumlah Jalan Mantap yang dikerjakan setiap tahun (dibagi) Total Panjang jalan Provinsi yang harus dimantapkan di kali 100%.

Adapun beberapa kendala yang menyebabkan belum tercapainya target 100% mantap jalan antara lain disebabkan karena :

- 1) Ada Paket – paket fisik yang pelaksanaan pekerjaannya mengalami keterlambatan sehingga menjadi paket luncuran di tahun 2026
- 2) Adanya paket pekerjaan yang baru dianggarkan pada periode anggaran perubahan sehingga pelaksanaan lelang paket pekerjaan mengalami keterlambatan untuk proses pelaksanaannya
- 3) Kondisi cuaca yang kurang menentu sehingga mempengaruhi progres pekerjaan di lapangan.
- 4) Terdapat ruas -ruas jalan provinsi pada umumnya berada pada daerah – daerah yang tingkat curah hujannya tinggi sehingga pelaksanaan tender harus di mulai pada awal tahun (Bulan Januari)

Solusi yang di lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada antara lain :

- 1) Apabila adanya paket -paket yang penganggarannya dilakukan pada periode perubahan Anggaran DPPA dapat diusulkan dalam pelaksanaan fisik sebaiknya menggunakan multi yeard sehingga tidak terjadi PHK atau luncuran.
- 2) Kedepan Pelaksanaan Tender dimulai lebih awal sehingga tidak berpenagruh terhadap pekerjaan fisik di lapangan dan tidak memasuki musim penghujan.

Intervensi kegiatan yang dilakukan tahun 2025 untuk menjawab capaian indikator Presentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi, melalui Program Penyelenggaraan Jalan antara lain :

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
 - i) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan (Rekonstruksi Jalan) :
 1. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Baa – Batutua
 2. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Batu Putih – Panite
 3. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Balauring – Wairiang
 4. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Bealaing – Wae Rasan (Bts. Kab. Ngada)
 5. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Betun – Motamasin (Bts Negara)
 6. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Hepang – Sikka
 7. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Jl. Yos Sudarso
 8. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kalabahi – Kokar
 9. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kelinting (Bts. Kab. Belu – Wini Sakato (Bts

Negara)

10. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Malahar – Praipaha
11. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oelamasi – Sp. Sulamu
12. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Panite – Kolbano
13. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Seba – Ege
14. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Cumbi - Iteng
15. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Nggorong – Sp. Terang
16. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patiala – Wetana (Bts. Kab. Sumba Barat Daya)
17. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patung Sonbai – Bello (Bts. Kab. Kupang)
18. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Polda – Sp. Patung Merpati
19. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Welaus – Kusa (Bts. Kab. Belu)
20. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Watatuku (Sp. Mola) – Mataraben
21. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wologai – Detukeli
22. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Aeramo – Kaburea (Bts. Kab. Ende)
23. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Dalam Kota Kupang,Cs
24. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Labuan Kelambu (Bts. Kab. Manggarai Timur) – Riung
25. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wanibesak – Betun

ii) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan :

1. Rekonstruksi Ruas Jalan Bondokondi - Waitabula
2. Rekonstruksi Ruas Jalan Poma – Bajawa
3. Rekonstruksi Ruas Jalan Sp. Niki-Niki - Oinlasi
4. Rekonstruksi Ruas Jalan Waepare – Bola
5. Rekonstruksi Ruas Jalan Watowiti – Waiklibang

SASARAN STRATEGIS 4

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya lingkungan yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) , yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana Tabel berikut;

Tabel
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Indikator	Satuan	Capaian s/d Tahun 2024	Tahun 2025			Target RENSTRA	Capaian s/d 2025 terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana , Sarana dan Utilitas (PSU)	%	1 Lokasi	18,18% (1) Lokasi	100 % (2) Lokasi	100 % (2) Lokasi	18,18 % (4) Lokasi	25 % (2) Lokasi

Total keseluruhan Lingkungan yang didukung PSU sebanyak 22 Lokasi. Yang telah mendapat intervensi dan didukung dengan PSU sampai tahun 2022 sebanyak 1 Lingkungan/Lokasi. Berdasarkan ukuran kinerja selama kurang lebih 3 Tahun sejak Tahun 2024 – 2026 target intervensi penanganannya adalah 5 Lingkungan permukiman berdasarkan target RPD Tahun 2024-2026.

Indikator Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 18,18% (1 lingkungan) terhadap kewenangan target 5 Lingkungan.

Untuk memenuhi Kinerja indikator Presentase Lingkungan yang didukung Prasarana , Sarana dan Utilitas (PSU) telah dilakukan intervensi penanganan pada 2 lingkungan antara yaitu melalui kegiatan pendukung Pembangunan WC/Sanitasi di Desa Noen Bila Kab. TTS sebanyak 25 buah untuk di manfaatkan oleh 25 rumah tangga miskin dan Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang, dengan Realisasi 2 lingkungan atau 100 % terhadap intervensi untuk 5 Lingkungan. Angka ini mencerminkan fokus pelaksanaan kegiatan pada lingkungan dengan tingkat kebutuhan dan urgensi tinggi, sehingga dukungan PSU yang diberikan tetap memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan dasar masyarakat. Pendekatan berbasis prioritas ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara lebih optimal dalam keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat memenuhi target secara penuh terhadap kewenangan di 22 Lingkungan/Lokasi dipengaruhi oleh dukungan alokasi anggaran dan luasnya sebaran lingkungan yang membutuhkan dukungan PSU, serta tantangan teknis pelaksanaan di lapangan. Namun demikian, langkah yang sudah dilakukan dalam pengendalian dan penyesuaian pelaksanaan telah dilakukan untuk memastikan kegiatan tetap berjalan sesuai ketentuan dan memberikan dampak yang terukur.

Sebagai tindak lanjut, peningkatan kinerja pada periode berikutnya akan diarahkan pada penajaman perencanaan berbasis kebutuhan lingkungan, penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta peningkatan dukungan pendanaan dan sinergi lintas sektor. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan persentase lingkungan yang didukung PSU secara bertahap dan berkelanjutan.

Masalah atau kendala yang di hadapi :

1. Keterbatasan Anggaran sehingga berpengaruh terhadap luasnya sebaran lingkungan yang membutuhkan dukungan PSU.
2. Tantangan teknis dilapangan apabila intervensi kegiatan kurang mendapat dukungan dari masyarakat setempat
3. Kondisi iklim yang tidak menentu sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan dan waktu pelaksanaan

Solusi yang akan dilakukan :

1. Dukungan anggaran dan koordinator instansi terkait perlu lebih di lakukan secara intensif
2. Dukungan dari pemerintah setempat dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait sasaran dan manfaat dari kegiatan yang akan dilakukan
3. Langkah pengendalian dan penyesuaian pelaksanaan telah dilakukan untuk memastikan kegiatan tetap berjalan sesuai ketentuan dan memberikan dampak yang terukur.

Intervensi kegiatan yang dilakukan tahun 2025 untuk menjawab capaian indikator Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana , Sarana dan Utilitas (PSU antara lain :

- 1) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
 - a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman :
 1. Pembangunan WC/Sanitasi di Kab. TTS (PRKP);
 2. Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas

Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang;

SASARAN STRATEGIS 5

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum layak, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana Tabel berikut;

Tabel
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target RENSTRA	Capaian s/d 2025 terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian		
1	% Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/ Kota	%	77,69 %	100 %	2.312 kk	73,90 %	100 %	73,90 %

Cakupan Layanan Air Minum Lintas Wilayah Kab/Kota adalah penyediaan air bersih bagi masyarakat di beberapa wilayah lintas yang dilakukan oleh Suatu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Berdasarkan data kondisi RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 menyatakan bahwa angka capaian penanganan Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/Kota sebesar 100 %. Tahun 2024 ukuran output kinerja indikator Presentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota baru bisa memenuhi capaian 77,69 %.

Pada tahun 2025 untuk mengukur indikator kinerja Capaian Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota dengan ukuran target 100 % dapat terwujud pelaksanaannya di Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota telah melaksanakan kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dalam Kota Kupang dan Kab. Kupang.

Kapasitas produksi terpasang adalah 150 liter/detik, sedangkan kapasitas produksi termanfaatkan saat ini adalah 75 liter/detik untuk kapasitas 1 mesin pompa yang berproduksi

atau setara dengan ± 7.500 sambungan rumah yang dapat di suplai kepada masyarakat atau pelanggan.

Pada Tahun 2025 untuk mengukur waktu kerja UPTD SPAM yang dioerasikan selama 10 Jam / Hari maka dari waktu kerja yang di operasikan seharusnya mampu melayani sebanyak 3.129 sambungan rumah akan tetapi realisasinya sebanyak 2.312 sambungan rumah. Sehingga capaian pada Tahun 2025 sebesar 73,90 % dari waktu kerja operasional pada Tahun 2025.

Formula Pengukuran indikator ini adalah Jumlah KK yang terlayani air minum lintas Kab/Kota setiap tahun dibagi Target KK yang terlayani air minum lintas kab/ Kota setiap tahun X 100 %.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Belum adanya kerja sama antara Pemerintah Kota (PDAM Kota Kupang), Pemerintah Kab.Kupang (PDAM Kab. Kupang) dengan Pemerintah Provinsi (UPTD SPAM);
2. Belum adanya Reservoir Induk sebagai penyeimbang sehingga pelayanan yang dilakukan sampai dengan saat ini adalah dengan sistem tembak langsung.

Solusi yang diharapkan adalah :

1. Perlu adanya peran Pemerintah Provinsi dalam penyelesaian permasalahan pelayanan air minum di Kabupaten Kupang dan khususnya Kota Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi agar pemerintah provinsi dapat memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kota Kupang, Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Provinsi terkait kondisi ini;
2. Perlu adanya Reservoir Induk sebagai penyeimbang agar pelayanan air minum curah dapat dilakukan secara gravitasi selama 1 x 24 jam/hari;

Intervensi kegiatan untuk menjawab capaian indikator Presentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), antara lain:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota:
 - a) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kab/Kota :
 - Pengembangan Jaringan Distribusi Utama di Kota Kupang

SASARAN STRATEGIS 6

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 6 : Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang, digambarkan dalam Tabel berikut;

Tabel

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2024			Target RENSTRA	Capaian 2025 terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Peningkatan Presentase wilayah provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	%	100 % 23 (Perda 9 + 14 Revisi Dokumen Perda)	86,96 %	60,87 %	60,87 %	86,96 %	100 % 23 (Perda 9 + 14 Revisi Dokumen Perda)

Menjawab Realisasi pencapaian Sasaran 6 : Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang, dengan Indikator Peningkatan Presentase Wilayah Provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki Perda RTRW/RUTR dan RDTR.

Sampai dengan Tahun 2024 sudah terdapat sebanyak 9 Dokumen Perda antara lain 1 Dokumen Perda Provinsi , 8 Dokumen Perda Kab/Kota dan 14 Perda RTRW Kabupaten/Kota yang masih dalam proses revisi atau sudah mencapai 100%.

Di tahun 2025 target yang di tentukan sebesar 86,96 % atau 20 dokumen Perda RTRW atau RDTR. untuk menjawab capaian indikator ini perlu di sampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut :

- Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota di provinsi NTT saat ini sebanyak 22 Perda;
- Sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota setiap lima tahun sekali. Hasil Peninjauan Kembali berupa rekomendasi melakukan Revisi Perda Sebagian atau Revisi dengan Pencabutan Perda sebelumnya.

- Saat ini semua Kabupaten/Kota di Provinsi NTT telah melakukan Proses Peninjauan Kembali Peraturan Daerah (Perda) RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota dan rekomendasinya adalah Revisi dengan Pencabutan Perda sebelumnya.
- Perda RTRW Provinsi telah di Perdakan dengan Nomor Perda NTT Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043.
- Dari 22 Kabupaten/Kota yang melakukan Revisi Perda RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota sejak tahun 2018 - 2023, sebanyak 13 Kabupaten telah sampai pada Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, sedangkan RDTR yang telah diPerdakan sebanyak 14 RDTR yang berada di 10 Kabupaten antara lain : Kab. Manggarai Barat, Nagekeo, Ende, Alor, Malaka, TTS, Kab. Kupang, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Sumba Timur.
- Sampai dengan tahun 2025 sebanyak 14 Kabupaten/Kota telah selesai menyusun Perda RTRW atau baru mencapai 60,87 % sedangkan 9 Kabupaten/Kota masih dalam proses Revisi.

Masalah yang di hadapi antara lain :

- 1) Masih terdapat beberapa catatan penting terkait penyesuaian terhadap dokumen-dokumen (revisi dokumen)
- 2) Adanya kebijakan Sektoral yang juga terus berubah sesuai kepentingan masing-masing sektor sehingga berpengaruh terhadap penetapan kebijakan penataan ruang.
- 3) Belum maksimal percepatan proses Revisi RTRW dalam hal ini terkait Koordinasi lintas sektoral yang belum maksimal dalam proses Penyusunan RTRW (khusus Kab/Kota) dalam hal ini dengan Forum Penataan Ruang Provinsi.

Solusi yang dilakukan adalah :

- 1) Perlu adanya klinik penyusunan RTRW dengan Kementerian ATR/BPN;
- 2) Perlu adanya pembahasan Pra Lintas Sektoral dengan seluruh Stakholder terkait;
- 3) Dukungan anggaran dalam upaya percepatan penetapan Perda RTRW Kab/Kota.

2.3.4.5 REALISASI ANGGARAN

Pembiayaan pembangunan infrastruktur di Tahun 2025 melalui program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT adalah sebesar Rp. 193.377.808.591,- Pagu anggaran ini termuat DPA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2025.

Berdasarkan program dan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2025 maka Realisasi seluruh pembiayaan pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Untuk Belanja pada Tahun Anggaran 2025 ini dianggarkan sebesar Rp. 193.368.808.591,- terdiri dari :

I. Pagu Anggaran

Belanja Operasi sebesar : Rp. 85.356.028.827,-

Belanja Modal sebesar : Rp. 108.021.779.764,-

II. Realisasi Anggaran

Belanja Operasi sebesar : Rp. 63.576.231.894,-

Belanja Modal sebesar : Rp. 100.648.457.353,-

III. Sisa Anggaran

Belanja Operasi sebesar : Rp. 21.779.796.933,-

Belanja Modal sebesar : Rp. 7.364.322.411,-

Dari seluruh pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 terdapat sisa Anggaran oleh karena masih terdapat sisa kegiatan yang menjadi kegiatan luncturan di Tahun 2026.

Uraian realisasi Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT diwujudkan dalam bentuk Program/Kegiatan sbb:

TABEL
 REALISASI BELANJA MODAL
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI
 NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	PRESENTASE (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.885.514.974	2.966.098.869	99,28
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	820.756.983	773.604.299	45,03
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.004.236.317	1.918.847.200	95,73
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	101.184.140.570	94.871.459.040	93,76
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	37.753.000	37.684.500	99,81
6.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	50.614.480	50.505.000	99,78
7.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	29.863.440	29.858.445	99,98%
TOTAL		108.012.879.764,00	100.648.057.353,00	93,18%

2.3.5 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua (2) yaitu **Efisiensi Sumber Daya Biaya** dan **Sumber Daya Manusia**.

Perhitungan efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Presentase Efisiensi Biaya} &= 100\% - \frac{\text{Real Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \\ &= 100\% - \frac{108.012.879.764,-}{100.648.057.353,-} \times 100\% \\ &= 93,18\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan sesuai rumus efisiensi diatas, diperoleh presentase efisiensi biaya yang merupakan sisa anggaran dari total Belanja Modal pada Dinas PUPR Provinsi NTT adalah sebesar Rp. **7.364.322.411** atau sama dengan **6,82 %**. Apabila diperhitungkan berdasarkan pagu anggaran secara keseluruhan pada Dinas PUPR Provinsi NTT adalah Rp. **164.224.689.247,-** atau **84,93 %** dan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. **29.144.119.344,-** atau **15,07 %**.

Tingkat efisiensi pemanfaatan biaya sangat tergantung pada realisasi pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan fisik dilapangan serta pembiayaan lain yang menjadi unsur pendukung pelaksanaan kegiatan termasuk administrasi dan pelaporan kinerja dinas.

2.3.6 Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Analisis ini bertujuan untuk menilai keterkaitan, efektivitas, dan kontribusi program terhadap pencapaian indikator kinerja daerah;

Tabel

Analisa Program dan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Kinerja

NO	Program	Indikator Kinerja	Kondisi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kegiatan Utama	Analisa Kontribusi	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Areal Irigasi Fungsional	35.704,79 Ha	2000 Ha	56,95 Ha	35,761,74 Ha	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jaringan irigasi Di Luwerweton di Kabupaten Ngada sebesar 33,2 Ha - Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kabupaten Sumba Barat sebesar 23.75 Ha 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Secara kuantitatif, terjadi peningkatan luas areal irigasi fungsional sebesar 56,95 Ha dari kondisi tahun sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan target penambahan sebesar 2.000 Ha, tingkat realisasi baru mencapai sekitar 2,85% dari target tahunan, sehingga belum memenuhi ekspektasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Pemeliharaan dan Pengawasan Kegiatan Pemeliharaan berkala Daerah irigasi terkendala oleh DPPA yang terbit terlambat sehingga menyebabkan kekurangan waktu untuk melaksanakan pekerjaan ➢ Pelaksanaan Pekerjaan SID Daerah irigasi terkendala dengan keterbatasan dan kurang akuratnya data hidrologi (data hujan) dan klimatologi, sehingga menyulitkan dalam analisis perencanaan Pelaksanaan Pekerjaan SID Daerah irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melakukan Percepatan proses persiapan teknis sejak awal tahun, penyusunan jadwal kerja yang lebih efisien, penetapan skala prioritas kegiatan, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah terkait agar pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya dapat berjalan

NO	Program	Indikator Kinerja	Kondisi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kegiatan Utama	Analisa Kontribusi	Permasalahan	Tindak Lanjut
								<p>kinerja yang ditetapkan</p> <p>➢ Meskipun realisasi fisik relatif kecil, tambahan luasan tetap memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas layanan irigasi, terutama pada daerah layanan prioritas</p>	<p>terkendala dengan keterbatasan dan kurangnya data hidrologi (data hujan) dan klimatologi, sehingga menyulitkan dalam analisis perencanaan</p>	<p>lebih optimal dan tepat waktu</p> <p>➢ Menggunakan data pos hujan SHIKA dari BBWS NT II atau menggunakan data satelit dari GSMaP yang sudah terkalibrasi</p>
		Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan	10.614.020 M3	625.720 M3	76.608 M3	10,690,628 M3	<p>- Pembangunan sumur bor pada 17 titik Lokasi TA 2025</p> <p>- Pembangunan sumur bor (Paket Luncuran) Tahun Anggaran 2024 (Lokasi B Kab. Kupang, Kab. TTU, Lokasi A Kab. Alor, Kab. Sumba Barat Daya, Lokasi C Kab.</p>	<p>➢ Secara kumulatif terjadi peningkatan ketersediaan layanan irigasi, terutama pada daerah layanan prioritas</p>	<p>Pada saat Pelaksanaan Pengeboran kedalaman tertentu Adanya Formasi tidak stabil (tanah lempung dominan pasir dan batuan lapuk) berakibat dinding lubang bor mudah runtuh (longsor) sehingga menyulitkan pengeboran lanjutan akibat lubang bor tertimbun, pipa bor sulit</p>	<p>Dibutuhkan Penambahan Waktu Pekerjaan dan Paket Pekerjaan Tersebut di Luncurkan</p>

NO	Program	Indikator Kinerja	Kondisi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kegiatan Utama	Analisa Kontribusi	Permasalahan	Tindak Lanjut
							Manggarai Barat)	<p>tahun 2025 sebesar 625.720 m³, tingkat realisasi baru mencapai sekitar 12,24% dari target tahunan, sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan</p> <p>➢ Meskipun realisasi belum mencapai target yang ditetapkan, peningkatan volume ketersediaan air baku tetap memberikan kontribusi positif dalam memperkuat kapasitas tampungan pada embung, sumur bor,</p>	<p>diangkat, mesin bor melambat atau mengakibatkan membutuhkan waktu pengeboran sehingga tidak sesuai dengan rencana jadwal pelaksanaan</p>	

NO	Program	Indikator Kinerja	Kondisi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kegiatan Utama	Analisa Kontribusi	Permasalahan	Tindak Lanjut
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota	61,88 %	100 %	73,90 %	73,90 %	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dalam Kota Kupang (BLUD) ➤ Pengembangan Jaringan Distribusi 	<p>maupun bangunan penampung air lainnya. Kondisi ini turut mendukung stabilitas pasokan air dan meningkatkan daya tahan sistem sumber daya air terhadap fluktuasi curah hujan serta potensi kekeringan akibat variabilitas iklim.</p> <p>➤ Terjadi peningkatan cakupan layanan sebesar 12,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara</p>	<p>Kendala yang dialami selama masa pekerjaan ini adalah permasalahan izin lahan yang melewati lahan pertanian dan pertokoan. Selain itu permasalahan lainnya yaitu kurangnya tenaga kerja terampil</p>	<p>Di lakukan pendekatan sosial dengan pemilik lahan dan pengguna lahan pertanian. Serta dilakukan pendekatan terhadap asosiasi</p>

NO	Program	Indikator Kinerja	Kondisi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kegiatan Utama	Analisa Kontribusi	Permasalahan	Tindak Lanjut
							<p>dalam Kota Kupang (Program Gubernur BLUD</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengawasan Pengembangan Jaringan Distribusi dalam Kota Kupang (BLUD) 	<p>persentase, capaian terhadap target tahun 2025 adalah 73,90% dari target 100%, yang menunjukkan adanya kemajuan signifikan meskipun belum mencapai target penuh</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Peningkatan dari 61,88% menjadi 73,90% menunjukkan adanya ekspansi layanan atau optimalisasi kapasitas sistem yang telah terbangun, sehingga 	<p>sehingga banyak kegiatan kerja tanpa dilapangan</p>	<p>pekerja untuk mendukung tenaga kerja Terampil Konstruksi</p>

NO	Program	Indikator Kinerja	Kondisi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kegiatan Utama	Analisa Kontribusi	Permasalahan	Tindak Lanjut
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	67,99 %	86,86 %	2,01%	69,73%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rekonstruksi Ruas Jalan Bondokodi - Waitabula ➤ Rekonstruksi Ruas Jalan Poma Bajawa ➤ Rekonstruksi Ruas Jalan Sp. Niki-Niki - Omlasi ➤ Rekonstruksi Ruas Jalan Waepare - Bola ➤ Rekonstruksi Ruas Jalan Watowiti - Waiklibang ➤ Penanganan long segmen pada 26 titik ruas jalan 	<p>memperluas wilayah dan jumlah penduduk yang terlayani</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan menjadi 69,73% menunjukkan adanya perbaikan kondisi ruas jalan melalui kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, maupun rekonstruksi jalan ➤ Terjadi peningkatan kemantapan jalan sebesar 1,74%-2,01% (pembulatan teknis), sehingga total kemantapan 	<p>Ada Paket- Paket fisik yang Pelaksanaan Pekerjaan mengalami keterlambatan dan di luncurkan ke TA. 2026 oleh karena Proses Perubahan Anggaran (DPPA) sehingga Pelaksanaan lelang terlambat dan masa pelaksanaan sampai pada musim penghujan</p> <p>Ruas - Ruas jalan provinsi pada umumnya berada pada daerah-daerah yang tingkat curah hujannya tinggi sehingga pelaksanaan tender harus di mulai pada awal tahun (Januari)</p> <p>Paket paket PW dengan nilai Rp. 100.000.000,- mempengaruhi</p>	<p>Agar paket paket yg masuk dalam perubahan Anggaran DPPA agar pelaksanaan fisiknya di buat multi yeard sehingga dapat mengantisipasi adanya PHK atau luncuran</p> <p>Pelaksanaan Tender dimulai lebih awal sehingga pelaksanaan fisik di lapangan tidak sampai pada musim penghujan</p> <p>Agar paket - paket pengawasan nilainya</p>

NO	Program	Indikator Kinerja	Kondisi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kegiatan Utama	Analisa Kontribusi	Permasalahan	Tindak Lanjut
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	100 %	86,96 %	15 %	60,87 %	<p>kewenangan provinsi</p> <p>➢ Bimbingan , supervisi dan konsultasi penyusunan Tata Ruang di Kabupaten TTS & Alor</p> <p>➢ Terlaksananya percepatan proses legalisasi Perda Kabupaten Sumba & Rote Ndao sosialisasi Peraturan</p> <p>➢</p>	<p>jalan provinsi pada Tahun 2025 mencapai 69,73%. Namun, dibandingkan dengan target 86,86%, capaian masih berada di bawah ekspektasi perencanaan</p>	<p>kebutuhan tenaga di lapangan yang seharusnya Inspektur dan Lebttek harus berada ful di lapangan tapi karna berdasarkan anggaran maka waktu pengawasannya menjadi berkurang</p>	<p>menyesuaikan dengan (presentase nilai fisik)</p>
								<p>➢ Dengan capaian 60,87%, sebagian wilayah telah memiliki landasan regulatif yang memadai, namun masih terdapat kabupaten/kota yang perlu percepatan penyusunan dan penetapan regulasi tata</p>	<p>Tidak semua pemangku kepentingan hadir dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah RTRW Provinsi NTT</p>	<p>Menyampaikan hardcopy dan softcopy Peraturan Daerah RTRW Provinsi kepada pemangku kepentingan serta penyampaian informasi tata ruang melalui media sosial (YouTube, TikTok, Instagram dan Facebook)</p>

NO	Program	Indikator Kinerja	Kondisi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kegiatan Utama	Analisa Kontribusi	Permasalahan	Tindak Lanjut
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	4,55 %	18,18 %	50 %	60 %	<p>Daerah Nomor 4 tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur cluster Timor, Flores dan Sumba</p>	<p>ruang ➤ Meskipun demikian, capaian 60,87% tetap menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah telah memiliki dasar pengaturan tata ruang, sehingga fungsi pengendalian pembangunan masih berjalan</p>	<p>Kurangnya waktu pemberian Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang dan terbatasnya pemahaman SDM Bidang Penataan Ruang</p>	<p>Melakukan komunikasi lebih lanjut secara daring</p>
							<p>➤ Pembangunan WC/Sanitasi di Kab. TTS (25 Unit)</p> <p>➤ Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang (Lasiana)</p>	<p>➤ Terjadi peningkatan signifikan dibandingkan kondisi tahun sebelumnya. Realisasi sebesar 50% menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan PSU melampaui</p>	<p>Tantangan Utama antara lain Data Yang Tidak Terpadu, Lemahnya Koordinasi Lintas Sektor, Serta Keterbatasan Kapasitas Sdm Dan Infrastruktur. Kendala Ini Diperparah Oleh Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dan Ketidaksiharian Desain Teknis Dengan Kondisi Lokal, Yang Berisiko</p>	<p>Langkah Strategis Dilakukan Melalui Penguatan Integrasi Data Dan Koordinasi Lintas Sektor Untuk Menetapkan Lokasi Prioritas Secara Stunting Dengan Akurat. Desain Psu Berbasis Kondisi</p>

NO	Program	Indikator Kinerja	Kondisi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kegiatan Utama	Analisa Kontribusi	Permasalahan	Tindak Lanjut
							<p>> Jasa Konsultasi Perencanaan Penyediaan PSU di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman di Kabupaten Ende dan Alor</p>	<p>target tahunan 18,18%. Dengan capaian kumulatif 60%, indikator ini menunjukkan tren kinerja yang sangat progresif</p> <p>➢ Peningkatan signifikan ini menunjukkan keberhasilan intervensi fisik dalam memperbaiki kualitas lingkungan Masyarakat</p>	<p>Menghambat Antara Fisik Dengan Gizi</p> <p>Integrasi Pembangunan Intervensi</p>	<p>Lokal, Peningkatan Kapasitas Sdm, Serta Pelibatan Aktif Masyarakat, Program ini Mengintegrasikan Pembangunan Fisik Dengan Intervensi Gizi Melalui Berbagai Skema Pendanaan Serta Monitoring Berkelanjutan Untuk Memastikan Efektivitas Infrastruktur Pendukung</p>

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

a. Dasar Hukum

- 1) SP DIPA No. 145.03.4.694107/2025, tanggal 02 Desember 2024
- 2) SP DIPA No. 145.04.4.693776/2025, tanggal 02 Desember 2024

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

- 1) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum;
- 2) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum;

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Sumber Anggaran dari APBN dana Tugas Pembantuan, dengan jumlah anggaran :

- a) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dengan jumlah anggaran sebesar 21.338.819.000,-
- b) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.867.243.000,-

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

3.1.1 Target Kinerja

Target Kinerja dari Program/ Kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/ lembar penugasan (DIPA) adalah :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.321.491.000,- realisasi Rp. 21.114.582.000,- atau sebesar 99,03 % dan fisik 99,84 % dengan Kegiatan :

- Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 21.003.571.000,-

- Layanan Dukungan Manajemen Internal, target 1 layanan dengan anggaran sebesar Rp. 1.155.122.000,-
2. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.587.366.000,- dengan rincian output kegiatan :
- Dukungan Teknis dengan target 100% dan anggaran sebesar Rp. 185.031.000,-
 - OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) dengan anggaran sebesar Rp. 3.255.942.000,-
 - OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) dengan anggaran sebesar Rp. 1.417.971.000,-
 - Layanan Dukungan Manajemen Unit Kerja dengan target 1 Tahun/Layanan dan anggaran sebesar Rp. 728.422.000,-

3.1.2 Realisasi

1. Realisasi dalam Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan (*lihat pada Matriks*)
2. Rincian Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagai berikut:
 - 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air.
 Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.158.693.000,- realisasi Rp. 22.146.752.000,- atau sebesar 99,95 % dan fisik 99,99 % dengan Kegiatan :
 - 1.1. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA serta penanggulangan Darurat Akibat Bencana, dengan rincian:
 Prasarana Jaringan sumber Daya Air :
 - Operasi Rutin D.I. Manikin (4,43 km primer, 6,21 km sekunder); kab. Kupang
 - Operasi Rutin D.I. Tilong (13,84 km primer, 36,3 km sekunder); kab. Kupang
 - Operasi Rutin D.I. Batu merah (3,31 km primer, 13,25 km sekunder); kab. Kupang
 - Operasi Rutin D.I. Bena (17,18 km primer, 20,59 km sekunder); kab. Timor tengah selatan
 - Operasi Rutin D.I. Haekto (35,4 km primer, 25,78 km sekunder); kab. Timor tengah utara

- Operasi Rutin D.I. Mena (22,71 km primer, 14,95 km sekunder); kab. Timor tengah utara
- Operasi Rutin D.I. Haekesak (12,85 km primer, 27,16 km sekunder); kab. Belu
- Operasi Rutin D.I. Malaka (16,92 km primer, 70,11 km sekunder); kab. Malaka
- Operasi Rutin D.I. Benleleng (5,78 km primer, 20,73 km sekunder); kab. Alor
- Operasi Rutin D.I. Baing (8,7 km primer, 7,74 km sekunder); kab. Sumba timur
- Operasi Rutin D.I. Magepanda (10,29 km primer, 23,57 km sekunder); kab. Sikka
- Operasi Rutin D.I. Mautenda (5,44 km primer, 36,8 km sekunder); kab. Ende
- Operasi Rutin D.I. Mbay (3,52 km primer, 34,36 km sekunder); kab. Nagekeo
- Operasi Rutin D.I. Ngada/soa (2,9 km primer, 25,47 km sekunder); kab. Ngada
- Operasi Rutin D.I. Satar beleng (2,58 km primer, 5,46 km sekunder); kab. Manggarai timur
- Operasi Rutin D.I. Wae musur (7,3 km primer, 27,18 km sekunder), kab. Manggarai timur
- Operasi Rutin D.I. Wae dingin / laku (6,74 km primer, 69,3 km sekunder); kab. Manggarai timur
- Operasi Rutin D.I. Waemantar (18,92 km primer, 55,65 km sekunder); kab. Manggarai
- Operasi Rutin D.I. Lembor (13,34 km primer, 79,33 km sekunder); kab. Manggarai barat
- Operasi Rutin D.I. Nggorang (mese,dongkong,galung) (18,9 km primer, 20,37 km sekunder); kab.manggarai barat
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Manikin (0.093 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Tilong (0.268 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Batu Merah (0.136 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Bena (0.268 Km) di Kab. TTS
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Haekto (0.251 Km) di Kab. TTU
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Mena (0.251 km) di Kab. TTU

- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Haikesak (0.268 Km) di Kab. Belu
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Malaka (0.535 Km) di Kab. Malaka
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Benleleng (0.209 Km) di Kab. Alor
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Baing (0.268 Km) di Kab. Sumba Timur
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Magepanda (0.268 Km) di Kab. Sikka
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Mautenda (0.268 km) di Kab. Ende
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Mbay (0.268 Km) di Kab. Nagekeo
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Ngada/Soa (0.151 Km) di Kab. Ngada
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Satar Beleng (0.123 Km) di Kab. MATIM
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Waemusur (0.209 Km) di Kab. MATIM
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Wae Dingin (0.209 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Wae Mantar (0.268 Km) di Kab. Manggarai
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Lembor (0.268 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Nggorang (0.251 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Manikin (4.43 km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Manikin (6.21 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Tilong (13.84 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Tilong (36.3 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Batu Merah (3.31 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Batu Merah (13.25 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Bena (17.18 Km) di Kab. TTS

- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Bena (20.59 Km) di Kab. TTS
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Haekto (35.40 Km) di Kab. TTU
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Haekto (25.78 Km) di Kab. TTU
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Mena (22.71 Km) di Kab. TTU
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Mena (14.95 Km) di Kab. TTU
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Haikesak (14.95 Km) di Kab. Belu
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Haikesak (27.16 Km) di Kab. Belu
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Malaka (16.92 Km) di Kab. Malaka
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Malaka (70.11 Km) di Kab. Malaka
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Benleleng (5.78 Km) di Kab. Alor
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Benleleng (20.73 Km) di Kab. Alor
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Baing (8.70 Km) di Kab. Sumba Timur
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Baing (7.74 Km) di Kab. Sumba Timur
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Magepanda (10.29 Km) di Kab. Sikka
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Magepanda (23.57 Km) di Kab. Sikka
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Mautenda (5.44 Km) di Kab. Ende
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Mautenda (36.80 Km) di Kab. Ende
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Mbay (3.52 Km) di Kab. Nagekeo
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Mbay (34.36 Km) di Kab. Nagekeo
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Ngada/Soa (2.90 Km) di Kab. Ngada
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Ngada/Soa (25.47 Km) di Kab. Ngada

- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Satar Beleng (2.58 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Satar Beleng (5.46 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Waemusur (7.30 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Waemusur (27.18 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Wae Dingin (6.74 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Wae Dingin (69.30 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Wae Mantar (18.92 Km) di Kab. Manggarai
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Wae Mantar (55.65 Km) di Kab. Manggarai
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Lembor (13.34 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Lembor (79.33 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Primer D.I. Nggorang (Mese, Dongkong, Galung - 19.90 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Nggorang (Mese, Dongkong, Galung - 20.37 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Perjalanan Dinas dalam Rangka Monitoring , Evaluasi, Pelaksanaan dan Pengawasan Kegiatan OP Rutin dan Berkala Jaringan irigasi di 20 Daerah Irigasi (1 Layanan)
- Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan/ SMOPI untuk 20 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat
- Administrasi Umum (1 Layanan)

1.2 Layanan Dukungan Manajemen Internal

- Operasional Dan Pemeliharaan Kantor;1 Layanan;

2) Program Penyelenggaraan Jalan, dengan Kegiatan:

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Program Penyelenggaraan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.382.638.000,- realisasi Rp. 6.381.601.000,- atau sebesar 99,97 % dan fisik 100 %, dengan rincian kegiatan:

1.1 Dukungan Teknis

- Monitoring dan Evaluasi (1 Layanan)

1.2 OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), dengan rincian:

- Preservasi Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok - Tenau (12.93 Km)
- Preservasi Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok-Tenau (1.78 Km)
- Preservasi Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok-Tenau (0.73 Km)
- Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Kupang dan Bolok - Tenau (9.94 Km)

1.3 OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan), dengan rincian:

- Pemeliharaan Rutin Jembatan dalam Kota Kupang - Bolok - Tenau (195.5 M)

1.4 Dukungan Manajemen Internal (Layanan Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit), dengan rincian;

- Honorarium Penanggungjawab Keuangan (1 Layanan)
- Eksploitasi Operasional Kantor (1 Layanan)

4. Hambatan/ Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kegiatan Tugas Pembantuan beberapa kendala yang dialami diawal pelaksanaan adalah :

1. Pergantian Kode satker untuk pergantian Spesimen;
2. Urusan di KPPN dan menunggu Persetujuan pembukaan Rekening.

5. Saran dan Tindak Lanjut

- 1) Meningkatkan koordinasi lintas instansi (Kementerian Teknis, KPPN, dan Pemerintah Provinsi);
- 2) Mengintegrasikan perencanaan administrasi keuangan dalam tahap awal perencanaan kegiatan.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum pada tingkat Provinsi dilaksanakan dengan mengacu pada jenis pelayanan dasar, indikator, serta tahapan penerapan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dinas PUPR Provinsi NTT sebagai salah satu Dinas Pengampu SPM meliputi wajib SPM Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan Rakyat wajib menyampaikan Laporan Capaian Indikator/ Jenis Layanan Penerapan SPM sebagai berikut :

A. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum terdiri atas:

- *Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota dengan indikator Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota*

Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota

- *Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota, dengan indikator Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota*

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama

2. Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum

Tabel 4.1
Target dan Indikator Pencapaian SPM secara Nasional

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

3. Alokasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT mengalokasikan anggaran untuk mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum melalui Bidang Cipta Karya. Alokasi anggaran tersebut direncanakan dan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Rincian program dan kegiatan dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota

Rincian program/ kegiatan untuk pelayanan dasar *Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota* sebagai berikut :

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.909.033.500,- dan realisasi keuangan Rp. 707.487.056,- atau sebesar 77,83%.
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman; Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman dengan Nama Paket : Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.100.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 1.097.961.490,- atau sebesar 99,81%.

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota

Pada Tahun Anggaran 2025, tidak terdapat program/kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum pada layanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota. Kondisi ini disebabkan oleh

keterbatasan anggaran, sehingga pelaksanaan layanan tersebut belum dapat dilaksanakan.

4. Dukungan Personil

Total keseluruhan dukungan personil pada bidang/ unit pelaksana Jenis Pelayanan Dasar *Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota* dan *Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota* sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebanyak 80 orang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bidang/ Unit Pelaksana	ASN	CPNS	PPPK	Total	Keterangan
1	Cipta Karya	21	16	43	80	SPAM Regional & SPALD

Sumber data : Bidang CK

5. Hasil Capaian

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat disampaikan hal - hal sebagai berikut:

1) Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota

Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai pembagian urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pelaksanaan kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Bidang Cipta Karya.

Bidang Cipta Karya melakukan perencanaan, pembangunan, pengelolaan, serta pengawasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Curah lintas kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, khususnya dalam menjamin ketersediaan layanan air minum lintas wilayah secara berkelanjutan.

Pada Tahun Anggaran 2025, belum terdapat kegiatan yang secara spesifik mendukung capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum. Namun demikian, pada tahun yang sama dilaksanakan kegiatan *Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan di Kota Kupang (Kelurahan Lasiana)* yang melayani sebanyak 115 KK. Kegiatan tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum karena bukan merupakan SPAM Lintas Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, pada Aplikasi e-SPM dipilih opsi **“Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota”**, yang mencerminkan belum terlaksananya program/kegiatan pendukung capaian SPM pada tahun dimaksud. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan SPM. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memfokuskan upaya pada tahap perencanaan, guna memastikan tersusunnya rencana yang komprehensif, terukur, dan tepat sasaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan fisik selanjutnya.

Mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, khususnya poin C butir 2 sebagaimana tercantum pada halaman 288, ditegaskan bahwa, *Pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, namun sudah melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dan penyusunan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar*, maka nilai pencapaian SPM ditetapkan sebesar 100. Oleh karena itu, capaian SPM untuk pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota adalah sebesar **100%**.

2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota

Pada Tahun 2025, pelayanan dasar untuk *Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota*, yang diukur melalui indikator *Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota*, belum dapat dilaksanakan. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga belum memungkinkan dilaksanakannya program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan indikator SPM dimaksud pada tahun berjalan.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, dalam Aplikasi e-SPM dipilih opsi **“Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota”**, yang mencerminkan bahwa pada tahun berjalan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota belum dapat dilaksanakan.

Mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, khususnya poin C butir 2 sebagaimana tercantum pada halaman 288, ditegaskan bahwa, *Pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, namun sudah melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dan penyusunan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar*, maka nilai pencapaian SPM ditetapkan sebesar 100. Oleh karena itu, capaian SPM untuk pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota adalah sebesar **100%**.

3) Indeks Pencapaian SPM Pekerjaan Umum

Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek, yaitu:

1. Capaian Mutu Layanan Dasar

Capaian Mutu Pelayanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis.

2. Capaian Penerima Layanan Dasar

Capaian penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP-SPM) adalah nilai capaian SPM yang dihitung berdasarkan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar yang dikalikan dengan bobot mutu, serta persentase indeks penerima layanan dasar yang dikalikan dengan bobot penerima. Berdasarkan hasil penghitungan pada Aplikasi e-SPM Kementerian Dalam Negeri, Indeks Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah sebesar **100%** dengan kategori **“Pencatatan Saja”**.

6. Permasalahan dan Solusi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah diterapkan sejak beberapa tahun sebelumnya, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal. Dalam implementasinya masih diperhadapkan dengan berbagai kendala dan permasalahan, baik yang bersumber dari internal Dinas maupun eksternal, yang berpengaruh terhadap capaian SPM setiap tahunnya.

Identifikasi berbagai permasalahan beserta solusi yang diharapkan dalam Penerapan serta Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum pada Tahun 2025 tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2

Identifikasi Masalah Dan Solusi Sesuai Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Masalah dan Solusi	
			Masalah	Solusi
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	- Keterbatasan anggaran yang mengakibatkan kegiatan hanya dapat difokuskan untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan anggaran yang tersedia.	Sebagai solusi sementara, kegiatan difokuskan pada tahap perencanaan untuk memastikan bahwa rencana yang disusun bersifat komprehensif dan tepat sasaran sebelum memasuki tahap pelaksanaan fisik.
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik lintas regional kabupaten/ kota	Dengan Kondisi Fiskal daerah yang ada maka alokasi anggaran untuk kegiatan terkait Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota pada Dinas PUPR Provinsi NTT tidak dapat dianggarkan sehingga tidak terdapat kegiatan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota di Tahun anggaran 2025.	

Tabel 4.3 Identifikasi Masalah Dan Solusi Implementasi Standar Pelayanan Minimal

No.	Jenis Masalah	Masalah	Tindak Lanjut/ Solusi
1	Data Dasar	Data dasar yang tersedia saat ini belum memadai dan tidak diperbarui secara berkala, sehingga menyebabkan keterbatasan dalam perencanaan dan evaluasi program. Kurangnya data yang akurat dan terkini dapat menghambat pengambilan keputusan yang berbasis bukti serta mengurangi efektivitas program yang dijalankan.	Solusi yang diperlukan adalah meningkatkan upaya pengumpulan dan pembaruan data secara berkala sesuai dengan kebutuhan layanan dasar.
2	Indikator	Perlu ditingkatkan upaya pengumpulan data secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan layanan dasar	Perlu disusun Road Map SPALD sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan SPALD Regional
3	Penetapan Target SPM	Karakteristik pulau yang berbeda (berbukti-bukti dan curah hujan yang tidak pasti) menyulitkan daerah untuk menetapkan target dan indikator mengacu kepada target nasional	Koordinasi dengan Dinas Pengampu terkait penetapan target riil
4	Integrasi SPM dalam Dokumen Perencanaan	Tidak semua indikator dapat dengan mudah diintegrasikan dengan pemenuhan visi dan misi kepala daerah	Adanya komitmen antara Dinas Pengampu dengan Kepala Daerah
5	Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub	Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM masih ada yang belum sesuai dengan nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda (https://spm.bangda.kemendagri.go.id/) yang memang diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan indikator SPM	Penyesuaian Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM

B. SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Jenis Pelayanan dan Indikator Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

1) Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dilaksanakan melalui:

- a. rehabilitasi rumah;
- b. pembangunan kembali rumah;
- c. pemukiman kembali; atau
- d. bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni.

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dilakukan dengan ketentuan:

1. Pada saat masa pasca bencana;
2. Surat Keputusan Penetapan bencana dari Gubernur;
3. Dampak bencana di daerah administrasi Provinsi.

2) Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:

- a. Penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan; atau
- b. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni.

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. Terdapat Surat Penetapan Kepala Daerah bahwa Daerah tersebut termasuk ke dalam program Pemerintah Daerah untuk direlokasi; dan
- b. Sesuai jumlah rencana Rumah Tangga yang akan ditangani dalam dokumen Rencana Aksi dan pelaksanaan pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap.

Pelaksanaan pemenuhan terhadap Rencana Aksi yang dapat dilakukan secara bertahap dapat dihitung capaian SPM apabila, setidaknya telah dilakukan:

- a. Penilaian oleh tim penaksir (*appraisal*);
- b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan
- c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi.

Program Pemerintah Daerah sebagaimana dilaksanakan dalam rangka:

- a. Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha;
- b. Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;
- d. Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau

e. Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana.

Daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya sebagaimana merupakan daerah berpotensi menimbulkan korban jiwa meliputi:

- a. sempadan sungai;
- b. sempadan pantai;
- c. sempadan rel kereta api;
- d. daerah saluran SUTET; dan/atau
- e. daerah berpotensi bahaya lainnya.

Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

2. Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat

Tabel 4.5

Target dan Indikator dan Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang meperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

Sumber data : Permenaqgri/59 Tahun 2021

3. Realisasi SPM Perumahan Rakyat

Tabel 4.6
Realisasi Pencapaian SPM Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian				
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	80%	Jumlah barang dan jasa	20%	Lampiran C Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal : Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100, kategori Tuntas Paripurna
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	80%	Jumlah barang dan jasa	20%	

Sumber data : Aplikasi e-SPM

4. Alokasi Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT pada tahun 2025 dialokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT sebesar Rp. 193.368.808.591,- yang diperuntukkan untuk belanja modal dan belanja operasi.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan yang berkaitan dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni Dinas PUPR Tahun 2025 yang hanya diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Pemerintah Provinsi dengan Total Pagu Rp. 1.252.873.420,-. Dari total anggaran ini, senilai Rp. 600.000.000,- dialokasikan untuk sub kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan di 6 (enam) Kabupaten, yaitu: Kabupaten Sikka, kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTU, dan Kabupaten Belu. Sisa pagu anggaran senilai Rp. 652.873.420,- diperuntukkan pada kegiatan pendukung terkait Identifikasi perumahan bagi korban bencana dengan target 6 Kabupaten.

5. Dukungan Personil

Total keseluruhan dukungan personil pada bidang/ unit pelaksana Jenis Pelayanan Dasar *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi* sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebanyak 73 orang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	23 Orang
2	CPNS	18 Orang
3	PPPK	32 Orang
	Jumlah	73 Orang

Sumber data : Data Bidang Perumahan & Permukiman

6. Hasil Capaian

Berdasarkan hasil pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2025 maka diperoleh hasil pencapaian yang dapat di sampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.7 Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Capaian Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar			Realisasi Capaian Mutu Layanan Minimal (%)
		Target	Realisasi	%	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	0	0	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi	0	0	100	100

Sumber data : Laporan SPM Bidang Perumahan Rakyat Pada Aplikasi e-SPM

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa tidak ada realisasi dalam pencapaian penerima layanan dasar. Hal ini disebabkan karena tidak adanya bencana yang terjadi di Provinsi NTT sehingga tidak ditargetkan untuk rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana. Demikian pula halnya dengan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi. Dengan tidak adanya kedua jenis pelayanan tersebut baik target maupun realisasi maka dianggap pencapaiannya 100%.

1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat ketentuan untuk melaksanakan jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Pada saat masa pasca bencana;
2. Surat Keputusan Penetapan bencana dari Gubernur;
3. Dampak bencana di daerah administrasi Provinsi

Dengan adanya ketentuan tersebut, dalam melaksanakan jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat maka pada realisasi pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2025.

Berkaitan dengan kewajiban untuk mengoptimalisasikan layanan dasar Bidang Perumahan Rakyat maka SPM Bidang Perumahan Rakyat telah memprogramkan kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni Dinas PUPR Tahun 2025 dengan Pagu sebesar Rp. 1.252.873.420,- yang hanya diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Pemerintah Provinsi. Dari total anggaran ini, senilai Rp. 600.000.000,- dialokasikan untuk sub kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan di 6 (enam) Kabupaten, yaitu: Kabupaten Sikka, kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTU, dan Kabupaten Belu. Sisa pagu anggaran senilai Rp. 652.873.420,- diperuntukan pada kegiatan pendukung terkait Identifikasi perumahan bagi korban bencana dengan target 6 Kabupaten.

Terkait dengan ketiadaan kegiatan tersebut maka, opsi yang dipilih pada Aplikasi e-SPM adalah '*Tidak Terjadi Bencana*'. Hal ini terdokumentasi dalam eviden berupa form tahapan penerapan yang menyatakan bahwa pada Tahun 2025, Dinas PUPR Provinsi NTT tidak melaksanakan kegiatan terkait pemenuhan pelayanan dasar *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi* (form terlampir).

Tabel 4.8 Persentase Penerima Layanan Dasar dan Persentase Mutu Minimal Layanan Dasar (opsi : '*Tidak Terjadi Bencana*')

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar			Realisasi Capaian Mutu Layanan Minimal			Total Capaian (%)
		Target	Realisasi	80%	Target	Realisasi	20%	
1	2	3	4	5=4*80%	6	7	8=7*20%	9=5+8
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	-	100	80	-	100	20	100

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Sesuai dengan Lampiran C Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal : Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100, telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu capaian 100% dengan kriteria **TUNTAS PARIPURNA**.

2) Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

Dalam upaya meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah provinsi/ Kabupaten dan Kota maka pemerintah terus berupaya untuk menyediakan / membangun sarana dan prasarana dan infrastruktur pendukung yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Upaya pemerataan ini dapat berakibat pada pemanfaatan wilayah sampai pada daerah atau wilayah permukiman masyarakat sesuai prioritas kebutuhan pembangunan sehingga perlu dilakukan penggantian lahan dan relokasi pemukiman bagi warga yang berada dalam wilayah yang diintervensi oleh kegiatan pembangunan bagi kepentingan umum.

Terkait dengan relokasi permukiman warga sebagai akibat adanya program pemerintah dalam wilayah permukiman masyarakat perlu kami informasikan juga sepanjang tahun 2025 tidak ada program dan kegiatan pembangunan yang berdampak pada relokasi pemukiman bagi warga masyarakat.

Berkaitan dengan ketiadaan program pemerintah yang berakibat pada relokasi tersebut maka, opsi yang dipilih pada Aplikasi e-SPM adalah '*Tidak Ada Relokasi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah*'. Hal ini terdokumentasi dalam eviden berupa form tahapan penerapan yang menyatakan bahwa pada Tahun 2025 Dinas PUPR Provinsi NTT tidak melaksanakan kegiatan terkait pemenuhan pelayanan dasar *Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi* (form tahapan terlampir).

Tabel 4.9 Persentase Penerima Layanan Dasar dan Persentase Mutu Minimal Layanan Dasar (opsi : 'Tidak Ada Relokasi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah')

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar			Realisasi Capaian Mutu Layanan Minimal			Total Capaian (%)
		Target	Realisasi	80%	Target	Realisasi	20%	
1	2	3	4	5=4*80%	6	7	8=7*20%	9=5+8
1	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	-	100	80	-	100	20	100

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Sesuai dengan Lampiran C Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal : Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100, telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu capaian 100% dengan kriteria **TUNTAS PARIPURNA**.

3) Kategori Indeks Pencapaian SPM Perumahan Rakyat

Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek, yaitu :

1. Capaian Mutu Layanan Dasar

Capaian Mutu Pelayanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis

2. Capaian Penerima Layanan Dasar

Capaian penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja

Indeks pencapaian SPM (IP-SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima, sehingga Kategori Indeks Pencapaian SPM Perumahan Rakyat adalah 100% dengan kategori Tuntas Paripurna.

7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan serta Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2025 serta solusi terhadap pelaksanaan setiap jenis Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10 Identifikasi Masalah Dan Solusi Sesuai Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Masalah dan Solusi	
			Masalah	Solusi
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban yang memperoleh rumah layak huni	<p>1. Ada SK bencana dari Kepala Daerah yang menyatakan bencana berskala Provinsi, namun karena kondisi keterbatasan fiskal daerah sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, namun tetap dilakukan pendataan rumah di kawasan rawan bencana;</p> <p>2. Belum adanya database Perumahan terkait rumah pada lokasi rawan bencana, jenis rumah, dan lokasi baru sebagai tempat Relokasi bagi korban</p>	<p>1. Pemenuhan data dasar pemenuhan layanan SPM perlu adanya kerja sama antara Organisasi Perangkat Daerah Terkait dengan pihak Kabupaten, Kelurahan atau pihak lainnya agar bisa memperoleh data dasar yang lebih efektif dan efisien dalam penganggaran;</p> <p>2. Tetap menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah Daerah untuk diusulkan penanganannya di tahun berikutnya.</p>

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Masalah dan Solusi	
			Masalah	Solusi
			bencana sehingga belum ada sasaran pasti.	
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Layanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah memerlukan perencanaan daerah jangka panjang yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi NTT, sehingga dalam hal pemenuhannya memerlukan sinkronisasi program terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan;	Apabila terdapat Rencana Penyelenggaraan Relokasi Di Provinsi NTT Sebaiknya ditetapkan terlebih dahulu oleh kepala daerah agar pemenuhan layanan SPMnya dapat dilaksanakan.

Sumber Data : Dinas PUPR Provinsi NTT

Pelayanan dasar *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi* pada SPM Bidang Perumahan Rakyat sampai dengan tahun 2025 belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan fiskal daerah sehingga pelaksanaannya juga tidak sesuai dengan Renaksi Perumahan yang telah dipergubkan. Selain itu, belum adanya database Perumahan terkait rumah pada lokasi rawan bencana, jenis rumah, dan lokasi baru sebagai tempat Relokasi bagi korban bencana sehingga belum ada sasaran pasti,

sehingga Dinas PUPR juga mengalokasikan senilai Rp. 600.000.000,- untuk kegiatan pendataan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Provinsi dan identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan yang berfokus pada 6 (enam) Kabupaten, yaitu: Kabupaten Sikka, Flores Timur, Lembata, Kabupaten Kupang, TTU, dan Belu.

Dengan demikian, semua tahapan yang berkaitan dengan proses pelaporan Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat, mulai dari tahap Pengumpulan Data sampai dengan tahap Pelaksanaan Penerapan SPM belum dilakukan secara optimal dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi ketersediaan anggaran.

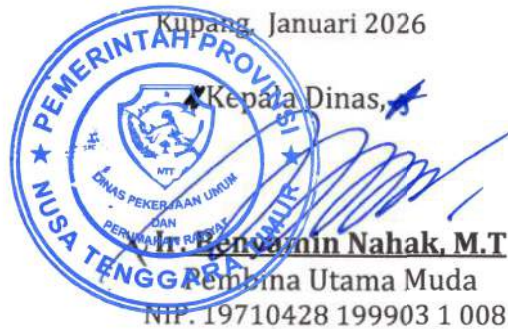
Pentingnya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam hal perumahan yang layak huni tidak terbantahkan. Namun, terkendalanya pelaksanaan pemenuhan SPM ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam menyediakan layanan yang memadai. Sebagai akibatnya, kualitas dan kuantitas layanan yang seharusnya tersedia untuk masyarakat terdampak tidak dapat mencapai target yang diharapkan.

BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, Januari 2026













Kepala Dinas,






Dr. Benjamin Nahak, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19710428 199903 1 008

LAMPIRAN

**Dokumentasi Kegiatan Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2025**

No	Kegiatan	Dokumentasi		
1	Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patiala – Wetana (Bts. Kab Sumba Barat Daya)			
2	Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kalabahi - Kokar di Kab. Alor			
3	Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Polda - Sp. Patung Merpati di Kota Kupang			
4	Rekonstruksi Ruas Jalan Sp. Welaus - Kusa (Bts. Kab. Belu) Di Kabupaten Malaka			

**Dokumentasi Kegiatan Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2025**

No	Kegiatan	Dokumentasi		
5	Rekonstruksi Ruas Jalan Poma - Bajawa			
6	Rekonstruksi Ruas Jalan Watowiti - Waiklibang Kab. Flores Timur			

**Dokumentasi Kegiatan Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2025**

No	Kegiatan	Dokumentasi		
1	Pemasangan Water Meter Pada Sumber Air Permukaan di Kabupaten Timor Tengah Utara			
2	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Ende			
3	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Flores Timur			
4	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Rote Ndao			

Dokumentasi Kegiatan Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Dokumentasi
1	Pembangunan Jaringan Perpipaan Keciaptakarya (Cipta Karya)	

Dokumentasi Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Dokumentasi
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	

**Dokumentasi Kegiatan Sekretariat
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2025**

No	Kegiatan	Dokumentasi		
1	Rehabilitasi Gedung kantor Gubernur Pertama <ul style="list-style-type: none"> • Rehab/Pemeliharaan Gedung A • Rehab/Pemeliharaan Gedung D • Rehab/Pemeliharaan Gedung E 			
2	Rehabilitas dan Penataan Gedung A Kantor Gubernur Pertama <ul style="list-style-type: none"> • Penataan Ruang Pimpinan Dinas • Rehab/Penataan Ruang Rapat Dinas • Penataan Lobi Dinas 			

Dokumentasi Kegiatan UPTD SPAM
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Dokumentasi
1	Pengembangan Jaringan Distribusi Utama SPAM dalam Kota Kupang: <ul style="list-style-type: none">• Kompleks Kantor Gubernur• Hotel Sylvia Kupang• Rumah Sakit Wirasakti Kupang	

**INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025**

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
 NAMA SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 : 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman
 : 3. Pertanahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2025	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	1)	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi	$\frac{\text{Luas daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dalam Kondisi Baik (Ha)}}{\text{Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi}} \times 100\%$	$\frac{35.761,74 \text{ Ha}}{60.328 \text{ Ha}} \times 100\% = 59,27\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> - Target penanganan Luas Areal Irigasi Fungsional Tahun 2025 adalah 2000 Ha - Realisasi Penanganannya Luas Areal Irigasi Fungsional 56,95 Ha, Capaian Luas Areal Irigasi Fungsional yang sudah mendapat penanganan sampai dengan Tahun 2025 adalah 35.761,74 Ha atau 59,27 % dari Luas DI Kewenangan Provinsi 60.328 Ha
		2)	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	$\frac{\text{Panjang Jalan Kewenangan Provinsi (Baik + Sedang)}}{\text{Panjang jalan Keseluruhan di Wilayah Provinsi}} \times 100\%$	$\frac{1.867,21 \text{ Km}}{2.687,31 \text{ Km}} \times 100\% = 69,48\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi mantap Jalan Provinsi sampai dengan Tahun 2024 adalah 1.827,07 Km atau telah mencapai 67,99 % - Target penanganan Tahun 2025 yakni 86,86% (2.334,20 Km) sedangkan realisasinya adalah 46,92 Km melalui penanganan Rekonstruksi dan Rehabilitasi serta Pemeliharaan rutin sepanjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2025	SUMBER DATA	KETERANGAN
							58,35 Km - Total kondisi jalan mantap sampai dengan Tahun 2025 adalah 69,48 % atau sepanjang 1.867,21 Km dari total Jalan Mantap kewenangan Provinsi 2.687,31 Km
		3)	Persentase Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Mitigasi Banjir	<p><i>Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir dan mitigasi banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (Ha)</i></p> <p>-----x 100%</p> <p><i>Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian resiko bencana banjir kewenangan Provinsi (Ha)</i></p>	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tidak teralokasikan dalam Dokumen DPA Dinas PUPR Tahun 2025
		4)	Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui	<i>Jumlah Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air</i>	$\frac{443.911 \text{ M3}}{600.691,47 \text{ M3}} \times 100\% = 73,90 \%$	Dinas Pekerjaan Umum dan	- Target Capaian Persentase Cakupan Layanan Air Minum

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2025	SUMBER DATA	KETERANGAN
		4)	Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	<p><i>Jumlah Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota pada tahun N</i></p> <p>----- x 100%</p> <p><i>Jumlah kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan pada tahun N</i></p>	<p>443.911 M3</p> <p>----- x 100% = 73,90 %</p> <p>600.691,47 M3</p>	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> - Target Capaian Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2025 adalah 100% - Pada Tahun 2025, pemanfaatan kapasitas produksi UPTD SPAM belum maksimal karena hanya satu pompa yang beroperasi dengan kapasitas 75 liter/detik dari total terpasang 150 liter/detik dengan jumlah kumulatif kapasitas terlayani 443.911 M3/tahun sedangkan jumlah kumulatif pemenuhan kebutuhan adalah 600.691,47 M3/tahun
		5)	Persentase Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPALD Regional	<p><i>Total Volume Limbah yang masuk dalam SPALD Regional</i></p> <p>-----x100%</p> <p><i>Total kapasitas pengolahan Limbah SPALD Regional</i></p>	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tidak teralokasikan dalam Dokumen DPA Dinas PUPR Tahun 2025
		6)	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di Wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	<p><i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi Pemerintah Provinsi di Wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli</i></p> <p>----- x100%</p>	<p>186 orang</p> <p>____x 100% = 27,64%</p> <p>673 orang</p>	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> - Total seluruh kebutuhan TA konstruksi Adalah 1.936 orang - Sampai dengan tahun 2023, jumlah yang telah tersertifikasi sebanyak 1.263 orang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2025	SUMBER DATA	KETERANGAN
				<i>Jumlah kebutuhan tenaga ahli konstruksi yang terlibat dalam kegiatan konstruksi Pemerintah Provinsi</i>			<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2025, telah dilakukan pelatihan sertifikasi sebanyak 53 orang - jika memperhatikan periode RPD 2024-2026, jumlah yang sudah tersertifikasi adalah 133 orang (2024) + 53 orang (2025) = 186 orang - secara keseluruhan total jumlah kebutuhan tenaga ahli yang belum tersertifikasi di wilayah provinsi adalah 1936 - 1.263 orang = 673 orang
		7)	Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Sudah Diterbitkan di Provinsi	<i>Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun</i> $\frac{\text{Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun}} \times 100\%$	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tidak teralokasikan dalam Dokumen DPA Dinas PUPR Tahun 2025
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1)	Persentase Warga Negara Korban bencana yang	<i>Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan layanan penyediaan</i>	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan	- Untuk pelaksanaan kegiatan fisik Pembangunan Rumah Korban Bencana Tidak teralokasikan dalam

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2025	SUMBER DATA	KETERANGAN
			Memperoleh Rumah Layak Huni	$\frac{\text{rumah layak huni dan reabilitasi rumah pada tahun } N}{\text{-----}} \times 100\%$ <p><i>Jumlah rencana warga negara korban bencana provinsi yang akan ditangani pada tahun N</i></p>		Perumahan Rakyat	Dokumen DPA Dinas PUPR Tahun 2025; - Perlu disampaikan bahwa intervensi kegiatan yang berkaitan dengan indikator ini yakni kegiatan perencanaan identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi di kabupaten Kupang, TTU, Flores Timur, Sikka, Lembata dan Belu
		2)	Persentase Warga Negara yang terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas penyediaan Rumah yang Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Warga negara terkena relokasi program provinsi yang mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni pada tahun } N}{\text{-----}} \times 100\%$ <p><i>Jumlah rencana warga negara terkena relokasi program provinsi yang akan ditangani pada tahun N</i></p>	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	- Untuk pelaksanaan kegiatan fisik Pembangunan Rumah Korban Bencana Tidak teralokasikan dalam Dokumen DPA Dinas PUPR Tahun 2025; - Perlu disampaikan bahwa intervensi kegiatan yang berkaitan dengan indikator ini yakni kegiatan perencanaan identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi di kabupaten Kupang, TTU, Flores Timur, Sikka, Lembata dan Belu
		3)	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh 10 -15 Ha yang ditangani tahun } N}{\text{-----}} \times 100\%$	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perlu disampaikan bahwa intervensi kegiatan yang berkaitan dengan indikator ini yakni kegiatan Perencanaan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2025	SUMBER DATA	KETERANGAN
				<i>Target luas kawasan kumuh 10 – 15 ha pada tahun N</i>			Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan / Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
3.	Pertanahan	1)	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	<i>Luas tanah yangtelah bersertifikat dalam penugasan pemerintah daerah</i> ----- x 100% <i>Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset pemerintah daerah</i>	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tidak teralokasikan dalam Dokumen DPA Dinas PUPR Tahun 2025
		2)	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	<i>Luas Rencana Pola Ruang yang Telah Terwujud Pada Kondisi Eksisting</i> -----x100% <i>Luas Rencana Pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah</i>	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tidak teralokasikan dalam Dokumen DPA Dinas PUPR Tahun 2025


 Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT
D. Benyamin Nahak, MT
 Pembina Utama Muda/IVc
 NIP. 19710428 199903 1 008



PEMERINTAH NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama, Telp. /Fax :-

**IUMLAH TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH PROVINSI
YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

Format Data Pendukung
Pembilang
BKK 1.c6

NO	NAMA	JENIS PELATIHAN	KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	NO SERTIFIKAT DAN PENERBIT	KETERANGAN
1	MARCHNINTH AGUSTIN PEDELATI, ST	-	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
2	RUBEN OCTAVIANUS, ST	PENGAWASAN TEKNIK JALAN DAERAH DI KABUPATEN ENDE, NGADA DAN NAGEKEO	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
3	ROSWITA DHIMA WEA, S.Ars	BELANJA JASA KONSULTAN PERENCANAAN GEDUNG KANTOR PERPUSTAKAAN KABUPATEN MALAKA TA. 2023	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
4	YACOBUS ADI KLAU, ST	REHABILITASI SARANA PRASARANA PROVINSI NTT 7	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
5	BENEDICTUS, ST	PENGAWASAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU TUNBAEN	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
6	JUNINHO ROY RINALDO FALO. S.Ars	PEMBANGUNAN GEDUNG MASJID K. H. AHMAD DAHLAN	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
7	ANDI AGUNG WAHYU UTAMA, ST	-	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
8	SERGIUS MARKUS KEO, ST	-	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
9	VINSENSIUS ANTONI MARE GOA MINGGU, ST	RUMAH TINGGAL	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
10	ANDREAS ADY KUDHI FERNANDEZ, ST	PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN TETAFF - SP.NIKI-NIKI	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
11	MARIO JACOBUS ELY MANAFE, ST	PRESERVASI RUAS JALAN PEPELA-SP. OLAFULHAA-PANTE BARU DAN SP. OLAFULHAA-BA'A	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
12	LEKSI FOREMAN GIRI, ST	-	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
13	JECHY THOMYSON PAH, ST	-	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
14	ARIF RAHMAN SELY, ST	PENGAWASAN JALAN PAKET 4	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
15	DONNY RIHI BIHA, ST	-	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
16	VICTOR SOLEMAN MOEDA, ST	-	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
17	REYNALDO SEPTIAN BIRE, S.Tr.-T	PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU MIIN MANGGARAI BARAT	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
18	AFRELY ARIADI RIWU DAKE, ST	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KAWASAN INDUSTRI BOLOK	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
19	UMBU DHARMA BARTIMEUS MARAWALI, ST	-	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
20	GEOVANI RICKY SAMARA, S. Ars	PENGAWASAN TEKNIS JALAN T.A 2022 (DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN)	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
21	AURELIUS ROBERTO NGARU, ST	PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN MANIKIN DI KABUPATEN KUPANG	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
22	JECK GOMES DAOK, ST	PENGAWASAN PEMBANGUNAN SDN ANGKASA	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
23	JOAO CARLOS DA SILVA, S.ARS	PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU BESERTA PERABOTNYA SMK MOLLO UTARA DAN SMK TUNJA KAB. TTS	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
24	YOHANES LUIS PESTA, ST	-	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
25	FEBRIANI ZESA TETI, ST	PEMBANGUNAN EMBUNG KELURAHAN RITAEBANG KECAMATAN SOLOR BARAT KAB. SUMBA TIMUR	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
26	MELDI ALVIONITA FINMETA, S.Ars	-	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
27	YAKOBUS ADRIAN RICARDO HAYONG, ST	BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN KONTRAKTUAL (DAK-REGULER)	SIPIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	

28	NOVRI NGGABA YANI, S.PD.,GR	SANIMAS	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
29	DOMINGGUS HAUTEAS, ST	PENINGKATAN JALAN DENGAN KONSTRUKSI LAPEN LOKASI JALAN SUMBA RT.10 RW.03 KELURAHAN LASIANA KOTA KUPANG	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
30	YULIANUS NAHAK, ST	JASA KONSULTAN PENGAWASAN KEGIATAN REHABILITASI GEDUNG DPRD KOTA KUPANG	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
31	IECHLAS BERTOSIMO LADA, ST	IRIGASI WAE SESAP	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
32	JULIUS F. A. KOMPAS, ST	-	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
33	FREDIRIKUS EVANTINO TAE, ST	-	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
34	PETRUS AVELINDO BRIA, ST	-	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
35	SINCE DETA ADELFINA FALLO, ST	-	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
36	YOHANES PAULUS PATI HAYON, S.T	-	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
37	YANUARIUS MELDIUS RAI, S.ST	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR JAMKRIDA NTT	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
38	FAUJIA HAMID, S.Tr.T	-	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
39	DALEBEI NENSY HENDRIK, S.Tr.T	PENGAWASAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I PULO	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
40	REGINA NGGADAS, ST	-	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
41	ONKY ALEXANDER MBOOH, SST	-	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
42	WERENFRIDUS PANTOLA, ST	-	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
43	DELVI ORINCE BENU, S.ST	-	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
44	ROSALIA THERESIA MADO, S.Tr.T	-	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
45	WANI YONITA NOVITA FANGIDAE, S.Tr.T	-	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
46	GIDION APRIS TASUIB, S.Tr.T	PENGAWASAN TEKNIS REHABILITASI GEDUNG PUSKESMAS RITAEBANG	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
47	BAPA TOKAN ALOYSIUS, SST	PROYEK BENDUNGAN TEMEF PAKET 4	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
48	MARIA DENSIANA MITAN, ST	-	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
49	ADE GRAMINSE KOBY, ST	-	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
50	AYUB LADA, S.ST	-	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
51	RAYNALD BEAM NUBATONIS, S.Tr.T	PEMBANGUNAN PUSKESMAS PROTOTYPE BINAUS (DAK)	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
52	YOHANES WALTERIUS,ST	BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
53	PONTHY MANEK MBAU, ST	PENGAWASAN TEKNIK JALAN DAERAH DI KABUPATEN ENDE, NGADA DAN NAGEKEO	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
54	GREIS BRILLEN YOHANAN M. DETHAN, ST	-	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
55	HAFID TRI ARROSYAD, ST	PERENCANAAN REKONSTRUKSI PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN WAIWERANG - LITE - WAIWADAN	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
56	MEKSI ERWIN ROBINSON TUNGGGA		MANAJEMEN	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
57	YULIANUS NAHAK		MANAJEMEN	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
58	RICKO CHRISLYANTO BEBENGU		MANAJEMEN	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
59	ANDRIANY IMELDA OLI DOKO		MANAJEMEN	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
60	ANANIUS BAUK		MANAJEMEN	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
61	ARYANTO ANDRIANUS KOLLAWILA		MANAJEMEN	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
62	PELIPUS KIRE		MANAJEMEN	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
63	RIMALYA ARLITA LUSI		MANAJEMEN	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
64	ENGELBERTHA NOVIANI BRIA SERAN	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan di Sumba Timur (CK)	MANAJEMEN	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
65	NOVITA SILFIANI CHRISTINA	Penguatan Database dan Survy Kondisi Jalan	MANAJEMEN	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
66	I PUTU ARTAWAN	PW 01 – Pengawasan Teknik Penanganan Long Sement Jalan DAK Non Tematik	MANAJEMEN	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
67	ESPERANCA NADYA SHERAFINE RIWU		MANAJEMEN	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
68	CAESARINA KARMELITA DEO	RUMAH SUSUN BRIMOB POLDA NTT	MANAJEMEN	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
69	YOHANES BARIPRIMA FETO WEA		SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
70	VIANA NATALIA RAHMAT	REHABILITASI RUMAH DINAS SDK KALELAPA	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
71	FERRY FERDINAND PANDIE		SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
72	VALERIANUS NAITILU	Pengawasan Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
73	REINHARD TAMBUNAN		SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
74	DAMELHART SAMUEL THOBI AY	PENGAWASAN PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG MULTIFUNGSI FKIP UNDANA KUPANG	SIPIIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	

75	FREDERIKUS AMARAL		SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
76	MARIA DORTIA ADICITA LAMAKEY		SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
77	LEXY BULAKH, ST		SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
78	YUSTINUS AKITO SERAN		SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
79	GIDION APRIS TASUIB		SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
80	ADRIANUS PALA TEGU		SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
81	MAKSIMILIANUS DODI RAU		SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
82	DAVID SERU SENGI	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Ruang UKS TK Negeri Nagerawe	SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
83	ARNOLDUS ARYANTO PUIAI		SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
84	ORGELO DE CARMO SEBASTIAO		SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
85	FRANSISKA CHRISTINONSA NOVELITA HARMANS	JASA KONSULTASI PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/REHABILITASI JALAN (DAK TEMATIK PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN ELEKTRIFIKASI DI DAERAH AFIRMASI)	SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
86	KENI RICHARD LUSI		SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
87	CHRISTANTO MARIANO WODHA RASSY		SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
88	FABIOLA ESPIRITU SANTO		SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
89	ALEXANDER SNON TULASI	PW-01 Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Non Tematik (Kab.Kupang, Belu dan TTU)	SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
90	YOHANES ULRIKH ARBAN	Jasa Konsultansi Peningkatan Jalan Desa Strategis Manikin Desa Letmafo	SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
91	ANGELINA		SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
92	UMBU DHARMA B. MARAWALI		SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
93	MARTHINI SEPTIANI FANGGI	PENINGKATAN RUAS JALAN MOKDALE - SANGGAOEN SLB (LAPEN)	SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
94	SUSTEN MELIANUS PUAY	Pengawasan Teknik Pengawasan Long Segmen Jalan DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
95	YOHANES GASPAR NAHAK	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Haji Umroh Terpadu (PLHUT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur	SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
96	Ambrosius Kedati, ST	Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Lembor di Kab. Manggarai Barat	SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
97	MELCHIOR KASE, S.Tr.T	SUPERVISI REHABILITASI BENDUNG DAN JARINGAN IRIGASI D.I TILONG DI KABUPATEN KUPANG	SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
98	AMELIA PUTRI MARLENI LOLOWANG, ST.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG RKB MTsN 2 LEMBATA	SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
99	Ir. ANGELINA, S.T.	Jasa Konsultan Pengawasan SMK SWASTA NYURA LELE Kab. Sumba Barat Daya	SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
100	Anselmus Avelino Witak, S.T.	Peningkatan Jalan Nenuk - Dafala	SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
101	Benny tua siahaan.,ST.,MT	pengawasan konstruksi pembangunan gedung kuliah bersama politeknik manufaktur negeri bangsa belitung	SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
102	CHARMELIO LEO S.Ars	Pembangun ruang laboratorium komputer beserta perabotnya . SDK Besikam II	SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
103	CHRISTINE DIANA FRANS, ST	PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG BANGUNAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGADA	SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
104	EKA SUDIYANTO, S.Pd	Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru SMK Negeri Talibura	SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
105	FERRY ANTHONIUS SMAUTO NATAOEN, ST	PEMBANGUNAN GEREJA SILO	SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
106	FRIDOLIN JHON LAKAAILA, S.Tr.T	Perencanaan SID Air Minum Paket 2	SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
107	JEAN TEORISCA R N BLEGUR, ST	Pengawasan Pembangunan Gedung Serbaguna	SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
108	KRISOLIT NOMENSEN LAY, S.Pd	DAK 2023	SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
109	LUDY AGUS SETYAWAN, ST	Pengawasan Pembangunan Pagur Depan	SIPIL	AHLI	XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	

110	Maria Yulanda kofi, ST	Manajemen Konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Prov.NTT	SIPIIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
111	PATRA STEFANUS ONESIMUS GUMAY, ST.	Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Rafee	SIPIIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
112	QUINTHERESZ PARIAMALINYA, ST	Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa	SIPIIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
113	Regina Dwiyanti Daro, S.Ars	PENGAWASAN LANJUTAN PEMBANGUNAN RUANG UKS T. NEGERI NAGERAWA	SIPIIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
114	Jevon Tapatfeto, ST	Rekonstruksi Ruas Jalan Oeoh Ayotuas (Tambahkan DID)	SIPIIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
115	Oktaviani Nenabu, SST	Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kapan-Nenas Kabupaten TTS	SIPIIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
116	Randy Kristovandy Tanesia, ST	Rekonstruksi Ruas Jalan Tumu - Kolbano	SIPIIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
117	ROSALINA TIKU, ST	PENINGKATAN RUAS JALAN HOINENO NUNKOLO	SIPIIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
118	ASISI HAPPY KURNIAWAN, S.T., M.T.	NEW CONSTRUCTION OF OFFICE BUILDING OF MINISTRY OF STATE ADMINISTRATION - MANATUTO MUNICIPALITY	MANAJEMEN	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
119	Denny Aditio Liunima, S.T	-	MANAJEMEN	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
120	FRANS HENDRIK MONE, SE	FUNGSIONAL UMUM DINAS	MANAJEMEN	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
121	HAFID TRI ARROSYAD S.T.	REVITALISASI TERMINAL TYPE A BIMOKU KUPANG NTT	MANAJEMEN	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
122	Hiskia K. Mesdila, ST	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	MANAJEMEN	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
123	JOHANES HARDINI JEDARUS,ST	Pengawasan Teknik Jalan Daerah di Kabupaten Flores Timur dan Lembata	MANAJEMEN	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
124	MARLINA KRISTINA SURYANTI LUBIS, ST	Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah NTT 8	MANAJEMEN	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
125	MAXIMILIAN PEDRICO TOLA, SE	FUNGSIONAL UMUM DINAS PUPR PROVINSI NTT	MANAJEMEN	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
126	Meldi Alvionita Finmeta, S.Ars	-	MANAJEMEN	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
127	Patricia Angelina Lamak, S.Tr.T	BSPS	MANAJEMEN	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
128	STANLEY YOSIA LENGGU ST.	Supervisi Pembangunan jaringan irigasi air tanah dan air baku perpipaan sprinkler di kabupaten Belu	MANAJEMEN	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
129	YOHANES RUSDIYANTO DJERAMU, ST	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR LL DIKTI WILAYAH XV	MANAJEMEN	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
130	INDRIANI MARINA MAGDALEN LESIK, S.Tr.T	Supervisi Penanganan Akibat Bencana Badai Siklon Tropis Seroja Pada Daerah Irigasi Malaka Di Kabupaten Malaka	SIPIIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
131	Valentinus Nine, ST	Peningkatan Jaringan Irigasi Di Nesam	SIPIIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
132	YACOBUS ADI KLAU,ST	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	SIPIIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
133	YULIANA PAULIN RESIONA	PEMBANGUNAN LANJUTAN REHABILITASI STADION OEPOI KOTA KUPANG TAHAP II	SIPIIL	AHLI		XXXXX XXXX.XX X 000XXXXX 2024	
134	ABSALOM KORNELIS BAUNG	DARING	MANAJEMEN PELAKSANAAN	AHLI MUDA	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	74321 2263.02 7 00000646 2025	LPJK
135	AGUSTINUS LOUDOWYK HENUK	DARING	SIPIIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG	74321 2142.02 7 00072236 2025	LPJK
136	AGUSTINUS NENO	DARING	MANAJEMEN PELAKSANAAN	AHLI MUDA	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	74321 2263.02 7 00000645 2025	LPJK
137	CHRISANTA AYU DWI NOVITRI LAY	DARING	SIPIIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK JALAN	74321 2142.03 7 00072231 2025	LPJK
138	FEBRIANI ZESA TETI	DARING	MANAJEMEN PELAKSANAAN	AHLI MUDA	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	74321 2263.02 7 00000641 2025	LPJK
139	FRANSISKUS SURYA NANA	DARING	MANAJEMEN PELAKSANAAN	AHLI MUDA	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	74321 2263.02 7 00000644 2025	LPJK
140	FRIDUS TAEK	DARING	SIPIIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG	74321 2142.02 7 00072221 2025	LPJK
141	HOTDI MARINGAN TUA TARIHORAN	DARING	SIPIIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG	74321 2142.02 7 00072224 2025	LPJK

142	LEONARDO THIAZANO SOGEN	DARING	MANAJEMEN PELAKSANAAN	AHLI MUDA	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	74321 2263.02 7 00000643 2025	LPJK
143	MARGARITHA PRISILIA RIANI INNASARI DORA	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG	74321 2142.02 7 00072223 2025	LPJK
144	MARIA CHERYLINA SANI	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK SDA	74321 2142.08 7 00072180 2025	LPJK
145	MARTINUS HOME HOKON	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG	74321 2142.02 7 00072235 2025	LPJK
146	MELFI YAN UN	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK SDA	74321 2142.08 7 0007 2182 2025	LPJK
147	RAYNOLDUS NDUN	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG	74321 2142.02 7 00072228 2025	LPJK
148	ROBERT ARIS PRATAMA LEWO, ST	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK SDA	74321 2142.08 7 00072181 2025	LPJK
149	SONNY REINCE SAERANG	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK SDA	74321 2142.08 7 00072233 2025	LPJK
150	YAPI PAULUS NDOLU	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG	74321 2142.02 7 00072226 2025	LPJK
151	YUTANTINUS ADRIAN RADJA SEMIUN	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK SDA	74321 2142.08 7 00072232 2025	LPJK
152	OCTOVIANUS GILBERT PO'ONG	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG	74321 2142.02 7 00072227 2025	LPJK
153	DOMINIKUS KARINTUS PATTY	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK SDA	74321 2142.08 7 00072122 2025	LPJK
154	GREGORIUS A. G. BLIKOLOLONG	DARING	MANAJEMEN PELAKSANAAN	AHLI MUDA	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	74321 2263.02 7 00000640 2025	LPJK
155	IRWAN ARDANA	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG	74321 2142.02 7 00072225 2025	LPJK
156	MABSAM MESYMA YERI NENOBESI	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK SDA	74321 2142.08 7 00072121 2025	LPJK
157	MARDI JACKSON EDISON KALE	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG	74321 2142.02 7 00072222 2025	LPJK
158	YAN ARKILAUS TETI NAHAK	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK JALAN	74321 2142.03 7 00072230 2025	LPJK
159	CORINNA BENITA MANAFE	DARING	MANAJEMEN PELAKSANAAN	AHLI MUDA	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	74321 2263.02 7 000006452 2025	LPJK
160	MELKIANUS DORI KEDATI	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG	74321 2142.02 7 00072234 2025	LPJK
161	YUSUF YERMIAS MOLA	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG	74321 2142.02 7 00072229 2025	LPJK
162	MARSELINUS SENISON	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA PERENCANAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN	74321 2142.08 7 00077124 2025	LPJK
163	KRISTIANUS BANI M. GHOLO	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	PELAKSANA KONSTRUKSI BANGUNAN UNIT PRODUKSI SPAM	74321 1323.01 7 00077125 2025	LPJK
164	KRISTOFORUS DHAPO	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG	74321 2142.02 7 00077113 2025	LPJK
165	DON BOSKO TAU	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG	74321 2142.02 7 00077115 2025	LPJK
166	FRANSISKUS SONNY DA COSTA	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG	74321 2142.02 7 00077117 2025	LPJK
167	ANDRIANUS TUKAN	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG	74321 2142.02 7 00077118 2025	LPJK
168	ARIFANDI KURNIAWAN	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG	74321 2142.02 7 00077119 2025	LPJK
169	MARSELINUS PADHI PI	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG	74321 2142.02 7 00077120 2.25	LPJK
170	WIGBERTUS GOA PANDA	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG	74321 2142.02 7 0007116 2025	LPJK
171	FRANSISKUS BENEDIKTUS NANGGE	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG	74321 2142.02 7 00077114 2025	LPJK
172	WILHELMUS WAE	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA JALAN	74321 2142.03 7 00077123 2025	LPJK

173	PASKALIS K. DHAE WARA	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA JALAN	74321 2142.03 7 00077122 2025	LPJK
174	GEGA INDAH ARISTIKA	DARING	MANAJEMEN PELAKSANAAN	AHLI MUDA	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	74321 2263.02 7 00001988 2025	LPJK
175	YOSEF SATRIA BUDI	DARING	MANAJEMEN PELAKSANAAN	AHLI MUDA	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	74321 2263.02 7 00001985 2025	LPJK
176	YAKOBUS FRET MADO DONI	DARING	MANAJEMEN PELAKSANAAN	AHLI MUDA	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	74321 2263.02 7 00001993 2025	LPJK
177	MOSES RIKARDUS WEO SETO	DARING	MANAJEMEN PELAKSANAAN	AHLI MUDA	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	74321 2263.02 7 00001994 2025	LPJK
178	REINARDUS SANTOSI ANGKASA	DARING	MANAJEMEN PELAKSANAAN	AHLI MUDA	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	74321 2263.02 7 00001995 2025	LPJK
179	RAINERD BERNABAS JELLA	DARING	MANAJEMEN PELAKSANAAN	AHLI MUDA	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	74321 2263.02 7 00001992 2025	LPJK
180	PETRUS DJONE DJAWA	DARING	MANAJEMEN PELAKSANAAN	AHLI MUDA	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	74321 2263.02 7 00001986 2025	LPJK
181	LAURENTIUS DHANGANG	DARING	MANAJEMEN PELAKSANAAN	AHLI MUDA	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	74321 2263.02 7 00001989 2025	LPJK
182	LUCKY ARPANDY YOHANES	DARING	MANAJEMEN PELAKSANAAN	AHLI MUDA	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	74321 2263.02 7 00001990 2025	LPJK
183	MARSELINA YOHANA RAWI	DARING	MANAJEMEN PELAKSANAAN	AHLI MUDA	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	74321 2263.02 7 00001991 2025	LPJK
184	BERTELOMEUS MBABHO MULU	DARING	MANAJEMEN PELAKSANAAN	AHLI MUDA	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	74321 2263.02 7 00001987 2025	LPJK
185	ERNESTINA EMBU NGERA	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA TEKNIK JEMBATAN	74321 2142.06 7 00077126 2025	LPJK
186	FRANSISCO RYAN ARYANTO SEMA WALA	DARING	SIPIL	AHLI MUDA	AHLI MUDA PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG	74321 2142.02 7 00077121 2025	LPJK
JUMLAH		186 Orang					





PEMERINTAH NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama, Telp. /Fax :-

**JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI YANG TERLIBAT DALAM
KEGIATAN KONSTRUKSI PEMERINTAH PROVINSI
TAHUN 2025**

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.c.6

NO	PROYEK KONSTRUKSI APBD DAN NON APBD	JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI		KETERANGAN
		TENAGA AHLI	JUMLAH PROYEK	
1	Proyek Konsultasi Perencanaan	360	90	1 Proyek membutuhkan maksimal 4 Tenaga Ahli
2	Proyek Konstruksi	1160	232	1 Proyek membutuhkan maksimal 5 Tenaga Ahli
3	Proyek Konsultasi Pengawasan	416	104	1 Proyek membutuhkan maksimal 4 Tenaga Ahli
JUMLAH		1936	426	

Catatan:

- 1). Total seluruh kebutuhan TA konstruksi Adalah **1.936 orang**
- 2). Sampai dengan tahun 2023, jumlah yang telah tersertifikasi sebanyak **1.263 orang**
- 3). Jika memperhatikan periode RPD 2024-2026, jumlah yang sudah tersertifikasi adalah 133 orang (2024) + 53 orang (2025) = **186 orang**
- 4) secara keseluruhan total jumlah kebutuhan tenaga ahli yang belum tersertifikasi di wilayah provinsi adalah $1936 - 1.263 \text{ orang} = 673 \text{ orang}$





PEMERINTAH NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama, Telp. /Fax :-

PANJANG JALAN KEWENANGAN PROVINSI (KM)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.c.2

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG SESUAI SK (KM)	PANJANG TIAP KONDISI (KM)								
				BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		
				KM	%	KM	%	KM	%	KM	%	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. KOTA KUPANG												
1	5371001 K	Jl. Yos Sudarso	3.89	0.99	25.45	2.60	66.84	0.30	7.71	-	-	
2	5371002 K	Sp. Tiga Terminal LLBK - Sp. Tiga Straat A	2.13	-	-	1.83	85.92	0.30	14.08	-	-	
3	5371003 K	Sp. Patung Sonbai - Sp. Tiga Bundaran Oebufu	5.10	4.20	82.35	0.20	3.92	0.70	13.73	-	-	
4	5371004 K	Jl. Frans Lebu Raya	2.55	2.55	100.00	-	-	-	-	-	-	
5	5371005 K	Jl. Mesakh Amalo	0.84	0.74	88.10	-	-	0.10	11.90	-	-	
6	5371006 K	Sp. Patung Sonbai - Bello (Bts. Kab. Kupang)	9.74	6.70	68.79	2.14	21.97	0.70	7.19	0.20	2.05	
7	5371007 K	Jl. A. Nisoni	6.62	3.82	57.70	2.40	36.25	0.40	6.04	-	-	
8	5371008 K	Sp. Polda - Sp. Patung Merpati	8.06	6.76	83.87	1.10	13.65	0.20	2.48	-	-	
9	5371009 K	Jl. Amabi	2.27	2.07	91.19	0.20	8.81	-	-	-	-	
		JUMLAH	41.20	27.83	67.55	10.47	25.41	2.70	6.55	0.20	0.49	
B. KABUPATEN KUPANG												
1	5303010	Jl. Dalam K.I. Bolok	1.80	1.80	100.00	-	-	-	-	-	-	
2	5303011	Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong	17.40	7.10	40.80	4.10	23.56	5.80	33.33	0.40	2.30	
3	5303012	Oelomin (Bts. Kota Kupang) - Baun	15.10	8.50	56.29	1.40	9.27	3.10	20.53	2.10	13.91	
4	5303013	Baun - Ekam	20.43	1.83	8.96	0.10	0.49	4.90	23.98	13.60	66.57	
5	5303014	Oesao - Buraen	24.48	19.38	79.17	5.10	20.83	-	-	-	-	
6	5303015	Oekabiti - Oemoro (Bts. Kab. TTS)	55.10	20.10	36.48	19.60	35.57	5.70	10.34	9.70	17.60	
7	5303016	Oelmasi - Sp. Sulamu	27.80	13.50	48.56	10.90	39.21	3.00	10.79	0.40	1.44	
8	5303017	Sp. Sulamu - Barate	13.00	9.00	69.23	3.00	23.08	0.60	4.62	0.40	3.08	
9	5303018	Barate - Manubelon	36.90	29.20	79.13	1.10	2.98	2.80	7.59	3.80	10.30	
10	5303019	Manubelon - Naikliu	36.40	9.40	25.82	0.80	2.20	11.00	30.22	15.20	41.76	
11	5303020	Naikliu - Oepoli (Bts. Negara)	27.90	7.60	27.24	0.30	1.08	5.40	19.35	14.60	52.33	
12	5303021	Netemnanu (Bts. Kab. TTS) - Sp. Noelelo	1.03	1.03	100.00	-	-	-	-	-	-	
13	5303022	Bokong - Lelogama	44.30	41.00	92.55	3.10	7.00	0.10	0.23	0.10	0.23	
14	5303023	Hansisi - Oesalaen	38.52	16.02	41.59	3.30	8.57	0.80	2.08	18.40	47.77	
		JUMLAH	360.16	185.46	51.49	52.80	14.66	43.20	11.99	78.70	21.85	
C. KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN												
1	5304024	Pollo (Bts. Kab. TTS) - Sp. Panite	3.10	3.10	100.00	-	-	-	-	-	-	
2	5304025	Batu Putih - Panite	22.23	9.70	43.63	5.93	26.68	6.60	29.69	-	-	
3	5304026	Panite - Kolbano	47.88	29.38	61.36	9.40	19.63	8.00	16.71	1.10	2.30	
4	5304027	Kolbano - Bokong	51.76	25.26	48.80	18.10	34.97	6.50	12.56	1.90	3.67	
5	5304028	Bokong - Skinu (Bts. Kab. Malaka)	9.15	1.80	19.67	4.90	53.55	2.05	22.40	0.40	4.37	
6	5304029	Soe - Kapan	16.80	16.80	100.00	-	-	-	-	-	-	
7	5304030	Kapan - Nenas	25.75	8.20	31.84	5.40	20.97	0.80	3.11	11.35	44.08	

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG SESUAI SK (KM)	PANJANG TIAP KONDISI (KM)							
				BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
				KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	5304031	Nenas - Nuapain (Bts. Kab. Kupang)	20.30	0.97	4.78	-	-	-	-	19.33	95.22
9	5304032	Kapan - Fatumnutu (Bts. Kab. TTU)	23.43	5.13	21.90	5.70	24.33	3.20	13.66	9.40	40.12
10	5304033	Sp. Niki-niki - Oenlasi	19.45	4.80	24.68	6.95	35.73	4.50	23.14	3.20	16.45
11	5304034	Oenlasi - Boking	30.92	18.20	58.86	2.32	7.50	0.40	1.29	10.00	32.34
		IUMLAH	270.77	123.34	45.55	58.70	21.68	32.05	11.84	56.68	20.93
D. KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA											
1	5305035	Lemon (Bts. Kab. TTS) - Kefamenanu	36.85	12.55	34.06	13.10	35.55	8.30	22.52	2.90	7.87
2	5305036	Eban - Sp. Saenam	5.36	0.08	1.49	1.095	20.43	0.955	17.817	3.23	60.26
3	5305037	Maubesi - Sp. Manamas	33.48	0.90	2.69	4.10	12.25	24.78	74.01	3.70	11.05
4	5305038	Keliting (Bts. Kab. Belu) - Wini Sakato (Bts. Negara)	47.83	23.20	48.51	14.43	30.17	10.00	20.91	0.20	0.42
		IUMLAH	123.52	36.73	29.74	32.725	26.49	44.035	35.650	10.03	8.12
E. KABUPATEN BELU											
1	5306039	Teun (Bts. Kab. Malaka) - Halilulik	16.60	5.30	31.93	2.60	15.66	5.30	31.93	3.40	20.48
2	5306040	Atambua - Sp. Manleten	13.37	13.17	98.50	-	-	-	-	0.20	1.50
3	5306041	Sp. Dualasi - Weluli	10.37	9.00	86.79	1.20	11.57	0.07	0.68	0.10	0.96
4	5306042	Lakafehan - Keliting (Bts. Kab. TTU)	5.25	5.25	100.00	-	-	-	-	-	-
5	5306043	Sp. Berluli - Teluk Gurita	6.14	5.44	88.60	0.40	6.51	-	-	0.30	4.89
		IUMLAH	51.73	38.16	73.77	4.20	8.12	5.37	10.38	4.00	7.73
F. KABUPATEN MALAKA											
1	5321044	Lamea (Bts. Kab. TTS) - Wanibesak	10.18	0.30	2.95	7.18	70.53	2.60	25.54	0.10	0.98
2	5321045	Wanibesak - Betun	25.00	9.70	38.80	13.00	52.00	2.20	8.80	0.10	0.40
3	5321046	Betun - Motamasin (Bts. Negara)	30.06	8.20	27.28	10.26	34.13	9.50	31.60	2.10	6.99
4	5321047	Sp. Welaus - Kusa (Bts. Kab. Belu)	20.57	11.67	56.73	1.90	9.24	3.20	15.56	3.80	18.47
		IUMLAH	85.81	29.87	34.81	32.34	37.69	17.50	20.39	6.10	7.11
G. KABUPATEN ROTE NDAO											
1	5314048	Baa - Batutua	27.82	5.10	18.33	8.40	30.19	8.80	31.63	5.52	19.84
		IUMLAH	27.82	5.10	18.33	8.40	30.19	8.80	31.63	5.52	19.84
H. KABUPATEN SABU RAIJUA											
1	5320049	Seba - Ege	15.82	8.30	18.33	2.90	52.47	2.00	12.64	2.62	16.56
2	5320050	Ledeana - Teriu	11.10	9.10	81.98	1.70	15.32	-	-	0.30	2.70
3	5320051	Ledemanu - Lobodei	16.61	11.61	69.90	1.30	7.83	1.60	9.63	2.10	12.64
		IUMLAH	43.53	29.01	66.64	5.90	13.55	3.60	8.27	5.02	11.53
I. KABUPATEN ALOR											
1	5307052	Kalabahi - Kokar	29.85	24.45	81.91	0.20	0.67	0.30	1.01	4.90	16.42
2	5307053	Kokar - Mali	28.30	19.04	67.28	-	-	0.08	0.28	9.18	32.44
3	5307054	Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben	37.20	34.60	93.01	0.60	1.61	0.10	0.27	1.90	5.11
4	5307055	Baranusa - Puntaru	13.30	0.40	3.01	2.50	18.80	0.40	3.01	10.00	75.19
5	5307056	Beangonong - Boloang	23.20	3.80	16.38	-	-	-	-	19.40	83.62
		IUMLAH	131.85	82.29	62.41	3.30	2.50	0.88	0.67	45.38	34.42
J. KABUPATEN SUMBA TIMUR											
1	5302057	Sp. Mohubukul - Lumbung	18.95	7.046	37.18	1.498	7.91	6.897	36.396	3.509	18.52
2	5302058	Melolo - Kananggar	49.05	37.10	75.64	0.90	1.83	0.10	0.20	10.95	22.32
3	5302059	Kananggar - Sp. Aukakehok	13.20	1.20	9.09	2.60	19.70	0.40	3.03	9.00	68.18
4	5302060	Sp. Aukakehok - Baing	48.81	7.81	16.00	4.60	9.42	0.20	0.41	36.20	74.17
5	5302061	Sp. Aukakehok - Sp. Lailunggi	32.55	10.50	32.26	11.60	35.64	-	-	10.45	32.10

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG SESUAI SK (KM)	PANJANG TIAP KONDISI (KM)							
				BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
				KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	5302062	Sp. Lailunggi - Malahar	42.66	-	-	4.56	10.69	3.40	7.97	34.70	81.34
7	5302063	Malahar - Praipaha	53.33	4.45	8.34	16.73	31.37	4.50	8.44	27.65	51.85
		IUMLAH	258.55	68.11	26.34	42.49	16.43	15.50	5.99	132.46	51.23
K. KABUPATEN SUMBA TENGAH											
1	5316064	Weeluri (Bts. Kab. Sumba Barat) - Mamboro	23.70	6.60	27.85	12.00	50.63	3.90	16.46	1.20	5.06
		IUMLAH	23.70	6.60	27.85	12.00	50.63	3.90	16.46	1.20	5.06
L. KABUPATEN SUMBA BARAT											
1	5301065	Waikabubak - Tana Rara (Bts. Kab. Sumba Tengah)	13.78	10.20	74.02	1.80	13.06	1.58	11.47	0.20	1.45
2	5301066	Waikabubak - Wanokaka	14.93	6.10	40.86	3.70	24.78	2.73	18.29	2.40	16.08
3	5301067	Sp. Padedeweri - Sp. Patiala	15.22	4.40	28.91	8.62	56.64	1.60	10.51	0.60	3.94
4	5301068	Sp. Patiala - Wetana (Bts. Kab. Sumba Barat Daya)	31.73	17.44	54.96	1.80	5.67	2.48	7.82	10.01	31.55
		IUMLAH	75.66	38.14	50.41	15.92	21.04	8.39	11.09	13.21	17.46
M. KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA											
1	5317069	Karang Indah (Bts. Kab. Sumba Barat) - Bondokodi	22.50	21.10	93.78	0.30	1.33	1.10	4.89	-	-
2	5317070	Bondokodi - Waitabula	32.88	27.319	83.09	2.80	8.52	2.561	7.789	0.200	0.61
3	5317071	Radamata - Ketewer	15.25	12.55	82.30	1.90	12.46	0.80	5.25	-	-
		IUMLAH	70.63	60.97	86.32	5.00	7.08	4.46	6.32	0.20	0.28
N. KABUPATEN MANGGARAI BARAT											
1	5315072	Sp. Ngorang - Sp. Terang	32.90	30.10	91.49	2.08	6.32	0.10	0.30	0.62	1.88
2	5315073	Sp. Terang - Sp. Noa	23.40	21.60	92.31	1.40	5.98	0.10	0.43	0.30	1.28
3	5315074	Sp. Noa - Wontong (Bts. Kab. Manggarai)	25.20	23.98	95.16	0.10	0.40	-	-	1.12	4.44
4	5315075	Sp. Noa - Golowelu (Bts. Kab. Manggarai)	23.30	11.65	50.00	2.48	10.64	8.10	34.76	1.07	4.59
		IUMLAH	104.80	87.33	83.33	6.06	5.78	8.30	7.92	3.11	2.97
O. KABUPATEN MANGGARAI											
1	5313076	Nggalak (Bts. Kab. Manggarai Barat) - Kedindi	30.30	8.828	29.14	3.922	12.94	17.55	57.92	-	-
2	5313077	Reo - Wae Gongger (Bts. Kab. Manggarai Timur)	0.60	0.60	100.00	-	-	-	-	-	-
3	5313078	Sp. Cumbi - Iteng	40.72	18.363	45.10	7.88	19.35	4.60	11.30	9.877	24.26
		IUMLAH	71.62	27.79	38.80	11.80	16.48	22.15	30.93	9.88	13.79
P. KABUPATEN MANGGARAI TIMUR											
1	5319079	Wae Gongger (Bts. Kab. Manggarai) - Pota	46.30	14.21	30.69	13.59	29.35	1.50	3.24	17.00	36.72
2	5319080	Pota - Labuan Kelambu (Bts. Kab. Ngada)	35.00	7.18	20.51	8.33	23.80	4.26	12.17	15.23	43.51
3	5319081	Bealaing - Wae Rasan (Bts. Kab. Ngada)	73.82	33.59	45.50	9.40	12.73	3.54	4.80	27.29	36.97
4	5319082	Borong - Nceang	24.52	23.32	95.11	1.20	4.89	-	-	-	-
5	5319083	Sp. Dangka Mangkang - Dampek	50.83	20.47	40.27	6.20	12.20	3.11	6.12	21.05	41.41
		IUMLAH	230.47	98.77	42.86	38.72	16.80	12.41	5.38	80.57	34.96
Q. KABUPATEN NGADA											
1	5312084	Mbazang (Bts. Kab. Manggarai Timur) - Sp. Waepana	35.92	10.10	28.12	8.92	24.83	12.80	35.63	4.10	11.41
2	5312085	Malanuz - Maumbawa (Bts. Kab. Nagekeo)	19.91	5.71	28.68	13.10	65.80	1.10	5.52	-	-
3	5312086	Labuan Kelambu (Bts. Kab. Manggarai Timur) - Riung	25.06	12.26	48.92	9.00	35.91	2.40	9.58	1.40	5.59
4	5312087	Riung - Poma	30.22	20.32	67.24	7.30	24.16	2.60	8.60	-	-
5	5312088	Poma - Bajawa	37.84	14.54	38.42	8.20	21.67	12.30	32.51	2.80	7.40
6	5312089	Riung - Lengkosambi (Bts. Kab. Nagekeo)	17.90	11.00	61.45	6.70	37.43	0.20	1.12	-	-
		IUMLAH	166.85	73.93	44.31	53.22	31.90	31.40	18.82	8.30	4.97
R. KABUPATEN NAGEKEO											
1	5318090	Nggolonio (Bts. Kab. Ngada) - Danga	18.80	15.70	83.51	2.60	13.83	0.50	2.66	-	-

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG SESUAI SK (KM)	PANJANG TIAP KONDISI (KM)							
				BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
				KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	5318091	Marapokot - Aeramo	6.66	5.16	77.48	1.20	18.02	-	-	0.30	4.50
3	5318092	Aeramo - Kaburea (Bts. Kab. Ende)	34.50	17.00	49.28	13.90	40.29	2.40	6.96	1.20	3.48
4	5318093	Maumbawa (Bts. Kab. Ngada) - Sp. Gako	29.72	15.70	52.83	12.32	41.45	1.10	3.70	0.60	2.02
		JUMLAH	89.68	53.56	59.72	30.02	33.47	4.00	4.46	2.10	2.34
S. KABUPATEN ENDE											
1	5311094	Kaburea (Bts. Kab. Nagekeo) - Ranakolo	37.24	16.14	43.34	11.40	30.61	5.10	13.69	4.60	12.35
2	5311095	Detusoko - Maurole	48.65	14.75	30.32	20.50	42.14	10.40	21.38	3.00	6.17
3	5311096	Maurole - Koro (Bts. Kab. Sikka)	41.15	10.90	26.49	22.05	53.58	5.30	12.88	2.90	7.05
4	5311097	Wologai - Detukeli	15.35	10.35	67.43	4.70	30.62	0.30	1.95	-	-
5	5311098	Ende - Nuabosi	7.85	4.40	56.05	0.65	8.28	1.50	19.11	1.30	16.56
		JUMLAH	150.24	56.54	37.63	59.30	39.47	22.60	15.04	11.80	7.85
T. KABUPATEN SIKKA											
1	5310099	Koro (Bts. Kab. Ende) - Maumere	36.58	16.98	46.42	19.10	52.21	0.20	0.55	0.30	0.82
2	5310100	Hepang - Sikka	8.65	5.35	61.85	-	-	2.90	33.53	0.40	4.62
3	5310101	Waepare - Bola	20.00	13.10	65.50	-	-	6.20	31.00	0.70	3.50
4	5310102	Napungmali - Mudajebak (Bts. Kab. Flores Timur)	25.70	21.80	84.82	-	-	0.30	1.17	3.60	14.01
		JUMLAH	90.93	57.23	62.94	19.10	21.01	9.60	10.56	5.00	5.50
U. KABUPATEN FLORES TIMUR											
1	5309103	Mudajebak (Bts. Kab. Sikka) - Wairunu	17.62	14.72	83.54	0.80	4.54	1.30	7.38	0.80	4.54
2	5309104	Larantuka - Watowiti	5.44	5.44	100.00	-	-	-	-	-	-
3	5309105	Watowiti - Waiklibang	25.00	16.60	66.40	1.20	4.80	2.00	8.00	5.20	20.80
4	5309106	Wailebe - Waiwerang	23.45	22.15	94.46	1.20	5.12	0.10	0.43	-	-
5	5309107	Wairwerang - Sp. Withiama	13.10	12.80	97.71	0.30	2.29	-	-	-	-
6	5309108	Sp. Kolilanang - Sagu	10.31	3.41	33.07	1.00	9.70	-	-	5.90	57.23
7	5309109	Ritaebang - Lamakera	46.65	35.65	76.42	3.40	7.29	0.90	1.93	6.70	14.36
		JUMLAH	141.57	110.77	78.24	7.90	5.58	4.30	3.04	18.60	13.14
V. KABUPATEN LEMBATA											
1	5308110	Balauring - Wairiang	20.52	15.92	77.58	0.90	4.39	1.50	7.31	2.20	10.72
2	5308111	Waijarang - Wulandoni	55.70	33.40	59.96	9.10	16.34	-	-	13.20	23.70
		JUMLAH	76.22	49.32	64.71	10.00	13.12	1.50	1.97	15.40	20.20
		TOTAL	2,687.31	1,346.85	50.12	520.37	19.36	306.64	11.41	513.46	19.11



Catatan :

1. Total Ruas Jalan Provinsi NTT Sebanyak 111 Ruas
2. Data ini merupakan hasil survey kondisi pada akhir tahun 2025 dan bersifat tentative karena akan dilakukan verifikasi oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur dan Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PU pada saat asistensi data teknis yang akan menjadi data final pada aplikasi SIPDJD



PANJANG JALAN KEWENANGAN PROVINSI (KM)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.c.2

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG SESUAI SK (KM)	PANJANG TIAP KONDISI (KM)				KET	
				MANTAP		TIDAK MANTAP			
				KM	%	KM	%		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
A. KOTA KUPANG									
1	5371001 K	Jl. Yos Sudarso	3.89	3.59	92.29	0.30	7.71		
2	5371002 K	Sp. Tiga Terminal LLBK - Sp. Tiga Straat A	2.13	1.83	85.92	0.30	14.08		
3	5371003 K	Sp. Patung Sonbai - Sp. Tiga Bundaran Oebufu	5.10	4.40	86.27	0.70	13.73		
4	5371004 K	Jl. Frans Lebu Raya	2.55	2.55	100.00	-	0.00		
5	5371005 K	Jl. Mesakh Amalo	0.84	0.74	88.10	0.10	11.90		
6	5371006 K	Sp. Patung Sonbai - Bello (Bts. Kab. Kupang)	9.74	8.84	90.76	0.90	9.24		
7	5371007 K	Jl. A. Nisnoni	6.62	6.22	93.96	0.40	6.04		
8	5371008 K	Sp. Polda - Sp. Patung Merpati	8.06	7.86	97.52	0.20	2.48		
9	5371009 K	Jl. Amabi	2.27	2.27	100.00	-	0.00		
		JUMLAH	41.20	38.30	92.96	2.90	7.04		
B. KABUPATEN KUPANG									
1	5303010	Jl. Dalam K.I. Bolok	1.80	1.80	100.00	-	0.00		
2	5303011	Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong	17.40	11.20	64.37	6.20	35.63		
3	5303012	Oelomin (Bts. Kota Kupang) - Baun	15.10	9.90	65.56	5.20	34.44		
4	5303013	Baun - Ekam	20.43	1.93	9.45	18.50	90.55		
5	5303014	Oesao - Buraen	24.48	24.48	100.00	-	0.00		
6	5303015	Oekabiti - Oemoro (Bts. Kab. TTS)	55.10	39.70	72.05	15.40	27.95		
7	5303016	Oelmasi - Sp. Sulamu	27.80	24.40	87.77	3.40	12.23		
8	5303017	Sp. Sulamu - Barate	13.00	12.00	92.31	1.00	7.69		
9	5303018	Barate - Manubelon	36.90	30.30	82.11	6.60	17.89		
10	5303019	Manubelon - Naikliu	36.40	10.20	28.02	26.20	71.98		
11	5303020	Naikliu - Oepoli (Bts. Negara)	27.90	7.90	28.32	20.00	71.68		
12	5303021	Netemnanu (Bts. Kab. TTS) - Sp. Noelelo	1.03	1.03	100.00	-	0.00		
13	5303022	Bokong - Lelogama	44.30	44.10	99.55	0.20	0.45		
14	5303023	Hansisi - Oesalaen	38.52	19.32	50.16	19.20	49.84		
		JUMLAH	360.16	238.26	66.15	121.90	33.85		
C. KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN									
1	5304024	Pollo (Bts. Kab. TTS) - Sp. Panite	3.10	3.10	100.00	-	0		
2	5304025	Batu Putih - Panite	22.23	15.63	70.31	6.60	29.69		
3	5304026	Panite - Kolbano	47.88	38.78	80.99	9.10	19.01		
4	5304027	Kolbano - Bokong	51.76	43.36	83.77	8.40	16.23		
5	5304028	Bokong - Skinu (Bts. Kab. Malaka)	9.15	6.70	73.22	2.45	26.78		
6	5304029	Soe - Kapan	16.80	16.80	100.00	-	0.00		
7	5304030	Kapan - Nenas	25.75	13.60	52.82	12.15	47.18		
8	5304031	Nenas - Nuapain (Bts. Kab. Kupang)	20.30	0.97	4.78	19.33	95.22		
9	5304032	Kapan - Fatumnutu (Bts. Kab. TTU)	23.43	10.83	46.22	12.60	53.78		
10	5304033	Sp. Niki-niki - Oenlasi	19.45	11.75	60.41	7.70	39.59		
11	5304034	Oenlasi - Bokong	30.92	20.52	66.36	10.40	33.64		
		JUMLAH	270.77	182.04	67.23	88.73	32.77		
D. KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA									
1	5305035	Lemon (Bts. Kab. TTS) - Kefamenanu	36.85	25.65	69.61	11.20	30.39		
2	5305036	Eban - Sp. Saenam	5.36	1.18	21.92	4.185	78.08		
3	5305037	Maubesi - Sp. Manamas	33.48	5.00	14.93	28.48	85.07		
4	5305038	Keliting (Bts. Kab. Belu) - Wini Sakato (Bts. Negara)	47.83	37.63	78.67	10.20	21.33		
		JUMLAH	123.52	69.46	56.23	54.065	43.77		
E. KABUPATEN BELU									
1	5306039	Teun (Bts. Kab. Malaka) - Halilulik	16.60	7.90	47.59	8.70	52.41		
2	5306040	Atambua - Sp. Manleten	13.37	13.17	98.50	0.20	1.50		
3	5306041	Sp. Dualasi - Weluli	10.37	10.20	98.36	0.17	1.64		
4	5306042	Lakafehan - Keliting (Bts. Kab. TTU)	5.25	5.25	100.00	-	0.00		
5	5306043	Sp. Berluli - Teluk Gurita	6.14	5.84	95.11	0.30	4.89		
		JUMLAH	51.73	42.36	81.89	9.37	18.11		
F. KABUPATEN MALAKA									
1	5321044	Lamea (Bts. Kab. TTS) - Wanibesak	10.18	7.48	73.48	2.70	26.52		
2	5321045	Wanibesak - Betun	25.00	22.70	90.80	2.30	9.20		
3	5321046	Betun - Motamasin (Bts. Negara)	30.06	18.46	61.41	11.60	38.59		
4	5321047	Sp. Welaus - Kusa (Bts. Kab. Belu)	20.57	13.57	65.97	7.00	34.03		
		JUMLAH	85.81	62.21	72.50	23.60	27.50		
G. KABUPATEN ROTE NDAO									
1	5314048	Baa - Batutua	27.82	13.50	48.53	14.32	51.47		
		JUMLAH	27.82	13.50	48.53	14.32	51.47		
H. KABUPATEN SABU RAIJUA									
1	5320049	Seba - Ege	15.82	11.20	70.80	4.62	29.20		
2	5320050	Ledeana - Terju	11.10	10.80	97.30	0.30	2.70		
3	5320051	Ledemanu - Lobodei	16.61	12.91	77.72	3.70	22.28		

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG SESUAI SK (KM)	PANJANG TIAP KONDISI (KM)				KET	
				MANTAP		TIDAK MANTAP			
				KM	%	KM	%		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
		IUMLAH	43.53	34.91	80.20	8.62	19.80		
I. KABUPATEN ALOR									
1	5307052	Kalabahi - Kokar	29.85	24.65	82.58	5.20	17.42		
2	5307053	Kokar - Mali	28.30	19.04	67.28	9.26	32.72		
3	5307054	Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben	37.20	35.20	94.62	2.00	5.38		
4	5307055	Baranusa - Puntaru	13.30	2.90	21.80	10.40	78.20		
5	5307056	Beangonong - Boloang	23.20	3.80	16.38	19.40	83.62		
		IUMLAH	131.85	85.59	64.91	46.26	35.09		
J. KABUPATEN SUMBA TIMUR									
1	5302057	Sp. Mohubukul - Lumbung	18.95	8.544	45.09	10.406	54.91		
2	5302058	Melolo - Kananggar	49.05	38.00	77.47	11.05	22.53		
3	5302059	Kananggar - Sp. Aukakehok	13.20	3.80	28.79	9.40	71.21		
4	5302060	Sp. Aukakehok - Baing	48.81	12.41	25.43	36.40	74.57		
5	5302061	Sp. Aukakehok - Sp. Lailunggi	32.55	22.10	67.90	10.45	32.10		
6	5302062	Sp. Lailunggi - Malahar	42.66	4.56	10.69	38.10	89.31		
7	5302063	Malahar - Praipaha	53.33	21.18	39.71	32.15	60.29		
		IUMLAH	258.55	110.59	42.77	147.96	57.23		
K. KABUPATEN SUMBA TENGAH									
1	5316064	Weeluri (Bts. Kab. Sumba Barat) - Mamboro	23.70	18.60	78.48	5.10	21.52		
		IUMLAH	23.70	18.60	78.48	5.10	21.52		
L. KABUPATEN SUMBA BARAT									
1	5301065	Waikabubak - Tana Rara (Bts. Kab. Sumba Tengah)	13.78	12.00	87.08	1.78	12.92		
2	5301066	Waikabubak - Wanokaka	14.93	9.80	65.64	5.13	34.36		
3	5301067	Sp. Padedeweri - Sp. Patiala	15.22	13.02	85.55	2.20	14.45		
4	5301068	Sp. Patiala - Wetana (Bts. Kab. Sumba Barat Daya)	31.73	19.24	60.64	12.49	39.36		
		IUMLAH	75.66	54.06	71.45	21.60	28.55		
M. KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA									
1	5317069	Karang Indah (Bts. Kab. Sumba Barat) - Bondokodi	22.50	21.40	95.11	1.10	4.89		
2	5317070	Bondokodi - Waitabula	32.88	30.119	91.60	2.761	8.40		
3	5317071	Radamata - Ketewer	15.25	14.45	94.75	0.80	5.25		
		IUMLAH	70.63	65.97	93.40	4.66	6.60		
N. KABUPATEN MANGGARAI BARAT									
1	5315072	Sp. Nggorang - Sp. Terang	32.90	32.18	97.81	0.72	2.19		
2	5315073	Sp. Terang - Sp. Noa	23.40	23.00	98.29	0.40	1.71		
3	5315074	Sp. Noa - Wontong (Bts. Kab. Manggarai)	25.20	24.08	95.56	1.12	4.44		
4	5315075	Sp. Noa - Golowelu (Bts. Kab. Manggarai)	23.30	14.13	60.64	9.17	39.36		
		IUMLAH	104.80	93.39	89.11	11.41	10.89		
O. KABUPATEN MANGGARAI									
1	5313076	Nggalak (Bts. Kab. Manggarai Barat) - Kedindi	30.30	12.750	42.08	17.55	57.92		
2	5313077	Reo - Wae Gongger (Bts. Kab. Manggarai Timur)	0.60	0.60	100.00	-	0.00		
3	5313078	Sp. Cumbi - Iteng	40.72	26.243	64.45	14.48	35.55		
		IUMLAH	71.62	39.59	55.28	32.03	44.72		
P. KABUPATEN MANGGARAI TIMUR									
1	5319079	Wae Gongger (Bts. Kab. Manggarai) - Pota	46.30	27.80	60.04	18.50	39.96		
2	5319080	Pota - Labuan Kelambu (Bts. Kab. Ngada)	35.00	15.51	44.31	19.49	55.69		
3	5319081	Bealaing - Wae Rasan (Bts. Kab. Ngada)	73.82	42.99	58.24	30.83	41.76		
4	5319082	Borong - Nceang	24.52	24.52	100.00	-	0.00		
5	5319083	Sp. Dangka Mangkang - Dampek	50.83	26.67	52.47	24.16	47.53		
		IUMLAH	230.47	137.49	59.66	92.98	40.34		
Q. KABUPATEN NGADA									
1	5312084	Mbazang (Bts. Kab. Manggarai Timur) - Sp. Waepana	35.92	19.02	52.95	16.90	47.05		
2	5312085	Malanusa - Maumbawa (Bts. Kab. Nagekeo)	19.91	18.81	94.48	1.10	5.52		
3	5312086	Labuan Kelambu (Bts. Kab. Manggarai Timur) - Riung	25.06	21.26	84.84	3.80	15.16		
4	5312087	Riung - Poma	30.22	27.62	91.40	2.60	8.60		
5	5312088	Poma - Bajawa	37.84	22.74	60.10	15.10	39.90		
6	5312089	Riung - Lengkosambi (Bts. Kab. Nagekeo)	17.90	17.70	98.88	0.20	1.12		
		IUMLAH	166.85	127.15	76.21	39.70	23.79		
R. KABUPATEN NAGEKEO									
1	5318090	Nggolonio (Bts. Kab. Ngada) - Danga	18.80	18.30	97.34	0.50	2.66		
2	5318091	Marapokot - Aeramo	6.66	6.36	95.50	0.30	4.50		
3	5318092	Aeramo - Kaburea (Bts. Kab. Ende)	34.50	30.90	89.57	3.60	10.43		
4	5318093	Maumbawa (Bts. Kab. Ngada) - Sp. Gako	29.72	28.02	94.28	1.70	5.72		
		IUMLAH	89.68	83.58	93.20	6.10	6.80		
S. KABUPATEN ENDE									
1	5311094	Kaburea (Bts. Kab. Nagekeo) - Ranakolo	37.24	27.54	73.95	9.70	26.05		
2	5311095	Detusoko - Maurole	48.65	35.25	72.46	13.40	27.54		
3	5311096	Maurole - Koro (Bts. Kab. Sikka)	41.15	32.95	80.07	8.20	19.93		
4	5311097	Wologai - Detukeli	15.35	15.05	98.05	0.30	1.95		
5	5311098	Ende - Nuabosi	7.85	5.05	64.33	2.80	35.67		
		IUMLAH	150.24	115.84	77.10	34.40	22.90		
T. KABUPATEN SIKKA									
1	5310099	Koro (Bts. Kab. Ende) - Maumere	36.58	36.08	98.63	0.50	1.37		
2	5310100	Hepang - Sikka	8.65	5.35	61.85	3.30	38.15		
3	5310101	Waepare - Bola	20.00	13.10	65.50	6.90	34.50		
4	5310102	Napungmali - Mudajebak (Bts. Kab. Flores Timur)	25.70	21.80	84.82	3.90	15.18		
		IUMLAH	90.93	76.33	83.94	14.60	16.06		
U. KABUPATEN FLORES TIMUR									

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG SESUAI SK (KM)	PANJANG TIAP KONDISI (KM)				KET	
				MANTAP		TIDAK MANTAP			
				KM	%	KM	%		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1	5309103	Mudajebak (Bts. Kab. Sikka) - Wairunu	17.62	15.52	88.08	2.10	11.92		
2	5309104	Larantuka - Watowiti	5.44	5.44	100.00	-	0.00		
3	5309105	Watowiti - Waiklibang	25.00	17.80	71.20	7.20	28.80		
4	5309106	Wailebe - Waiwerang	23.45	23.35	99.57	0.10	0.43		
5	5309107	Wairwerang - Sp. Withiama	13.10	13.10	100.00	-	0.00		
6	5309108	Sp. Koililang - Sagu	10.31	4.41	42.77	5.90	57.23		
7	5309109	Ritaebang - Lamakera	46.65	39.05	83.71	7.60	16.29		
JUMLAH			141.57	118.67	83.82	22.90	16.18		
V. KABUPATEN LEMBATA									
1	5308110	Balauring - Wairiang	20.52	16.82	81.97	3.70	18.03		
2	5308111	Waijarang - Wulandoni	55.70	42.50	76.30	13.20	23.70		
JUMLAH			76.22	59.32	77.83	16.90	22.17		
TOTAL			2,687.31	1,867.21	69.48	820.10	30.52		



Catatan :

1. Total Ruas Jalan Provinsi NTT Sebanyak 111 Ruas

2. Data ini merupakan hasil survey kondisi pada akhir tahun 2025 dan bersifat tentative karena akan dilakukan verifikasi oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur dan Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PU pada saat asistensi data teknis yang akan menjadi data final pada aplikasi SIPDJD.



PEMERINTAH NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama, Telp. /Fax :-

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KONDISI FISIK/KINERJA JARINGAN IRIGASI
UNTUK SELURUH DAERAH IRIGASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

Format Data Pendukung
Pembilang

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	KABUPATEN/KOTA	LUAS DAERAH IRIGASI	KLASIFIKASI KONDISI FISIK IRIGASI								TINGKAT KERUSAKAN (%)								KET	
				SALURAN PRIMER (METER)				SALURAN SEKUNDER (METER)				SALURAN PRIMER (%)				SALURAN SEKUNDER (%)					
				BA	RR	RS	RB	BA	RR	RS	RB	BA	RR	RS	RB	BA	RR	RS	RB		
1	Batuh Puth/Oebobo	Kab. Timor Tengah Selatan	400	812.50	187.50	385.50	991.71	2,809.50	217.30	356.00	2,622.35	34.18	7.89	16.22	41.72	46.78	3.62	5.93	43.67		
2	Biliuana	Lintas Kab. TTS & Kab. TTU	1,430	-	-	-	1,400.00	125.00	-	-	10,175.00	-	-	-	100.00	1.21	-	-	-	98.79	
3	Hasfuk	Lintas Kab. TTU & Kab. Belu	1,600	940.82	57.93	-	735.75	2,601.90	33.66	-	4,128.24	54.24	3.34	-	42.42	38.47	0.50	-	-	61.03	
4	Aroki	Kab. Timor Tengah Utara	1,242	3,131.57	-	-	1,146.49	2,080.08	542.14	55.16	6,356.21	73.20	-	-	26.80	23.03	6.00	0.61	-	70.36	
5	Fatu Besi	Kab. Belu	1,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	
6	Maubusa	Kab. Belu	1,350	1,260.00	-	-	2,820.04	5,045.32	772.12	492.26	2,015.90	30.88	-	-	69.12	60.60	9.27	5.91	-	24.21	
7	Obor	Kab. Belu	1,815	212.00	26.50	26.50	1,493.82	3,044.25	-	1,014.75	4,583.94	12.05	1.51	1.51	84.93	35.22	-	-	11.74	53.04	
8	Konga	Kab. Flores Timur	1,100	534.00	56.96	49.84	71.20	7,097.42	827.60	-	5,202.94	75.00	8.00	7.00	10.00	54.06	6.30	-	-	39.63	
9	Waikelak	Kab. Flores Timur	1,080	705.00	157.50	78.75	1,883.75	2,846.70	-	712.50	2,416.35	24.96	5.58	2.79	66.68	47.64	-	-	11.92	40.44	
10	Waiwadad	Kab. Flores Timur	1,450	750.00	75.00	-	2,572.80	3,826.00	526.00	1,010.00	6,181.00	22.07	2.21	-	75.72	33.15	4.56	8.75	-	53.55	
11	Enorain	Kab. Kupang	1,100	200.00	12.50	12.50	25.00	1,963.50	-	535.50	9,631.00	80.00	5.00	5.00	10.00	16.19	-	-	4.41	79.40	
12	Kolidoki	Kab. Kupang	1,071	1,434.00	478.00	-	551.50	2,083.87	416.77	-	7,594.96	58.21	19.40	-	22.39	20.64	4.13	-	-	75.23	
13	Netermanu	Kab. Kupang	1,350	2,680.50	177.70	177.70	518.10	14,324.57	1,625.62	1,425.52	2,938.30	75.42	5.00	5.00	14.58	70.52	8.00	7.02	-	14.46	
14	Wai Matan Boto	Kab. Lembata	1,350	967.05	63.45	126.90	2,861.60	2,232.30	177.00	1,010.00	6,181.00	24.06	1.58	3.16	17.20	20.13	1.60	1.60	76.67	76.67	
15	Alas	Kab. Malaka	1,650	113.00	-	-	450.00	2,321.11	357.09	148.79	5,110.01	20.07	-	-	79.93	29.24	4.50	1.87	-	64.38	
16	Wellman	Kab. Malaka	1,000	9,202.02	126.50	111.40	188.81	2,941.39	500.00	125.00	3,349.79	95.57	1.31	1.16	1.96	91.44	15.54	3.89	-	10.87	
17	Cancar	Kab. Manggarai	2,500	2,307.23	-	-	2,195.27	8,260.64	815.09	-	5,345.26	51.24	-	-	48.76	57.28	5.65	-	-	37.07	
18	Golowoi	Kab. Manggarai	1,500	525.48	-	260.81	2,550.13	218.19	276.41	-	13,905.41	15.75	-	7.82	76.43	1.52	1.92	-	-	96.57	
19	Satar Lenda	Kab. Manggarai	1,525	2,759.45	29.44	131.81	2,092.55	5,392.78	302.29	311.79	9,852.93	55.04	0.59	2.63	41.74	34.00	1.91	1.97	-	62.13	
20	Wae Ces 1-4	Kab. Manggarai	2,750	8,406.40	198.02	-	2,551.74	10,834.52	592.71	-	20,691.07	75.35	-	-	22.87	33.73	1.85	-	-	64.42	
21	Wae Ganggang	Kab. Manggarai Barat	1,281	3,753.83	56.13	30.72	7,389.69	6,194.48	141.00	258.00	3,247.30	33.43	0.50	0.27	65.80	185.12	4.21	7.71	-	97.04	
22	Wae Faku	Kab. Manggarai Barat	1,050	1,285.17	150.00	200.00	24,671.27	1,020.00	200.00	250.00	16,419.10	4.89	0.57	0.76	93.78	5.70	1.12	1.40	-	91.78	
23	Wae Tiwo Lawo	Kab. Manggarai Barat	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Waeracang	Kab. Manggarai Barat	1,200	2,882.28	-	-	6,216.81	417.76	-	-	4,899.13	31.68	-	-	68.32	7.86	-	-	-	92.14	
25	Wae Mokei 1, II	Kab. Manggarai Timur	1,007	3,878.73	198.02	-	1,127.68	9,196.76	702.60	1,228.40	13,937.99	74.53	3.80	-	21.67	36.69	2.80	4.90	-	55.61	
26	Waerana	Kab. Manggarai Timur	1,022	780.39	140.40	175.50	823.71	4,237.50	395.50	282.50	4,134.50	40.65	7.31	9.14	42.90	46.82	4.37	3.12	-	45.69	
27	Malawitu	Kab. Nagekeo	1,000	1,052.02	63.00	42.00	794.40	2,731.51	258.62	620.69	7,639.18	53.91	3.23	2.15	40.71	24.28	2.30	5.52	-	67.90	
28	Ganggang	Kab. Ngada	1,000	231.00	-	-	760.00	3,714.21	717.04	478.03	5,340.72	23.31	-	-	76.69	36.24	7.00	4.66	-	52.10	
29	Luwurweton	Kab. Ngada	1,000	2,715.50	50.00	99.00	3,914.81	6,304.68	75.00	203.15	1,465.44	40.06	0.74	1.46	57.75	78.34	0.93	2.52	-	18.21	
30	Malatawa	Kab. Ngada	1,344	699.28	-	62.85	66.38	8,656.49	339.54	257.72	5,167.96	84.40	-	7.59	8.01	60.02	2.35	1.79	-	35.83	
31	Nuakua	Kab. Ngada	1,200	-	-	-	2,710.00	-	-	-	2,700.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00	
32	Manubulu	Kab. Rote Ndao	1,250	625.00	187.50	125.00	1,562.50	2,788.89	1,471.45	863.47	4,700.52	25.00	7.50	5.00	62.50	28.39	14.98	8.79	-	47.85	
33	Kolesia	Kab. Sikka	1,250	894.00	343.00	34.30	100.70	3,768.68	398.73	930.37	1,547.72	65.16	25.00	2.50	7.34	56.71	6.00	14.00	-	23.29	
34	Loli	Kab. Sumba Barat	2,390	1,403.45	91.18	25.98	1,031.99	14,334.25	1,502.13	1,612.16	5,390.06	54.98	3.57	1.02	40.43	62.76	6.58	7.06	-	23.60	
35	Wanokaka	Kab. Sumba Barat	2,653	11,908.61	1,808.39	3,800.90	2,584.10	2,101.19	2,366.18	3,758.27	5,356.51	59.24	9.00	18.91	12.85	15.47	17.42	27.67	-	39.44	
36	Mataliku	Kab. Sumba Barat Daya	1,089	467.67	-	-	19.43	5,900.64	252.50	252.50	5,494.36	96.01	-	-	3.99	49.59	2.12	2.12	-	46.17	
37	Waeleth Sawah	Kab. Sumba Barat Daya	2,500	645.04	-	-	737.30	7,348.28	1,193.89	497.46	5,459.20	46.66	-	-	53.34	50.68	8.23	3.43	-	37.65	
38	Mangili	Kab. Sumba Timur	2,666	1,275.00	-	-	-	13,304.02	-	1,699.38	9,603.60	100.00	-	-	-	54.07	-	-	-	39.03	
39	Mataiyang	Kab. Sumba Timur	1,579	1,035.95	1,021.75	-	2,029.30	8,421.93	1,252.20	-	12,760.87	25.35	25.00	-	49.65	37.54	5.58	-	-	56.88	
40	Meloko	Kab. Sumba Timur	1,215	7,829.14	267.50	535.00	2,400.72	7,453.62	481.36	240.51	2,866.56	70.97	2.42	4.85	21.76	67.50	4.36	2.18	-	25.96	
41	Oebelo	Kab. Timor Tengah Selatan	1,089	868.40	61.45	122.90	301.25	6,478.04	913.37	-	6,882.29	64.14	4.54	9.08	22.25	45.38	6.40	-	-	48.22	
42	Ponu	Kab. Timor Tengah Utara	1,430	897.05	187.50	125.00	315.45	3,701.53	860.33	286.78	6,636.88	58.82	12.30	8.20	20.69	32.23	7.49	2.50	-	57.78	
JUMLAH			60,328	82,069	6,273	6,741	86,658	198,123	21,503	20,084	252,058	45.96	4.02	2.93	44.71	42.41	4.49	4.30	48.81		

CATATAN :

- BA : BAIK
- RR : RUSAK RINGAN
- RS : RUSAK SEDANG
- RB : RUSAK BERAT

*** Capaian Luas Areal Irigasi Fungsional yang sudah mendapat penanganan sampai dengan Tahun 2025 adalah 35.761,74 Ha





LUAS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.c.1

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	KABUPATEN/KOTA	LUAS (HA)	KET
1	Batuh Putih/Oebobo	Kab. Timor Tengah Selatan	400	
2	Biliuana	Lintas Kab. TTS & Kab. TTU	1,430	
3	Hasfuik	Lintas Kab. TTU & Kab. Belu	1,600	
4	Aroki	Kab. Timor Tengah Utara	1,242	
5	Fatu Besi	Kab. Belu	1,650	
6	Maubusa	Kab. Belu	1,350	
7	Obor	Kab. Belu	1,815	
8	Konga	Kab. Flores Timur	1,100	
9	Waikelak	Kab. Flores Timur	1,080	
10	Waiwadan	Kab. Flores Timur	1,450	
11	Enorain	Kab. Kupang	1,100	
12	Kolidoki	Kab. Kupang	1,071	
13	Netenmanu	Kab. Kupang	1,350	
14	Wai Matan Boto	Kab. Lembata	1,350	
15	Alas	Kab. Malaka	1,650	
16	Weliman	Kab. Malaka	1,000	
17	Cancar	Kab. Manggarai	2,500	
18	Golowoi	Kab. Manggarai	1,500	
19	Satar Lenda	Kab. Manggarai	1,525	
20	Wae Ces 1-4	Kab. Manggarai	2,750	
21	Wae Ganggang	Kab. Manggarai Barat	1,281	
22	Wae Paku	Kab. Manggarai Barat	1,050	
23	Wae Tiwo Lawo	Kab. Manggarai Barat	1,200	
24	Waeracang	Kab. Manggarai Barat	1,200	
25	Wae Mokol I, II	Kab. Manggarai Timur	1,007	
26	Waerana	Kab. Manggarai Timur	1,022	
27	Malawitu	Kab. Nagekeo	1,000	
28	Ganggong	Kab. Ngada	1,000	
29	Luwurweton	Kab. Ngada	1,000	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	KABUPATEN/KOTA	LUAS (HA)	KET
30	Malatawa	Kab. Ngada	1,344	
31	Nuakua	Kab. Ngada	1,200	
32	Manubulu	Kab. Rote Ndao	1,250	
33	Kolesia	Kab. Sikka	1,250	
34	Loli	Kab. Sumba Barat	2,390	
35	Wanokaka	Kab. Sumba Barat	2,653	
36	Mataliku	Kab. Sumba Barat Daya	1,089	
37	Waekeloh Sawah	Kab. Sumba Barat Daya	2,500	
38	Mangili	Kab. Sumba Timur	2,666	
39	Mataiyang	Kab. Sumba Timur	1,579	
40	Melolo	Kab. Sumba Timur	1,215	
41	Oebelo	Kab. Timor Tengah Selatan	1,089	
42	Ponu	Kab. Timor Tengah Utara	1,430	
JUMLAH			60,328	



NO	REGIONAL WILAYAH SPAM (KABUPATEN/KOTA)	JUMLAH KUMULATIF KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA							KET	
		JARINGAN PERPIPAAN				BUKAN JARINGAN PERPIPAAN				JUMLAH
		UNIT AIR BAKU	UNIT PRODUKSI	UNIT DISTRIBUSI	UNIT PELAYANAN	SUMUR DANGKAL	SUMUR POMPA	BAK PENAMPUNGAN AIR HUJAN		
d.	Kelompok Zona 4									
	14 kelompok masyarakat di Penhil Timur, yaitu :									
	1. Kelompok Oemathonis									
	2. Kelompok Sanjuan 1									
	3. Kelompok Sanjuan 2									
	4. Kelompok Sanjuan 3									
	5. Kelompok Setia									
	6. Kelompok Damai									
	7. Kelompok Kasih									
	8. Kelompok Mawar									
	9. Kelompok Bougenvil									
	10. Kelompok Flamboyan									
	11. Kelompok Kamboja									
	12. Kelompok Kenari 1									
	13. Kelompok Kenari 2									
	14. Kelompok Bukit Cinta									
	15. Kelompok Bukit Cinta Belanda									
	JUMLAH	1.244.160 m³/thn	1.244.160 m³/thn	600.691,47 m³/thn	443.911 m³/thn					





PEMERINTAH NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama, Telp. /Fax :-

**KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.c.4

NO	REGIONAL SPAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KUMULATIF KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI YANG BERSANGKUTAN	KET
1	UPTD SPAM	600.691,47 m ³ /thn	*melampirkan target kinerja pembangunan SPAM
JUMLAH RUMAH KESELURUHAN		600.691,47 m ³ /thn	





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI
Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama Kupang - NTT

DATA DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI NTT

FID	NAMA_DI	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas PERMEN PUPR14/2015 (Ha)	Luas BIG (Ha)	Luas Baku (Ha)	Luas Potensial (Ha)	Luas Fungsional (Ha)	Sumber Air	IKSI (%)						Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha)					
											1. Prasarana Fisik (45%)	2. Produktivitas (15%)	3. Sarana Penunjang (10%)	4. Organisasi Personalia (15%)	5. Dokumentasi (5%)	6. P3A/G P3A/I P3A (10%)	Jumlah	Baik (Ha)	Rusak Ringan (Ha)	Rusak Sedang (Ha)	Rusak Berat (Ha)	Total
1	D.I ALAS	Malaka	Kobalima Timur	Alas Selatan	1650	1650	1650	94	94	Sungai / Mata Air	27.50	3.00	10.00	0.00	3.00	0.00	43.50	5	2	3	84	94
2	D.I AROKI	TTU	Biboki Tanpah, Biboki Utara, Laenmanen, Raimanuk	Oekopa, Tualena, Oerimbasi, Tasain, Meotroi	1242	777	777	777	768	Sungai	18.00	5.25	0.00	3.75	3.00	0.38	30.38	212.5	130.75	145	279.8	768
3	D.I BATU PUTH/OEBOBO	TTS / Kab. Kupang	Takari, Batu Putih	Noelmina, Oebobo	400	400	400	227	227	Sungai	18.75	3.00	6.60	5.00	4.00	0.50	37.85	119	48.2	34	25.8	227
4	D.I BILUANA	TTS	Noemuti, Polen, Miomafo Barat	Fatutasu, Fatunisuan, Oelnunuh, Kel. Kiuola	1430	78	78	78	78	Sungai	36.25	2.5	2.5	0	1	0	42.25	15	25	15	23	78
5	D.I CANCAR	Manggarai	Ruteng, Satar Mese	Meler, Waebelang, Belang Turi, Pong Leko, Bulan, Pong Lao, Bangka Lao, Jaong, Compang Dalo, Rai, Pong Mulung	2500	2500	2500	709	709	Sungai	21.75	5	7	3	4	2.5	43.25	278.4	96.68	406.7	1382	2164
6	D.I ENORAIN	TTU	Amarasai Timur	Enorain	1100	73	73	73	73	Sungai	34.25	2.5	2.5	0	3	0	42.25	24.25	4.5	8	36.25	73
7	D.I FATU BESI	Belu	Tasifeto Timur	Halimodok, Takirin	1650	178	178	178	178	Sungai	28	3	10	0	0	0	41	68.08	16.28	52.8	40.84	178
8	D.I GANGGONG	Manggarai Barat	Riung	Tsenterong, Wangka Selatan, Wangka, Rawangkalo, Tsenterong I	1000	1000	1000	462	398	Sungai	32.5	3	6.6	3	3	0	48.1	145	10.5	101	141.5	398
9	D.I GOLOWOI	Manggarai Barat	Cibal Barat, Rahong Utara	Golo Lanak, Golo Woi, Wae Mantang, Manong, Wae Codi	1500	1500	1500	301	230	Sungai	30.75	4	6.6	0	2	0	43.35	100	0	5.5	128.5	234
10	D.I HASFUIK	TTU	Kakuluk Mesak, Biboki Anleu	Sifaniha, Nonotbatan, Motadik, Fatuketi, Dualaus	1600	656	656	656	656	Sungai	15	3	6.6	7.5	1	0.5	33.6	195	139	119	203	656
11	D.I KOLESIA	Sikka	Magepanda	Kolisia, Kolisia B	1250	1250	1250	230	230	Sungai	24.5	4	6.6	5	5	2.5	47.6	156.3	10	7.5	56.25	230
12	D.I KOLIDOKI	Kupang	Amabi Oefeto, Kupang Timur, Fatuleu	Manusak, Kel. Naibonat, Raknamo, Kuanheum, Fatuteta	1071	1071	1071	804	100	Sungai	31.25	2.5	2.5	5	3	0.5	44.75	34	8.1	10.9	47	100
13	D.I KONGA	Flores Timur	Titehena, Wulangitang	Kobasoma, Konga, Nilek Noheng	1100	621	621	175	175	Sungai	24.25	4	6.6	5	5	0.5	45.35	90.75	18	19.5	46.75	175



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI
 Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama Kupang - NTT

DATA DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI NTT

FID	NAMA_DI	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas PERMEN PUPR14/2015 (Ha)	Luas BIG (Ha)	Luas Baku (Ha)	Luas Potensial (Ha)	Luas Fungsional (Ha)	Sumber Air	IKSI (%)						Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha)					
											1. Prasarana Fisik (45%)	2. Produktivitas (15%)	3. Sarana Penunjang (10%)	4. Organisasi Personalia (15%)	5. Dokumentasi (5%)	6. P3A/GP3A/1P3A (10%)	Jumlah	- Baik (Ha)	- Rusak Ringan (Ha)	- Rusak Sedang (Ha)	- Rusak Berat (Ha)	Total
14	D.I LOLI	Sumba Barat	Loli, Kota Waikabubak	Kel. Wae Dabo, Kel. Wae Karou, Kel. Loda Pare, Kel. Pada Eweta, Kel. Sobawawi, Kel. Komerda, Kel. Maliti, Dede Kadu, Kel. Kampung Sawah, Kel. Kampung Baru, Kodaka, Tebara, Kalembu Kuni, Bera Dolu, Soda Rade, Pua Mawo, Ubu Pede, Doka Kaka	2390	2390	2390	671	671	Sungai	29.5	4	6.6	5	4	0	49.1	281.5	119.56	135.1	259.8	796
15	D.I LUWURWETON	Ngada	Riung Barat	Wolomeze, Wolomeze II, Ngara, Ria, Ria I, Lanamsi	1000	1000	1000	376	295	Sungai	18.43	10.7	2	2.14	2	0.21	35.48	97.5	18.5	31.5	200.5	348
16	D.I MALATAWA	Ngada	Bajawa Utara, Riung Barat	Benteng Tawa, Uluwae I, Uluwae, Watukapu	1344	1344	1344	766	558	Sungai / Mata Air	38	4	6.6	5	3	2.5	59.1	322.8	85.93	130.8	276.5	816
17	D.I MALAWITU	Nagekeo	Boawae	Keturahan Ola Kile	1000	1000	1000	1224	716	Sungai	35	3.5	6.6	0	4	0	49.1	351.3	161.25	193.8	517.8	1224
18	D.I MANGILI	Sumba Timur	Pahungga Lodu	Kaliuda, Tanamanang	2666	2666	2666	983.00	689	Sungai	17.25	4	6.6	5	5	4.5	42.35	303.2	59.28	53.93	272.6	689
19	D.I MANUBULU	Rote Ndao	Rote Tengah	Maubesi, Lidabesi, Lidamanu, Onatali, Limakoli, Nggodimeda, Suebela	1250	1250	1250	560	560	Embung / Mata Air	28.75	4	2.5	3	3	0	41.25	227.5	5	77.5	250	560
20	D.I MATAIYANG	Sumba Timur	Lewa, Lewa Tidahu	Kangelii, Lai Hau, Tanarara, Kel. Lewa Paku, Kambatawundut,	1579	1572	1572	1216	754	Mata Air	21	19.21	4.35	5.62	3.2	3.2	56.58	132.9	276.325	268.4	143.3	821
21	D.I MATALIKU	Sumba Barat Daya	Loura	Rama Dana, Karuni, Lete Konda	1089	1089	1089	438	438	Sungai / Mata Air	30.5	4	6.6	3	4	0	48.1	194.9	34.075	81.65	127.4	438
22	D.I MAUBUSA	Belu	Tasifeto Timur	Manleten, Dafala	1350	483	483	483	483	Mata Air	26	3	10	5	2	0.5	46.5	251	37.4	82.2	112.4	483
23	D.I MELOLO	Sumba Timur	Umalulu	Watuhadang, Mutunggeding, Matawai Atu, Patawang, Watupuda	1215	1215	1215	598	562	Sungai	30	12	2	11.67	2	0.75	58.42	224.9	147.62	56.5	169	598
24	D.I NETENMANU	Kupang	Amfoang Timur	Netemnanu Selatan, Netemnanu Utara, Netemnanu	1350	1350	1350	684	684	Sungai	22.25	5	2	7.5	5	2.5	44.25	281.2	93.8	128.3	180.7	684
25	D.I NUAKUA	Ngada	Wolomeze	Wue, Denatena Timur, Denatena	1200	1200	1200	183	59	Sungai	15	3	6.6	5	1	2	32.6	17	5	8	29	59
26	D.I OBOR	Belu	Tasifeto Barat, Raimanuk	Rinbesibat, Leuntolu, Mandeu, Rafea, Naitimu	1815	1815	1815	701	701	Sungai	30	4	10	3	2	0.35	49.35	226.3	103.75	112.3	267.8	710
27	D.I OEBELO	TTS	Amanuban Selatan	Oebelo	1089	1089	1089	370	368	Sungai	17	3	2.5	7	5	4.5	39	50.94	18.48	69.01	229.6	368



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI

Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama Kupang - NTT

DATA DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI NTT

FID	NAMA DI	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas PERMEN PUPR 14/2015 (Ha)	Luas BIG (Ha)	Luas Baku (Ha)	Luas Potensial (Ha)	Luas Pungional (Ha)	Sumber Air	IKSI (%)						Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha)					
											1. Prasarana Fisik (45%)	2. Produktivitas (15%)	3. Sarana Penunjang (10%)	4. Organisasi Personalia (15%)	5. Dokumentasi (5%)	6. P3A/GP3A/I P3A (10%)	Jumlah	- Baik (Ha)	- Rusak Ringan (Ha)	- Rusak Sedang (Ha)	- Rusak Berat (Ha)	Total
28	D.I PONU	TTU	Biboki Anleu	Kel. Ponu	1430	1430	1430	843	308	Sungai	20	3	6.6	7	5	4.5	46.1	105	50.91	7.29	144.8	308
29	D.I SATAR LENDA	Manggarai	Satar Mese Barat	Satar Ruwuk, Satar Lenda, Satar Luju, Caka Luju	1525	1525	1525	1193	399	Sungai	31.25	4	6.6	7.5	2	2.5	53.85	183.4	26.16	73.08	116.4	399
30	D.I WAE CES 1-4	Manggarai	Langke Rembong, Wae Ri'i, Cibal	Golo Dukal, Pau, Lawir, Pitak, Mbatumuku, Pitak, Wali, Karot, Tenda, Bangka Kenda, Karot, Golo Watu, Golo Wuas, Golo Watu, Ranggi, Satar Ngkeling, Bangka Jong, Ndehes, Poo, Compang Ndhes, Cerep, Wae Ri'i, Longio, Golo Mendo, Golo Cador	2750	1990	1990	1990	626	Sungai	18.8	8.4	1	12	1	0.3	41.5	224.3	84.84	34	285.8	629
31	D.I WAE GANGGANG	Manggarai Barat	Macang Pacar	Nanga Kantor Barat, Romang, Benteng Ndope	1281	1281	1281	438	438	Sungai / Mata Air	22.5	5	12.6	3	3	2.5	48.6	117.1	75.26	85.9	159.7	438
32	D.I WAE MOKEL I, II	Manggarai Timur	Kotak Omba, Borong	Mokel, Benteng Raja, Mokel Riwu, Mokel Morid, Golo Meni, Rana Mbeling	1007	1007	1007	715	302	Sungai / Mata Air	18	5	6.6	7	4	2.5	43.1	137	57	8	98	300
33	D.I WAE PAKU	Manggarai Barat	Sanonggoang	Golo Manting, Golo Sengang	1050	1050	1050	300	95	Sungai	37.25	5	6.6	5	1	2.5	57.35	372	171.19	50.49	57.32	651
34	D.I WAE TIWO LAWU	Manggarai Barat	Lembor Selatan	Nangan Bere	1200	0	0	0	0	Sungai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	D.I WAEKELOH SAWAH	Sumba Barat Daya	Wewewa Timur	Pada Eweta, Mareda Kalada, Kalembo Ndara Manu	2500	2500	2500	863	739	Mata Air	23.5	5	6.6	5	5	2.5	47.6	1002	108	167	181	1458
36	D.I WAERACANG	Manggarai Barat	Sanonggoang	Sanonggoang, Golo Mbu, Watu Panggal, Golo Ndaring, Wae Lolos	1200	1200	1200	277	118	Sungai	31.75	5	12.6	7	3	2.5	61.85	44.2	13	9.2	35.6	102
37	D.I WAERANA	Manggarai Timur	Kotak Omba, Elar Selatan	Gunung Baru, Rana Mbata, Pari, Sipi, Golo Wuas, Paan Waru	1200	1022	1022	330	120	Sungai	17.5	4	6.6	7	4	2.5	41.6	105	60	46	119	330
38	D.I WAI MATAN BOTO	Lembata	Nagawutung, Omesuri	Penikeneke, Idalolong, Peusawa, Wowong, Bean	1350	1350	1350	131	131	Sungai	31	3.5	6.6	0	1	0	42.1	25	15	35	56	131
39	D.I WAIKELAK	Flores Timur	Titehena, Demon Pngong	Serinuho, Lewokluwok	1080	6	6	6	6	Sungai	10.25	2.5	6.6	0	1	0	20.35	3	1	0	2	6
40	D.I WAIWADAN	Flores Timur	Adonara Barat	Wureh	1450	99	99	99	99	Sungai	10.5	3	2.5	5	2	0	23	19.25	3.75	0.75	75.25	99



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI
 Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama Kupang - NTT

DATA DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI NTT

FID	NAMA DI	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas PERMEN PUPR 14/2 015 (Ha)	Luas BIG (Ha)	Luas Baku (Ha)	Luas Potensial (Ha)	Luas Fungsional (Ha)	Sumber Air	IKSI (%)						Areal Terdampak Kondisi Jaringan irigasi (Ha)					
											1. Prasarana Fisik (45%)	2. Produktivitas (15%)	3. Sarana Penunjang (10%)	4. Organisasi Personalia (15%)	5. Dokumentasi (5%)	6. P3A/G P3A/I P3A (10%)	Jumlah	- Baik (Ha)	- Rusak Ringan (Ha)	- Rusak Sedang (Ha)	- Rusak Berat (Ha)	Total
41	D.I WANOKAKA	Sumba Barat Daya	Wanokaka	Katiku loku, Tara Manu, Hupu Mada, Wehurak (Waihura, Balioku, Parirara, Tara Manu, KatikuLoku, Anawolu, Rewarara, Praibakul)	2653	1034	1034	831	831	Sungai	19.33	11.84	3.56	8.01	2.38	5.16	50.28	982.1	12.5	0	39.43	1034
42	D.I WELIMAN	Malaka	Weliman, Malaka Barat	Haitimuk, Laleten, Kleseleon, Naas, Lakulo, Makthian, Loofoun, Raimataus, Rabasa Haerain, Rabasa	1000	1084	1084	1089	838	Mata Air	26	5.25	2	7.5	2	0.75	43.5	172.5	27	80	201	481
					60506.00	47795.00	47795.00	23122.00	16504.00									7898	2380.59	2953	7102	20334



PETA IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI NTT



42 DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI NTT
PERMEN PUPR No. 14/PRT/M/2015

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	KAB	KOORDINAT		LUAS PERMEN (Ha)	LUAS BAKU (HA)	LUAS POTENSIAL (Ha)	LUAS FUNGSIONAL (Ha)	NO	NAMA DAERAH IRIGASI	KAB	KOORDINAT		LUAS PERMEN (Ha)	LUAS BAKU (HA)	LUAS POTENSIAL (Ha)	LUAS FUNGSIONAL (Ha)
			Latitude	Longitude								Latitude	Longitude				
1	Betuh Putih/Odoboo	Kab. Timor Tengah Selatan	-8.979371	124.591123	400	400	227	22	Wae Faku	Kab. Manggarai Barat	-8.642687	119.84283	1.050	1.050	300	300	
2	Biksuma	Lintas Kab. TTU & Kab. TTU	-9.90095	124.372883	1.430	1.430	78	23	Wae Twa Lawo	Kab. Manggarai Barat	-	-	1.200	1.200	-	-	
3	Hasilak	Lintas Kab. TTU & Kab. Belu	-9.077333	124.781942	1.600	1.600	656	24	Waeacang	Kab. Manggarai Barat	-8.627281	120.692373	1.200	1.200	277	102	
4	Aroki	Kab. Timor Tengah Utara	-9.336724	124.783306	1.242	1.242	777	25	Wae Mokol I, II	Kab. Manggarai Timur	-8.643187	120.693262	1.007	1.007	651	651	
5	Fatu Besi	Kab. Belu	-8.16505	125.006358	1.650	1.650	178	26	Waarana	Kab. Manggarai Timur	-6.658185	120.766478	1.022	1.022	330	330	
6	Mambusa	Kab. Belu	-8.151808	124.966386	1.350	1.350	483	27	Malawitu	Kab. Nagekeo	-6.722890	121.132889	1.000	1.000	1.224	1.224	
7	Oboor	Kab. Belu	-8.315487	124.856645	1.815	1.815	710	28	Ganggong	Kab. Ngada	-8.492685	121.641577	1.000	1.000	462	398	
8	Kongga	Kab. Flores Timur	-8.439388	122.75722	1.100	1.100	175	29	Luwurwetan	Kab. Ngada	-8.562022	120.898745	1.000	1.000	376	348	
9	Waludak	Kab. Flores Timur	-8.318386	122.885328	1.080	1.080	6	30	Matawera	Kab. Ngada	-8.663110	120.912111	1.244	1.244	935	816	
10	Walwadan	Kab. Flores Timur	-8.302388	123.0985	1.450	1.450	99	31	Nusukua	Kab. Ngada	-8.99370	121.04369	1.200	1.200	183	59	
11	Enorak	Kab. Kupang	-10.107481	124.198297	1.100	1.100	73	32	Manubulu	Kab. Rote Ndao	-10.705238	123.0996	1.250	1.250	960	560	
12	Kofidoki	Kab. Kupang	-10.095685	123.884797	1.071	1.071	804	100	33	Kolesia	Kab. Sikka	-8.5549333	122.0993734	1.250	1.250	230	230
13	Hetinmanu	Kab. Kupang	-8.4131919	124.092394	1.350	1.350	684	34	Loli	Kab. Sumba Barat	-8.629342	119.371889	2.390	2.390	2.969	465	
14	Wai Metan Bolo	Kab. Lembata	-8.5010229	123.389328	1.350	1.350	131	35	Wanukaka	Kab. Sumba Barat	-8.894568	119.4549	2.653	2.653	1.034	1.034	
15	Alas	Kab. Belu	-8.4354638	125.07194	1.650	1.650	94	36	Metaliku	Kab. Sumba Barat Daya	-8.440057	119.362598	1.080	1.080	438	438	
16	Weliman	Kab. Malaka	-8.622881	124.86739	1.000	1.000	938	37	Waekeleh Sawah	Kab. Sumba Barat Daya	-8.595378	119.340346	2.500	2.500	1.458	1.458	
17	Gancar	Kab. Manggarai	-8.603925	126.359484	2.500	2.500	1.391	38	Mangili	Kab. Sumba Timur	-10.14184	120.70684	2.666	2.666	983	689	
18	Oolovoi	Kab. Manggarai	-8.507651	126.430679	1.500	1.500	391	39	Matalayang	Kab. Sumba Timur	-8.71384	119.878057	1.579	1.572	2.169	821	
19	Satar Lenda	Kab. Manggarai	-8.828141	126.3172	1.525	1.525	1.193	40	Melolo	Kab. Sumba Timur	-8.896298	120.839013	1.215	1.215	598	598	
20	Wae Cas 1-4	Kab. Manggarai	-8.589198	126.47615	2.750	2.750	1.990	41	Oyobelo	Kab. TTU	-10.11368	124.321078	1.089	1.088	370	368	
21	Wae Ganggang	Kab. Manggarai Barat	-8.437361	126.143843	1.281	1.281	438	42	Ponu	Kab. TTU	-9.1426889	124.674628	1.430	1.430	843	388	
TOTAL													60.328	60.321	27.415	19.588	

DINAS PUPR PROV. NTT
BIDANG PEMBANGUNAN SDA
DAN IRIGASI

Legenda

- Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi NTT
- Sebaran Sawah
- Sumber: BIG 2019
- Bts. Adm. Kecamatan
- Bts. Adm. Kab/Kota

Skala
1:1.800.000

0 39.500 79.000 158.000 M



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari Nomor 52, Kupang
Telepon (0380) 30382, Fax (0380) 833624

SURAT KETERANGAN

Nomor: BU.600.1/03/PUPR/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M
NIP : 19660624 198602 2 006
Pangkat : Pembina Utama Muda
Golongan : IV/c
Jabatan : Plh. Sekretaris Daerah

Dengan ini menerangkan bahwa, Pada Tahun Anggaran 2025, Kegiatan Pengolahan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan dimaksud tidak tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.



Sehubungan dengan itu, Indikator Kinerja Kunci Hasil/IKK Outcome Nomor 1.C.4 yang mengukur **Rasio Total Volume Limbah yang Masuk Dalam SPALD Regional tidak memiliki capaian.**

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 26 Januari 2026
Plh. Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660624 198602 2 006

PARAF HIERARKI	
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	
Sekretaris Dinas PUPR Provinsi NTT	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari Nomor 52, Kupang
Telepon (0380) 30382, Fax (0380) 833624

SURAT KETERANGAN

Nomor: BU.600.1/01/PUPR/2026


Yang bertanda tangan di bawah ini:



Nama : Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M
NIP : 19660624 198602 2 006
Pangkat : Pembina Utama Muda
Golongan : IV/c
Jabatan : Plh. Sekretaris Daerah

Dengan ini menerangkan bahwa, pada tahun anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan beberapa kegiatan fisik yang mendukung pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah, antara lain Pembangunan Sumur Bor pada 17 (tujuh belas) titik lokasi, Pemasangan Water Meter di Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Tengah Utara, serta Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Daerah Irigasi (D.I.) Luwurweton di Kabupaten Ngada (Luncuran T.a 2024). Adapun Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir tidak dapat dilaksanakan, mengingat kegiatan dimaksud tidak tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome) Nomor 1.C.1.1, yang mengukur **Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi, tidak memiliki capaian kinerja** pada Tahun Anggaran 2025.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 26 Januari 2026
Plh. Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660624 198602 2 006

Paraf Hierarki	
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	
Sekretaris Dinas PUPR Provinsi NTT	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari Nomor 52, Kupang
Telepon (0380) 30382, Fax (0380) 833624

SURAT KETERANGAN

Nomor: BU.600.1/04/PUPR/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M
NIP : 19660624 198602 2 006
Pangkat : Pembina Utama Muda
Golongan : IV/c
Jabatan : Plh. Sekretaris Daerah

Dengan ini menerangkan bahwa, Pada Tahun Anggaran 2025, kegiatan Pendataan, Pembangunan, dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan terbatas pada kegiatan perencanaan, yaitu Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi yang berlokasi di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Belu. Adapun kegiatan fisik berupa penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana tidak dapat dilaksanakan karena tidak terdapat kejadian bencana yang bersifat lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sehubungan dengan itu, Indikator Kinerja Kunci Hasil/IKK Outcome Nomor IKK.1.D.1 yang mengukur ***Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni tidak memiliki capaian.***

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 26 Januari 2026
Plh. Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660624 198602 2 006

PARAF HIERARKI	
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	
Sekretaris Dinas PUPR Provinsi NTT	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari Nomor 52, Kupang
Telepon (0380) 30382, Fax (0380) 833624

SURAT KETERANGAN

Nomor: BU.600.1/05/PUPR/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M
NIP : 19660624 198602 2 006
Pangkat : Pembina Utama Muda
Golongan : IV/c
Jabatan : Plh. Sekretaris Daerah



Dengan ini menerangkan bahwa kegiatan Relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi pada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 tidak dilaksanakan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pelaksanaan proyek strategis maupun program pembangunan infrastruktur daerah di lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang berdampak pada pemindahan penduduk atau kebutuhan relokasi warga, sehingga tidak terdapat objek sasaran yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penanganan pada tahun anggaran berjalan.

Sehubungan dengan itu, Indikator Kinerja Kunci Hasil/IKK Outcome Nomor IKK.1.D.2 yang ***mengukur Persentase Warga Negara yang terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas penyediaan Rumah yang Layak Huni tidak ada capaian.***

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 26 Januari 2026
Plh. Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660624 198602 2 006

PARAF HIERARKI	
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	
Sekretaris Dinas PUPR Provinsi NTT	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari Nomor 52, Kupang
Telepon (0380) 30382, Fax (0380) 833624

SURAT KETERANGAN

Nomor: BU.600.1/06/PUPR/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M
NIP : 19660624 198602 2 006
Pangkat : Pembina Utama Muda
Golongan : IV/c
Jabatan : Plh. Sekretaris Daerah



Dengan ini menerangkan bahwa, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2025 melaksanakan Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektare sampai dengan di bawah 15 (lima belas) hektare. Pelaksanaan kegiatan dimaksud sampai dengan akhir tahun anggaran masih berada pada tahap penyusunan dokumen perencanaan, yaitu Perencanaan Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh.

Sehubungan dengan itu maka Indikator Kinerja Kunci Hasil/IKK Outcome Nomor IKK.1.D.3 yang mengukur **Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 -15 Ha yang ditangani tidak ada capaian.**

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 26 Januari 2026
Plh. Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660624 198602 2 006

PARAF HIERARKI	
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	
Sekretaris Dinas PUPR Provinsi NTT	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari Nomor 52, Kupang
Telepon (0380) 30382, Fax (0380) 833624

SURAT KETERANGAN

Nomor: BU.600.1/03/PUPR/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M
NIP : 19660624 198602 2 006
Pangkat : Pembina Utama Muda
Golongan : IV/c
Jabatan : Plh. Sekretaris Daerah



Dengan ini menerangkan bahwa kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya alokasi anggaran yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025. Namun perlu disampaikan bahwa dalam rangka mendukung Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang, telah dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang (SPPR) sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola penataan ruang.

Sehubungan dengan itu, Indikator Kinerja Kunci Hasil/IKK Outcome Nomor 1.C.7 yang mengukur *Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Sudah Diterbitkan di Provinsi tidak ada capaian.*

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 26 Februari 2026
Plh. Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660624 198602 2 006

PARAF HIERARKI	
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	
Sekretaris Dinas PUPR Provinsi NTT	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari Nomor 52, Kupang
Telepon (0380) 30382, Fax (0380) 833624

SURAT KETERANGAN

Nomor: BU.600.1/17/PUPR/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M
NIP : 19660624 198602 2 006
Pangkat : Pembina Utama Muda
Golongan : IV/c
Jabatan : Plh. Sekretaris Daerah

Dengan ini menerangkan bahwa, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanahan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak melaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Pertanahan. Hal ini dikarenakan program dan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan itu maka Indikator Kinerja Kunci Hasil/IKK Outcome Nomor IKK 2.D.2 yang mengukur *Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak ada capaian.*

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 26 Februari 2026
Plh. Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur



PARAF HIERARKI	
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	↓
Sekretaris Dinas PUPR Provinsi NTT	R



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari Nomor 52, Kupang
Telepon (0380) 30382, Fax (0380) 833624

SURAT KETERANGAN

Nomor: BU.600.1/15/PUPR/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M
NIP : 19660624 198602 2 006
Pangkat : Pembina Utama Muda
Golongan : IV/c
Jabatan : Plh. Sekretaris Daerah

Dengan ini menerangkan bahwa, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanahan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak melaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Pertanahan. Hal ini dikarenakan program dan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan itu maka Indikator Kinerja Kunci Hasil/IKK Outcome Nomor IKK 2.D.1 yang mengukur *Persentase Ditetatpkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah tidak ada capaian.*

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 26 Februari 2026
Plh. Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur



PARAF HIERARKI	
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	
Sekretaris Dinas PUPR Provinsi NTT	